

DR. SUTARJO KARTOHADIKUSUMO

HASIL KARYA DAN PENGABDIANNYA

oleh: Drs. Sutrisno



Direktorat
Budayaan

198

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

1982/1983

MILIK DEP. P DAN K
TIDAK DIPERDAGANGKAN

DR. SUTARJO KARTOHADIKUSUMO

Hasil Karya dan Pengabdianya

oleh :

DRS. SUTRISNO

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL
1982/1983**

Penyunting :

1. **Drs. R. Z. Leirissa MA.**
2. **Drs. Suwadi Sjafei**
3. **Drs. M. Soenjata Kartadarmadja**

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan.

Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk membangun bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Agustus 1982.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Tokoh Indonesia.

Adapun pengertian Tokoh Nasional dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa/berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia, sesuai surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan olahraga.

Dasar pemikiran penulisan biografi Tokoh Nasional ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional, tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, melainkan juga mengejar kepuasan batiniah, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang bertujuan menimbulkan perubahan-perubahan yang membina serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri, kebanggaan nasional dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Agustus 1982

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PENDAHULUAN	1
BAB I. MASA KECIL DAN MASA SEKOLAH	6
A. BLORA TEMPAT KELAHIRANNYA	6
B. KETURUNAN PAMONG PRAJA	12
C. RIWAYAT PENDIDIKAN	15
D. MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA	17
E. HOBBY DAN KEPRIBADIANNYA	22
BAB II. PERJUANGANNYA	31
A. KARIERNYA	31
B. PETISI SUTARJO	35
1. Tindakan tangan besi pemerintah Belanda ..	35
2. Petisi Sutarjo	36
3. Berbagai tanggapan terhadap Petisi Sutarjo	39
4. Penolakan Petisi Sutarjo	42
C. MENGHADAPI PENJAJAHAN JEPANG	45
1. Masa penjajahan Jepang	45
2. Sumbangan Sutarjo Kartohadikusumo meng- hadapi penjajahan Jepang	48
D. PERJUANGANNYA DI BIDANG KESEJAH- TERAAN RAKYAT, SOSIAL DAN BUDAYA ..	55

BAB III. PENGABDIANNYA DIMASA REPUBLIK INDONESIA	70
A. PENGABDIANNYA DI BIDANG PEMERINTAHAN	70
B. PENGABDIANNYA DI BIDANG PENDIDIKAN	75
C. HASIL KARYANYA	79
D. TANDA KEHORMATAN YANG DIMILIKI ..	82
BAB IV. AKHIR HAYATNYA	84
A. AKHIR HAYATNYA	84
B. KELUARGA YANG DITINGGALKAN	89
BAB V. PENUTUP	91
DAFTAR CATATAN	100
DAFTAR SUMBER	129
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Lambang Kabupaten Daerah Tingkat II Blora	28
2. Tugu Pancasila di Blora	28
3. Sekelompok orang Samin di depan rumah mereka	28
4. Sutarjo Kartohadikusumo (nomer dua dari kiri) ketika menjabat Jaksa di Rembang tahun 1917	29
5. Keluarga Besar Sutarjo Kartohadikusumo	29
6. Gedung OSVIA di Magelang (dibangun 12 Mei 1874), sekarang ditempati KORESTA 971 DATI II - Magelang ..	30
7. Sutarjo Kartohadikusumo ketika memimpin Perkumpulan Sepak Bola OSVIA Magelang tahun 1910	30
8. Perhimpunan Istri Bestuur Cabang Jakarta membuka Sekolah Rumah Tangga untuk kaum wanita	64
9. Sutarjo Kartohadikusumo ketika menggantikan jabatan Ketua Fraksi PPBB dalam Volksraad dari tangan RAA Wiranatakusuma tahun 1934	64
10. Sidang College van Gedelegeerden Volksraad	65
11. Rapat Umum "Petisi Sutarjo" di Palembang	65
12. Pekan Olah Raga pertama yang diselenggarakan oleh Ikatan Sport Nasional di Jakarta	66
13. Para Pemimpin PPRK pusat dan daerah berkumpul di jalan Raden Saleh 18 Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1940, dalam rangka memperingati siaran radio nasional pertama	66
14. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sutarjo berkunjung ke Departemen Pemerintahan Dalam Negeri Jepang	67
15. Foto bersama ketika Sutarjo Kartohadikusumo menjabat Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri tahun 1955	67
16. Sutarjo Kartohadikusumo ketika menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Tingkat IV tanggal 17 Agustus 1962	68

17. Sutarjo Kartohadikusumo ketika mengucapkan pidato Wisuda Gelar Doctor Honoris Causa di IKIP Bandung, 28 Januari 1967	68
18. Sutarjo Kartohadikusumo beserta istri setelah menerima Gelar Dr. HC	68
19. Penyerahan Piagam Gelar Doctor HC dari Pejabat Rektor IKIP Bandung	69
20. Dr. Sutarjo Kartohadikusumo diapit anak dan menantunya ketika menerima gelar Dr. HC	69

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, tanggal 19 Agustus 1945, tentang Pengangkatan M. Sutarjo Kartohadikusumo menjadi Gubernur Jawa Barat.
- II. Surat Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 1947, tentang Pengangkatan M. Sutarjo Kartohadikusumo menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- III. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 37-A-47, tanggal 3 Juni 1947, tentang Pengangkatan M. Sutarjo Kartohadikusumo Penasehat Kementerian Dalam Negeri merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Agung, menjadi Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung.
- IV. Surat Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, No. 37-A-47, tentang Pengangkatan M. Sutarjo Kartohadikusumo menjadi Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung, terhitung mulai tanggal 23 April 1947.
- V. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 109/M tahun 1953, tentang Pengangkatan Sutarjo Kartohadikusumo menjadi Gubernur Diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri terhitung mulai tanggal 1 Mei 1948 dan pemberhentian (non aktif) Sutarjo Kartohadikusumo dari jabatan Gubernur Diperbantukan pada - Kementerian Dalam Negeri karena ybs. diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung, terhitung mulai tanggal 15 Nopember 1948.
- VI. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 89/A. Civ./48 tanggal 15 Nopember 1948, tentang Pengangkatan M. Sutarjo Kartohadikusumo menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung, terhitung mulai tanggal 15 Nopember 1948.
- VII. Teks Sumpah M. Sutarjo Kartohadikusumo, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tertanggal Jakarta 16 Agustus 1950.
- VIII. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri, Nomer DJ. 147/PD/XI/76, tanggal 9 Nopember 1976, tentang Rekomendasi dan tanggapan terhadap buku Desa karangan - Bp. Sutarjo Kartohadikusumo.
- IX. Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Tingkat IV. Jakarta 17 Agustus 1962.

- X. Surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Perguruan Tinggi RI, No. 52/Dir. Djen/PT/K, tanggal 11 Nopember 1966 kepada Pj. Rektor IKIP di Jakarta, tentang Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa.
- XI. Surat Keputusan Rektor IKIP Bandung, No. 48/Ist/Sp.Rek/IKIP/66, tanggal 20 Desember 1966, tentang Persetujuan Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Pendidikan Bidang Pendidikan Masyarakat kepada Sutarjo Kartohadikusumo.
- XII. Piagam Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa kepada Sutarjo Kartohadikusumo, dalam Ilmu Pendidikan Bidang Pendidikan Masyarakat dari IKIP Bandung, 28 Januari 1967.
- XIII. Surat Keputusan KGPAА Paku Alam VIII, Nomer 1/2507/Ch/Ws/1976, tanggal 30 Maret 1976, tentang pemberian gelar Pangeran dan sebutan Dr. KPH Sutarjo Kartaningprang
- XIV. Berita Lelayu yang dikirim Sugondo Notodisuryo, atas nama keluarga almarhum Sutarjo Kartohadikusumo.
- XV. Ucapan Turut Berdukacita dari Direktur dan segenap Karyawan Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen. PLS dan OR Dep. P dan K, tertanggal 20 Desember 1976.
- XVI. Ucapan Terima Kasih dari keluarga almarhum Sutarjo Kartohadikusumo, tertanggal Jakarta 23 Desember 1976, atas pernyataan turut berdukacita dan bantuan perawatan serta pemakaman Dr. Sutarjo Kartohadikusumo.

PENDAHULUAN

Dengan rendah hati penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya, akhirnya penelitian dan penulisan biografi Tokoh Nasional Dr. Sutarjo Kartohadikusumo ini dapat selesai sebagaimana kepercayaan yang diberikan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen P dan K kepada penulis. Telah banyak tulisan yang dimuat dalam berbagai surat kabar, majalah atau buku tentang Sutarjo Kartohadikusumo dan perjuangan atau pergerakannya, namun rupanya belum ada biografi khusus yang diterbitkan berupa buku tersendiri. Sehingga di sana sini masih ada beberapa bagian yang belum dibicarakan, walaupun **Tokoh Petisi** ini sudah banyak dikenal dikalangan masyarakat luas di Indonesia maupun luar negeri, khususnya melalui Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Dengan penelitian lapangan, penelitian sumber tertulis maupun wawancara, penulis memperoleh kesempatan untuk mencoba mengisi bagian-bagian yang mungkin masih belum terungkap. Ada beberapa langkah yang penulis tempuh untuk sampai pada penulisan ini. Langkah-langkah itu ialah heuristik yaitu kegiatan mencari sumber, kritik berupa penilaian sumber, interpretasi adalah menetapkan makna serta saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh dan akhirnya sampailah kepada historiografi yaitu menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah tertulis. Namun demikian, hasil penulisan yang sederhana ini kami rasa masih banyak kekurangan-kekurangannya, misalnya sumber-sumber tertulis, lisan atau benda yang belum sempat kami dapatkan karena terbatasnya waktu yang tersedia. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi peneliti atau penulis lain untuk menggali dan mendalami lebih lanjut guna menyempurnakannya.

Dalam penulisan ini penulis usahakan seluruhnya menggunakan Ejaan Baru, dengan maksud agar memudahkan bagi generasi muda sekarang ini membaca atau mempelajarinya. Dengan demikian tidak lagi mengalami kesulitan dalam pengucapan nama, istilah atau kata yang digunakan.

Biografi tokoh Nasional Dr. Sutarjo Kartohadikusumo ini disusun dalam bentuk yang meliputi : Pendahuluan, Bab yang dibagi dalam beberapa sub bab dan Penutup.

Pendahuluan, merupakan garis besar pertanggung jawaban penulisan. Bab I berjudul **Dari Kecil Hingga Dewasa**. Bab ini dibagi lagi menjadi lima sub bab yaitu : Pertama **Blora Tempat Kelahirannya**, merupakan pembahasan singkat tentang kota dan daerah Blora tempat kelahiran Sutarjo yaitu di desa dan kecamatan Kunduran kabupaten Blora. Kedua **Keturunan**

Pamong Praja membahas tentang asal usul dan silsilah Sutarjo sebagai keturunan dari Pamong Praja. Ketiga **Riwayat Pendidikan** merupakan pembahasan tentang jenjang pendidikan yang pernah diikuti Sutarjo mulai dari ELS, OSVIA maupun **Bestuurschool**. Keempat **Memembentuk Keluarga Bahagia**, menceritakan perkawinan dan kehidupan keluarga Sutarjo dengan istri pertama, kedua dan ketiga, serta putra-putranya yang diturunkan. Kelima berjudul **Hobby dan kepribadiannya**, merupakan pembahasan hobby Sutarjo sejak kecil sampai masa tua, serta sifat kepribadian yang dimilikinya.

Bab II berjudul **Perjuangannya**. Bab ini dibagi lagi menjadi empat sub bab. Keempat sub bab itu ialah : Pertama **Kariernya** merupakan pembahasan karier Sutarjo sejak lulus dari OSVIA sampai masa pensiun. Kedua **Petisi Sutarjo**, bagian ini diuraikan tersendiri karena dengan melalui Petisi Sutarjo tahun 1936 itulah pengaruh politik dan namanya menjadi terkenal baik di tanah air Indonesia maupun di luar negeri, khususnya Nederland. Melalui Petisi ini Sutarjo memperjuangkan kemerdekaan bertahap bagi bangsa Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun. Walaupun **Volksraad** menyetujui, tetapi pemerintah Nederland menolak petisi ini. Sub bab ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu : 1. Tindakan Tangan Besi Pemerintah Belanda, 2. Petisi Sutarjo, 3. Berbagai tanggapan terhadap Petisi Sutarjo, 4. Penolakan Petisi Sutarjo. Sub bab yang ketiga dari Bab II ini ialah **Menghadapi Penjajahan Jepang**. Sub bab ini dibagi-bagi lagi menjadi dua yaitu : **Masa Penjajahan Jepang** dan **Sumbangan Sutarjo Kartohadikusumo Menghadapi Penjajahan Jepang**. Sub bab kedua, bagian yang keempat ialah : **Perjuangannya dibidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya**. Dalam sub bab ini diuraikan tentang berbagai bentuk perjuangan, kegiatan atau usaha Sutarjo untuk ikut memajukan kesejahteraan rakyat, sosial dan budaya bangsa Indonesia. Bab III berjudul **Pengabdian Di masa Republik Indonesia**. Bab ini khusus membahas pengabdian Sutarjo terutama pada masa Republik Indonesia, sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai masa Orde Baru maupun menjelang akhir hayatnya. Bab ini dibagi lagi menjadi empat sub bab meliputi : Pertama **Pengabdian di bidang Pemerintahan**. Di sini diungkapkan pengabdian Sutarjo melalui berbagai macam lembaga pemerintahan, misalnya sebagai anggota PPKI, KNIP, Gubernur Jawa Barat, Residen Surakarta, Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, Anggota/Wakil Ketua/Ketua DPA, perjuangannya dalam PMI, anggota DPR, Ketua PPRI/PWRI dan berbagai bidang yang lain. Sub bab kedua **Pengabdian dibidang Pendidikan**, membahas tentang pengabdian Sutarjo dibidang ini, yang meliputi : Pandangannya dibidang pendidikan; Perjuangannya dibidang pendidikan pada zaman Belanda,

Jepang dan pengabdianya di masa Republik Indonesia diberbagai Perguruan Tinggi seperti di UGM, Universitas Pajajaran, IKIP Bandung hingga memperoleh Gelar Doctor Honoris Causa. Sub bab ketiga **Hasil Karyanya** . Pembahasan sub bab ini mencakup keseluruhan hasil karya Sutarjo, terutama karya tulisnya sejak zaman Belanda sampai akhir hayatnya, baik yang dimuat pada surat kabar, majalah maupun yang diterbitkan berupa buku. Atas jasa Sutarjo yang besar terhadap nusa, bangsa dan negara Indonesia itulah, maka beliau mendapatkan berbagai Tanda Kehormatan, seperti : Bintang Mahaputra tingkat IV, Satyalencana Karya Satya tingkat II, Gelar Doctor Honoris Causa dan Gelar Kebangsawanan dari Sri Paku Alam VIII. Semua ini dibahas dalam sub bab keempat yang berjudul **Tanda Kehormatan yang Dimiliki** .

Bab IV **Akhir Hayatnya** . Bab ini dibagi dalam dua sub bab. Yang pertama **Akhir Hayatnya** di sini diungkapkan beberapa peristiwa sebelum beliau sakit, ketika sakit, wafat dan pemakamannya di Astana Bibis Luhur Surakarta. Sedangkan **Keluarga yang ditinggalkan** yaitu istri dan anak cucunya, dibahas dalam sub bab kedua dari bab ini.

Akhirnya sampailah pada bagian **Penutup** yang merupakan kesimpulan penulisan ini. Di samping itu penulisan ini dilengkapi pula dengan : Gambar, Daftar Catatan, Lampiran dan Daftar Sumber.

Demikianlah secara garis besar pokok-pokok yang dibahas dalam buku ini. Sebagaimana fungsi sejarah pada umumnya yang mempunyai beberapa kegunaan, biografi Tokoh Nasional Dr. Sutarjo Kartohadikusumo inipun diharapkan ada manfaatnya pula, baik dalam segi edukatif, inspiratif maupun rekreatif. Dengan belajar dari sejarah diharapkan kita menjadi bijaksana terlebih dahulu, guna menghadapi masa kini dan masa mendatang bagi sidang pembaca pada umumnya dan khususnya bagi generasi muda Indonesia selanjutnya.

Walaupun demikian selesainya penulisan ini tidaklah semata-mata atas kerja penulis sendiri. Tanpa bantuan dari berbagai pihak rasanya sulit untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan biografi ini. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila dalam kesempatan ini, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pernyataan terimakasih itu penulis sampaikan kepada :

1. Bp. Gubernur AKABRI Bagian DARAT Magelang beserta Staf, atas kesempatan dan bantuannya dalam penulis mengadakan penelitian serta penulisan biografi ini.
2. Kepala Departemen Pengetahuan Militer Umum dan Kepala Dinas Sejarah Museum dan Perpustakaan AKABRI Bagian DARAT Magelang, atas perkenan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk

- mengadakan penelitian serta penulisan terutama di lingkungan AKABRI tersebut, tempat penulis bekerja.
3. Ketua dan Sekretaris Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen P dan K, Bp. Sutrisno Kutoyo dan Bp. Drs. M. Sunyoto Kartadarmaja beserta Staf, atas segala bantuannya selama penulis melaksanakan penelitian dan penulisan buku ini.
 4. Bp. Susatyo Kusumonoto dan Bp. Setiajid di jalan Raden Saleh 18 Jakarta, yang telah berkenan berwawancara dan memberikan data-data, dokumen, foto, dan lain-lain yang berharga dalam penelitian dan penulisan buku ini.
 5. Mr. Abdul Wahab Suryoadingrat di Jakarta, yang telah berkenan menerima penulis untuk berwawancara.
 6. Mayor Jenderal Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo beserta istri Ny. Edinah Setiadi Kartohadikusumo di Jakarta, yang telah berkenan pula menerima kami berwawancara dan memberikan sumber tertulis yang sangat berharga.
 7. Kolonel RM. Hartomo di AKABRI Bagian DARAT Magelang, atas segala bantuannya.
 8. Dra. Lasminah SS, Dosen/Kepala Perpustakaan IKIP Negeri Semarang, atas segala bantuannya pula.
 9. Ky. Ng. Pudyono Citrosomo di Surakarta, atas kesediaannya menerima penulis berwawancara.
 10. Bp. Suharpono di Gang Dewi Ratih No. 15 Kelurahan Jajar Surakarta, Ibu Sukarsih (Ibu Siten) dan putrinya Murniasih SH di Komplek Perumahan RRI Surakarta, yang telah berkenan menerima penulis berwawancara.
 11. Bp. dan Ibu Suwarno di Langan Jepara, Bp. dan Ibu Moh. Jauhari di Salaman Magelang, keluarga Bp. Suharto di Sleman Yogyakarta, Keluarga adik Sukendar di Jatirawamangun Jakarta, serta saudara-saudara sekandung dari Langan Jepara, atas segala dorongan dan bantuannya, penulis ucapkan terima kasih. Demikian pula terima kasih penulis sampaikan kepada Sdr. Moh. drajat dan Sdr. Sutikno atas bantuannya dalam dokumentasi foto dan pengetikan naskah. Tak lupa kepada istri tercinta Isroiliyah dan ananda Aditya Mohammad Yuwono yang menjadi sumber pendorong segalanya, juga penulis sampaikan terima kasih. Akhirnya kepada semua pihak yang berjasa dalam penelitian dan penulisan buku ini, namun belum sempat penulis sebutkan satu persatu di sini, penulis sampaikan terima kasih pula.

Demikianlah secara singkat apa yang diterangkan dalam penulisan dan penyampaian terima kasih penulis kepada semua pihak. Penulis berharap semoga tulisan singkat dan sederhana ini ada manfaatnya bagi sidang pembaca pada umumnya dan khususnya generasi muda penerus perjuangan bangsa Indonesia ini dapat memetik pelajaran daripadanya.

BAB I. MASA KECIL DAN MASA SEKOLAH

A. BLORA TEMPAT KELAHIRANNYA

Kabupaten Blora melahirkan salah seorang Tokoh Nasional DR. Sutarjo Kartohadikusumo yang namanya menjadi lebih terkenal karena pernah mengajukan petisi pada sidang **Volksraad** (Dewan Rakyat) Hindia Belanda tahun 1936. Karena Sutarjo yang berinisiatif dan pertama-tama menandatangani petisi ini maka disebut **Petisi Sutarjo**. Sebelum membicarakan lebih lanjut siapakah Sutarjo itu, perlu kiranya diketahui sedikit tentang Blora dan sekitarnya tempat kelahiran tokoh nasional ini.

Kota Blora yang terletak diketinggian antara 30 sampai 250 meter dari permukaan laut itu mempunyai legenda asal-usul nama kota itu. Pada suatu ketika Bupati Tuban (Jawa Timur) Pangeran Surabaya (Pangeran Sedah) meninggalkan kabupaten Tuban karena malu tidak dapat memenuhi kewajiban membayar pajak kabupaten ini. Ia menuju ke Surakarta tetapi dalam perjalanan jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pangeran Sedah mempunyai putra yang diberi nama R. Sudito, yang terkenal pula sebagai R. Jayadiwirya. Ketika berusia belasan tahun, R. Sudito berusaha mencari ayahnya yang telah lama meninggalkan Tuban. Usahanya ini tidak sia-sia, berhasil menemukan ayahnya tetapi telah meninggal dunia. Hatinya sedih dan kecewa. Untuk menebus kekecewaannya ia bertapa. Suatu ketika ia bertemu dengan seorang guru/wiku bernama Mbah Lora. Sudito akhirnya diangkat menjadi salah seorang siswanya. Sambil berguru Sudito membuka hutan yang terletak dekat makam ayahnya untuk pemukiman baru, yang kemudian menjadi terkenal. Sunan Surakarta yang mendengar berita itu, justru memerintahkan agar Sudito memperluas dan ia diangkat menjadi Bupati pertama daerah pemukiman baru itu. Untuk menghormati Mbah Lora gurunya itu, daerah atau kota baru itu diberi nama Blora, yang berasal dari kata **Mbah Lora**. Nama ini sampai sekarang masih digunakan terus. 1) Sekarang makam Pangeran Sedah itu terletak di pojok selatan alun-alun kota Blora. Oleh masyarakat setempat dikenal sebagai makam Pangeran Pojok atau **Mbah Pojok**.

Sekitar tahun 1760 kabupaten Blora pernah diperintah dua bupati yang masih bersaudara kandung. Blora barat diperintah oleh Raden Tumenggung Wilotikto, Blora timur oleh Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto. Oleh ayahnya, Wilotikto ditugaskan menjadi Bupati Pati. Kemudian tahun 1762 Blora dipersatukan lagi oleh Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto, yang memerintah sampai tahun 1782. Kini makamnya terletak di sebelah barat

kota Blora. Sejak masa pemerintahan Tirtonoto sampai tahun 1982 Blora diperintah oleh 24 Bupati. 2) Pada tahun 1982 ini yang menjadi Bupati Blora ialah Sumarno SH. Sedangkan Ketua DPR dijabat Katiman dan Sekwilda dijabat Drs. Margono.

Demikianlah sekelumit legenda asal-usul nama kota Blora. Selanjutnya marilah kita tinjau sejenak tentang Kabupaten Blora yang melahirkan Tokoh Nasional Sutarjo Kartohadikusumo, pencetus Petisi Sutarjo tahun 1936 ini.

Tiap-tiap kota atau daerah mempunyai kebanggaan sendiri-sendiri. Ada yang bangga karena memiliki : hasil industri yang khas, jenis makanan yang spesifik, tempat perjuangan, lembaga pendidikan, tempat pariwisata, pahlawan atau tokoh nasional yang lahir di kota-kota atau daerahnya, dan lain-lain. Demikianlah kota Blora, salah satu kota kabupaten di karesidenan Pati, propinsi Jawa Tengah juga memiliki kebanggaan tersendiri. Selain terkenal "Sate Bloranya", juga penghasil kayu jati, tempat penambangan minyak tanah beserta **AKAMIGAS** (Akademi Minyak dan Gas Bumi) yang hanya satu-satunya di Indonesia, juga memiliki salah seorang Tokoh Nasional yang dilahirkan di daerah ini. Tokoh Nasional itu ialah "Sutarjo Kartohadikusumo", yang dilahirkan di desa Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, pada tanggal 22 Oktober 1892. Pada waktu perjuangan menghadapi penjajahan Belanda, Sutarjo menjadi terkenal karena mengajukan Petisi pada sidang **Volksraad** (Dewan Rakyat). Oleh karena yang mula-mula berinisiatif dan menandatangani petisi tersebut adalah Sutarjo, maka dikenal sebagai **Petisi Sutarjo** .

Pada tanggal 15 Juli 1936, Sutarjo wakil dari **PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra)** atau Perhimpunan Pamong Praja Bumiputra, yang duduk sebagai anggota **Volksraad** mengajukan usul tentang kedudukan Indonesia di masa depan dalam kerjasama dengan Negeri Belanda. Secara garis besar isi usul itu adalah sebagai berikut : Pengusul mohon agar **Volksraad** suka mendesak Pemerintah Tertinggi dan Staten General untuk mengadakan konferensi yang akan dihadiri oleh wakil-wakil Kerajaan Negeri Belanda dan wakil-wakil Indonesia untuk membuat rencana persiapan kemerdekaan Indonesia dalam waktu 10 tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh konferensi. 3) Selain Sutarjo, usul ini juga ditandatangani oleh Muhammad Husni Thamrin, Kasimo, Dr. Ratulangi, Datuk Tumenggung, Kwo Kwat Tiong dan Alatas. Petisi ini tidak radikal, hal ini menunjukkan keinginan untuk mengadakan kerjasama yang baik antara Negeri Belanda dan Indonesia dalam menetapkan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka. Walaupun dalam sidang **Volksraad** usul ini diterima, tetapi setelah diajukan kepada Pemerintah Tertinggi dan **Staten General** di Negeri Belanda pada tanggal 16 Nopember 1938, datang keputusan yang isinya menyatakan ratu Belanda

menolak petisi tersebut. Penolakan ini menimbulkan kekecewaan kaum nasionalis Indonesia, tetapi mereka tidak berputus asa dalam perjuangan selanjutnya, justru lebih meningkatkannya untuk memperoleh kemerdekaan. Akhirnya kira-kira 10 tahun kemudian sejak diajukannya petisi tersebut, tercapailah kemerdekaan yang dicita-citakan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian baru sepuluh tahun kemudian, cita-cita Sutarjo yang evolusioner itu tercapai secara revolusioner. Tempat kelahiran Tokoh Nasional Sutarjo Kartohadikusumo pencetus petisi ini ialah Blora.

Blora, adalah ibukota kabupaten Daerah Tingkat II, yang terletak di ujung timur Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini termasuk dalam wilayah ex karesidenan Pati.

Batas-batas kabupaten Blora, sebelah barat kabupaten Purwodadi, sebelah utara kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) dan sebelah selatan kabupaten Ngawi (Jawa Timur). Dati (Daerah Tingkat) II kabupaten Blora, dibagi dalam 14 kecamatan, terdiri dari 295 desa. 4) Ke empat belas kecamatan itu ialah kecamatan kota Blora, Banjarejo, Jepon, semuanya termasuk wilayah ex kawedanan Karangjati. Kecamatan Cepu, Sambong, Kedungtuban, termasuk ex kawedanan Cepu. Kecamatan Randublatung, Menden dan Doplang termasuk ex kawedanan Randublatung dan kecamatan Ngawen, Kunduran, Todanan, Tunjungan, merupakan wilayah ex kawedanan Ngawen. Di sebelah utara daerah kabupaten Blora, terdapat pegunungan Kapur Utara, sedangkan di bagian selatan terdapat pegunungan Kapur Selatan. Ada dua sungai besar yang melalui daerah kabupaten ini yaitu sungai Lusi di sebelah barat dan Bengawan Solo di sebelah timur. Selain ladang minyak yang terdapat di kecamatan Cepu, kedua sungai ini menjadi tumpuan harapan rakyat untuk memperoleh kemakmuran dari pemanfaatan air kedua sungai ini. Luas daerah kabupaten Blora ada 262.347,954 Ha, terdiri dari tanah sawah 18,81%, tanah kering 21,55%, tanah perkebunan 0,00% dan tanah lainnya 30,47%. 5) Sampai dengan tahun 1974, jumlah penduduk kabupaten Blora 639.991 orang, terdiri dari WNI (Warga Negara Indonesia) 639.582 orang, WNA 409 orang, hanya terdiri dari orang-orang Cina, Orang-orang India, Arab, Pakistan, dan lain-lain tidak terdapat di daerah ini. Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk kabupaten Blora, laki-laki 307.153 orang dan perempuan 332.838 orang. Dari jumlah ini dapat diperinci lagi, anak-anak 246.775 orang dan dewasa 393.216 orang. 6) Sedangkan berdasarkan sensus penduduk tahun 1980 jumlah penduduk kabupaten Blora ini sebanyak 696.456 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata tiap kilometer persegi 383 jiwa. 7) Hasil pertanian dari kabupaten ini yang utama padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan peternakan yang berkembang di sini

ialah sapi, kerbau, kambing, kuda, domba, babi, ayam dan itik. Perusahaan industri yang ada di sini antara lain industri makanan dan minuman, tekstil dan pertenunan, tembakau, kayu dan lain-lain.

Mengenai perkembangan pendidikan, dapat dilihat dari jumlah sekolah yang ada di daerah kabupaten ini. Sampai dengan tahun 1974, jumlah SD (Sekolah Dasar) ada 371 buah, SMP 21 buah, SMEP 6 buah, SKKP 3 buah, ST 5 buah, SMA 4 buah, SMEA 6 buah, SKKA 1 buah, STM 3 buah dan SPG 1 buah. 8) Perkembangan pelayanan kesehatan masyarakat, dapat dilihat pula dari jumlah tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang ada. Sampai tahun 1974 terdapat tiga buah Rumah Sakit Umum, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) 11 buah, Balai Pengobatan ada 25 buah, BKIA (Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak) 18 buah, tenaga Dokter 6 orang, Dokter Gigi seorang, Bidan 18 orang, sedangkan Apoteker hanya ada seorang. 9)

Berhasilnya pembangunan Sekolah Dasar Inpres (Instruksi Presiden), menyebabkan meningkatnya jumlah lulusan SD. Untuk menampung lulusan tersebut, diperlukan peningkatan pembangunan SMP. Dalam tahun anggaran 1982/1983 dibangun 1000 buah SMP baru. Untuk realisasi maksud ini, Daerah Tingkat II Blora mendapatkan Alokasi 6 SMP Unit Baru, meliputi kecamatan Menden, Kedungmundu, Sambong, Jiken, Banjarejo dan Todanan. Di samping itu di Blora juga akan dibangun Sekolah Tehnik Menengah Pembangunan yang dapat menampung 1150 siswa, meliputi 5 jurusan yaitu jurusan Bangunan, Mesin, Listrik, Elektro dan Automotif. Pembangunan Sekolah ini direncanakan selesai dalam tahun anggaran 1984/1985. 10)

Di antara empat belas kecamatan di Kabupaten Blora yang cukup terkenal ialah kecamatan Cepu. Letaknya di ujung timur propinsi Jawa Tengah. Sejak dahulu sampai sekarang Cepu telah dikenal baik oleh masyarakat Jawa Tengah maupun Indonesia.

Pada abad ke-16 daerah Cepu dikuasai oleh Arya Penangsang, yang dikenal juga sebagai Arya Jipang, yang berkuasa di Kadipaten Panolang (termasuk daerah Cepu). Sampai sekarang sisa-sisa peninggalan Arya Penangsang ini masih banyak ditemukan di daerah kabupaten Blora dalam keadaan kurang terawat.

Mengenai asal-usul nama Cepu, ada legenda yang masih hidup sampai sekarang. Dalam legenda itu diceriterakan bahwa pada awalnya terjadi peperangan antara dua orang Adipati yaitu Adipati Tejo Bandoro dari Tuban melawan Adipati Jati Kusumo dari Bojonegoro. Dalam pertempuran itu Adipati Jati Kusumo mengalami kekalahan, akibatnya semua harta

kekayaannya termasuk putri-putrinya diboyong oleh Tejo Bendoro sebagai barang sitaan dan jarahan. Di antaranya adalah putri Jati Kusumo yang bernama Dewi Retnosari, yang cantik rupawan. Tetapi Retnosari tidak mau dipersunting oleh Adipati Tuban Tejo Bandoro, kemudian melarikan diri sampai disebut desa ditepi bengawan Solo. Di sini ia bersembunyi sambil beristirahat. Setelah persembunyiannya itu diketahui Tejo Bandoro, Dewi Retnosari berusaha meloloskan diri. Menghadapi Retnosari enggan menyerah ini, Adipati menjadi penasaran. Segera ia membidikkan pusakanya berupa **cempuling** (tombak kecil), tepat **nancep ing pupu** (bahasa Jawa, berarti menancap di paha) sang putri. Dari kata nancep ing pupu itulah kemudian desa tempat persembunyiannya Dewi Retnosari itu disebut **Cepu**. 11) Demikianlah sekilas tentang asal-usul nama kota Cepu.

Tahun 1890 Adrian Stop (orang Belanda), menemukan tambang minyak tanah di Kruka, kemudian dibangunlah pabrik pengilangan minyak di Wonokromo, Surabaya. Pada tahun 1894 pengilangan itu diperluas dengan mendirikan instalasi pengilangan di Cepu. 12) Minyak mentah yang diolah di sini terutama dari sumur-sumur minyak di Kawengan (Tuban, Jawa Timur), lebih kurang 18 km dari Cepu. Hasil yang diperoleh berupa bensin untuk motor dan HSD [**High Speed Diesel**] yaitu zat pembakar untuk motor diesel, minyak tanah, parafin, aspal, dan lain-lain. Perusahaan minyak tanah di sini pada zaman Belanda dikerjakan oleh BPM (**Bataafsche Petroleum Matchappij**). Pada waktu Perang Dunia kedua perusahaan ini terhenti dan baru diaktifkan kembali tahun 1949. Daerah di kabupaten Blora yang mengandung minyak yang diusahakan penambangannya ialah di kecamatan Sambong, Jiken, Randublatung dan Ngawen. Sekarang usaha pengolahan minyak tanah di Cepu ini dilola oleh Departemen Pertambangan. Untuk mendidik tenaga-tenaga akademi dibidang perminyakan, di Cepu diselenggarakan **AKAMIGAS** (Akademi Minyak dan Gas Bumi), merupakan satu-satunya akademi dibidang perminyakan yang ada di Indonesia.

Luas kecamatan Cepu meliputi 4.930 hektar, jumlah penduduk 65.974 orang, tersebar di empat belas buah desa. Sedangkan kota Cepu luasnya 246,555 hektar dengan jumlah penduduk 17.640 orang. Kepadatan penduduk dalam kota dirasakan cukup tinggi. Di kota ini terdapat delapan buah SMTA (Sekolah Menengah Tingkat Atas) dua di antaranya berstatus negeri. SMTP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) ada 12 buah, termasuk empat buah SMP Negeri dan sebuah Sekolah Tehnik Negeri. SD berjumlah 46 buah dan Taman Kanak-Kanak 11 buah. Kota kecil yang padat penduduknya ini memiliki tiga buah Rumah Sakit dan sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat. 13)

Tanah di kabupaten Blora mengandung kapur. Di sini hutan jati dapat tumbuh subur. Daerah hutan jati membujur di tiga tempat yaitu di bagian selatan berupa pegunungan Kendeng, bagian tengah dan utara berupa pegunungan Gamping. Untuk mengurus hasil hutan jati di daerah ini ditangani oleh **PERHUTANI** (Perusahaan Hutan Indonesia) yang berpusat di Blora, Cepu, Randublatung dan Mantingan. Luas hutan jati di daerah Randublatung meliputi areal 30.330,85 hektar, sedangkan hutan rimba meliputi areal seluas 327.39 hektar. 14) Hasil yang diperoleh dari hutan jati ini terutama kayu jati, untuk bahan bangunan dan industri perabot rumah tangga, juga menghasilkan kayu bakar, arang, dan lain-lain.

Di daerah kabupaten Blora sebagian masyarakat yang terkenal dengan sebutan orang Samin. Nama Samin ini berasal dari salah seorang penduduk yang bernama **Samin Surosentiko**. Samin Surosentiko terkenal dengan paham atau keyakinannya yang **lugu**, zakelijk dan tidak mau dipengaruhi oleh orang atau paham lain. Oleh karena itu penganut Samin Surosentiko ini disebut **Masyarakat Samin**. Landasan paham mereka ialah **Hukum Karma**. Mereka berkeyakinan bahwa orang yang **menanam padi, tumbuh padi dan akan memetik padi** (**Nandur pari, thukul pari, ngunduh pari**, bahasa Jawa). Perbuatan yang baik atau buruk tentu akan kelihatan akibatnya. (**Becik ketitik, ala ketara**, bahasa Jawa). Hukum karma tidak pernah dan tidak akan berlaku sebaliknya. Misalnya : **Menanam padi, tumbuh jagung, dan memetik buah rawe**. (**Nandur pari, thukul jagung, ngunduh rawe**). Rawe adalah sejenis tumbuhan pada bagian kulit buah berbulu, yang gatal sekali bila tersentuh kulit. Pada dasarnya ada dua macam masyarakat Samin, yaitu **Samin Lugu** dan **Samin Sangkak**. Pengikut Samin Lugu, bersikap sabar, tidak gentar, pendiam, dan tidak senang membalas dendam, walaupun terhadap lawannya. Mereka ini penuh tenggang rasa. Pengikut aliran ini sering disebut sebagai **Jomblo Ito**, artinya walaupun secara lahiriah tampak bodoh, tidak mengerti, tetapi mempunyai kesucian dan kemurnian batin. Sedangkan Samin Sangkak, pengikutnya pemberani, kalau mendapat serangan lawan berusaha menangkis, melindungi diri. Menghadapi mereka ini sukar sekali, mereka banyak membantah yang kurang masuk akal. Tetapi bila kita telah dipercaya, jangan sekali-kali diselewengkan. Sekali kita berjanji, harus ditepati. Pengikut kedua aliran ini perasaannya halus, mereka tidak akan melawan bila tidak mendapat serangan. Pada zaman Belanda, mereka ini tidak mau ditarik pajak. Alasannya, mereka hidup di daerah sendiri, maka tidak mau membayar pajak. Tetapi apabila diminta sebagai pemberian, mereka merasa lebih senang daripada sebagai sewaan.

Bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Jawa Lugu (**Jawa Dwipa**), bahasa Jawa yang bersahaja. Solidaritas, gotong royong, musyawarah, serta sendi-sendi demokrasi berkembang subur dikalangan masyarakat Samin. Pengikut semua agama tidak diganggunya. Orang-orang Samin ini berusaha memenuhi kebutuhannya dengan swasembada, baik bahan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.

Oleh karena pemerintah Belanda memandang paham Samin ini berbahaya, di samping itu mereka tidak mau membayar pajak dan dikhawatirkan berkembang ke politik pemerintahan serta pengaruhnya makin bertambah luas, maka pemimpin-pemimpin paham Samin ini ditangkapi. Samin Surosentiko, yang dipandang sebagai Ratu Adil dari kelompok ini, dibuang ke Bengkulu. Akibatnya paham dan pengikut-pengikutnya terpecah belah. 15) Pengikut paham Samin ini yang terbanyak bertempat tinggal di daerah kawedanan Randublatung, terutama di desa Bapangan. Dalam masa pembangunan dewasa ini, mereka ini telah diserapi arus modernisasi dan banyak di antara mereka yang mau keluar daerahnya untuk bersekolah.

Demikianlah keadaan kabupaten Blora, tempat kelahiran Sutarjo Kartohadikusumo, Tokoh Nasional yang menentang penjajahan secara evolusioner. Tempat kelahirannya ialah desa Kunduran, kecamatan Kunduran termasuk wilayah *ex* kawedanan Ngawen. Desa ini terletak di sebelah Barat Daya kota Blora, dilalui jalan raya dan jalan kereta api dari Blora ke Purwodadi. Dalam rangka program listrik masuk desa, mulai bulan Mei 1982, desa ini telah kebagian jatah listrik masuk desa, sehingga tingkat kesejahteraan penduduknya bertambah baik. Dengan adanya listrik masuk desa, diharapkan desa ini menjadi maju.

B. KETURUNAN PAMONG PRAJA.

Sutarjo Kartohadikusumo, yang sejak sekolah maupun dalam kariernya lebih banyak berkecimpung di lingkungan kepamongprajaan, politik atau pemerintahan, ternyata memiliki darah pamong praja yang diturunkan oleh kedua orang tuanya maupun nenek moyangnya.

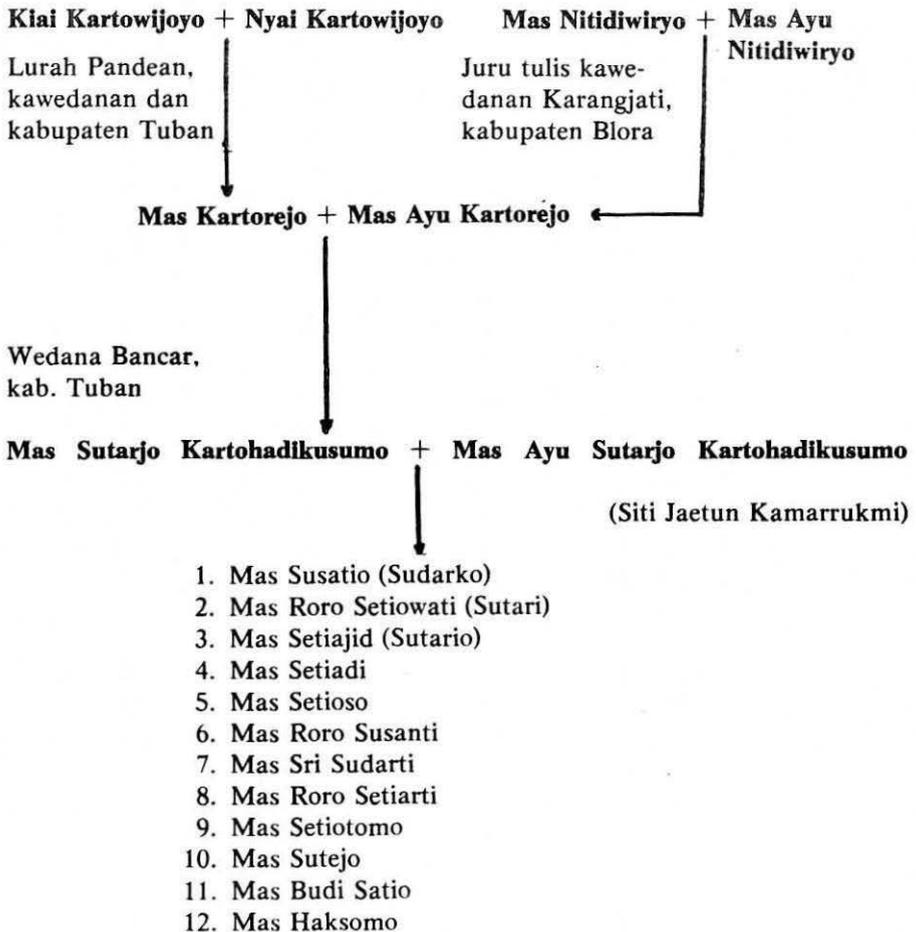
Ayah Sutarjo, Mas Kartorejo adalah Wedana Bancar, kabupaten Tuban, Jawa Timur. (Wafat pada tanggal 18 Oktober 1904 dalam usia 71 tahun). Kakeknya dari pihak ayah ini, Kiai Kartowijoyo menjabat sebagai Lurah (Kepala Desa) Pandean, terletak di kawedanan dan kabupaten Tuban.

Sedangkan ibunya Mas Ayu Kartorejo (wafat tanggal 4 Agustus 1915), juga keturunan pamong praja. Kakek Sutarjo dari pihak ibu ini ialah Mas Nitidiwiry, bekerja sebagai Jurutulis kewedanaan Karangjati, kabupaten Blora. 16) Kedua kakek nenek Sutarjo ini, bila ditarik garis ke atas dari silsilah yang telah berlangsung dari abad ke abad, juga keturunan dari keluarga pamong praja. Garis ibu berasal dari keluarga yang memegang pemerintahan di Banten. Sedangkan garis ayah keturunan yang memerintah di Madura. Kedua-duanya diasingkan ke Jawa Timur, karena ingin tetap memerintah rakyatnya sendiri bebas dari kekuasaan asing. 17) Jadi pihak ayahnya adalah keturunan bangsawan dari Madura, sedangkan ibu keturunan bangsawan Banten. Semula Kartorejo sebagai Wedana Ngawen, kabupaten Blora, kemudian menjadi Wedana Bancar, Tuban. Dalam perkawinannya dengan Mas Ayu Kartorejo, melahirkan 7 orang anak dan Sutarjo adalah anak yang ke 5. Kapan sebenarnya Sutarjo dilahirkan ? Dalam berbagai penulisan ada beberapa versi tentang angka tahun kelahiran Sutarjo. Ada yang menyebutkan tanggal 22 Oktober 1890, 22 Oktober 1892, ada pula yang menyebutkan tanggal 20 Oktober 1888. 18) Memang menurut Sutarjo sendiri usianya dimudakan dua tahun dari usia yang sesungguhnya. Hal ini karena sewaktu masuk ELS (**Europeesche Lagere School**) atau Sekolah Dasar Belanda, telah berusia 8 tahun. Ia ditolak karena terlalu tua dua tahun. Agar bisa diterima, maka usianya dikurangi. Pengurangan itu berlangsung terus pada raport, kartu penduduk, kartu pegawai, dan seterusnya. Menurut Sutarjo hal ini tidak banyak yang mengetahuinya. 19) Jadi sebenarnya tahun kelahirannya ialah 22 Oktober 1890, tetapi kemudian diubah menjadi 22 Oktober 1892. Sedangkan hari dan tempat kelahirannya ialah Jum'at Paing di desa Kunduran, kecamatan Kunduran, ex kawedanan Ngawen, kabupaten Blora.

Pada tanggal 1 Mei 1914, Sutarjo melangsungkan perkawinannya dengan Siti Jaetun Kamarrukmi, putri Mas Prawirodirjo, Wedana Kranggan, kabupaten Rembang. Dari perkawinan ini melahirkan dua belas orang anak, ialah Susatio, Satiowati, Setiajid, Setiadi, Setioso, Susanti, Sudarti, Setiarti, Setiotomo, Sutejo, Budisatio dan Haksomo. Khusus mengenai keluarga Sutarjo ini akan dibahas lebih lanjut di bagian lain.

Walaupun Sutarjo memiliki darah Banten dan Madura, namun bahasa, dan adat-istiadat yang digunakan adalah dari Jawa. Ini karena ia lahir dan dibesarkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena ia berasal dari keluarga pamong praja, sudah barang tentu adat istiadat Jawa maupun **Kejawen** banyak diperolehnya. Selanjutnya adat inipun ditanamkan kepada putra-putranya semua.

Agar lebih jelas, perlu kiranya di sini di cantumkan secara garis besar silsilah asal-usul beliau.



Kedua belas putra Sutarjo itu adalah dari perkawinannya dengan istri pertama Siti Jaetun Kamarrukmi, yang ini wafat tanggal 26 Agustus 1947. Kemudian Sutarjo kawin lagi dengan Mas Ayu Siti Suratkabirun, yang wafat pada tanggal 18 Agustus 1958. Selanjutnya Sutarjo kawin lagi dengan (Gusti Bendoro Raden Ayu Kus Subandinah). Dari istri kedua dan ketiga ini tidak dikaruniai anak. Sehingga seluruh putra-putri Sutarjo hanya dari istri yang pertama saja.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Ketika ayah Sutarjo pindah dari Blora ke Tuban, sudah barang tentu semua anak-anaknya mengikutinya, tak ketinggalan juga Sutarjo. Di Tuban, Kartorejo ayah Sutarjo ini menjabat sebagai Wedana Bancar. Setelah cukup usianya, Sutarjo masuk ke ELS [*Europeesche Lager School*] yaitu semacam Sekolah Dasar yang khusus diperuntukkan anak-anak Belanda, namun kemudian anak-anak Indonesia (Pribumi) juga diperkenankan masuk sekolah ini dengan persyaratan tertentu. Syarat itu antara lain harus anak para pembesar, bangsawan, dan lain-lain. Walaupun Sutarjo anak seorang Wedana dan keturunan bangsawan, namun harus ada ijin pula dari pemerintah Belanda. Ijin itu harus diajukan kepada Residen dan Residen memberikan ijinnya dengan mengeluarkan (Surat Keputusan) khusus untuk itu. 20)

Walaupun demikian masih ada satu rintangan lagi yang dihadapi waktu mau masuk ELS. Ketika itu usianya mencapai 8 tahun, padahal syarat masuk harus berusia 6 tahun, jadi kelebihan dua tahun. Oleh karena itu iapun ditolak waktu memasuki sekolah ini. Setelah dimudakan dua tahun, barulah Sutarjo diterima menjadi pelajar ELS. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Sutarjo, bisa menikmati belajar di sekolah yang sebenarnya khusus buat anak-anak Belanda. Anak-anak Pribumi sedikit sekali yang menikmati masa sekolah seperti Sutarjo. Pendidikan ini diikuti secara lancar dan pada tahun 1906 Sutarjo tamat dari Sekolah ini.

Setelah selesai mengikuti pendidikan di ELS, Sutarjo melanjutkan ke **OSVIA** [*Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren*] di Magelang. Sekolah ini khusus untuk mendidik Pamong Praja Bumiputra. Demikianlah Sutarjo, bersama tiga temannya menuju ke Magelang bersekolah di **OSVIA** ini. Sebelum diterima, Sutarjo bersama teman-temannya tadi menghadap Direktur **OSVIA**, kemudian dipersilahkan masuk ke ruang Direktur. Di sini ada sesuatu yang membikin kaget hati Sutarjo. Jiwa mudanya bangkit mau memberontak perlakuan yang dianggap tidak wajar. Direktur dan semua guru yang ada di situ duduk di kursi, sedangkan Sutarjo bersama teman-temannya harus duduk di lantai, harus bersila (duduk di lantai dengan kaki dilipat di depan). Secara spontan Sutarjo angkat bicara menentang aturan yang dianggap tidak adil ini. Katanya : **Kalau tuan-tuan Belanda duduk di kursi, kami juga harus duduk di kursi.** Pemberontakannya itu berhasil, akhirnya aturan pincang ini dihapuskan. 21)

OSVIA yang ada di Magelang ini baru untuk pertama kalinya dibuka tahun 1900. Pembukaan sekolah pamongpraja ini karena sekolah-sekolah **Menak** yaitu sekolah-sekolah untuk anak-anak bangsawan yang dididik menjadi pamongpraja Bumiputra, dipandang tidak diperlukan lagi. Pada zaman

penjajahan Belanda Sekolah Menak dibuka di Bandung, Magelang, Probolinggo dan Menado. Selanjutnya pada tahun 1900 Sekolah Menak yang ada di Magelang diubah menjadi OSVIA. Sekolah ini setingkat dengan sekolah lanjutan. 22) Lama pendidikan di sekolah ini 6 tahun, yaitu tiga tahun untuk mencapai pendidikan yang sederajat MULO [*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*] atau Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan tiga tahun lagi untuk mendalami pendidikan OSVIA. Dalam perkembangan selanjutnya OSVIA kemudian berubah menjadi MOSVIA (*Middelbare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren*), yang memberikan pengajaran untuk jabatan-jabatan BB [*Binnenlandsch Bestuur*] atau Pamong Praja. Sedangkan untuk pegawai-pegawai BB yang sudah punya masa kerja atau sudah tua, di dirikan *Bestuur School*. Yang paling akhir di dirikan oleh pemerintah Hindia Belanda ialah *Bestuurs Academie*. 23) Pada waktu menjadi siswa OSVIA di Magelang, Sutarjo juga ikut aktif dalam lapangan politik. Ketika ia masih remaja berusia sekitar 17 tahun, telah berani terjun ke lapangan politik. Pada tahun 1909 Sutarjo menjabat sebagai Ketua Budi Utomo cabang Magelang. Pada waktu itu yang menjadi ketua organisasi ini ialah RAA Reksokusumo, Bupati Karanganyar. Sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari seluruh Pamong Praja dari pangkat Bupati sampai Jurutulis dan pegawai-pegawai dari jawatan-jawatan pusat di Magelang. Rupanya kedudukan Sutarjo sebagai politikus muda itu malahan mendapat kecaman hebat dari Ketua Pengurus Besar (*Hoofdbestuur*) yang dijabat oleh Bupati Karanganyar itu. Beliau tidak senang terhadap Sutarjo yang masih muda dan masih duduk dibangku sekolah itu, tetapi sudah berani bergerak dalam politik praktis. Hal ini pernah dikisahkan kembali oleh Sutarjo dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional tahun 1976. 24) Jabatan sebagai Ketua Budi Utomo Cabang Magelang ini berlangsung sejak tahun 1909 - 1911. Lebih kurang 6 tahun lamanya Sutarjo menekuni pendidikan di OSVIA ini. Tahun 1911 beliau tamat sekolah ini dengan hasil ujian terakhir yang gemilang 25). Jiwa pemberani dan nasionalismenya cukup besar, namun ia tetap waspada sebagai seorang pamong praja. Hal ini tampak dari sikapnya dalam menghadapi penguasa Belanda. Misalnya pada waktu diadakan suatu pertemuan di Magelang. Dalam pertemuan ini dinyanyikan lagu Indonesia Raya.

Secara tegas dan spontan ia berdiri menghormati lagu kebangsaan ini. Ternyata hanya dia satu-satunya diantara hadirin yang berdiri. 26) Selepas dari OSVIA, Sutarjo magang sebagai calon pegawai selama tiga bulan di kecamatan Kunduran, kabupaten Blora. Selama magang ini, ia benar-benar mengabdikan diri tanpa menerima gaji. 27) Setelah dipandang cakap, barulah diangkat menjadi *Hulpschrijver* (Pembantu Jurutulis) pada tahun 1911. Setelah beberapa bulan melaksanakan tugas kariernya mulai

menanjak, ia diangkat menjadi Jurutulis Jaksa pada tahun itu juga. Pada tahun inipun ia diangkat menjadi Mantri Kabupaten di Blora. Kariernya yang cepat naik ini menunjukkan bahwa prestasinya juga baik. Dua tahun kemudian, ia diangkat menjadi Asisten Wedana (1913). Kemudian menjadi Adjunct Jaksa (1915) dan kemudian menjadi Jaksa (1915 - 1919).

Pada tahun 1919 Sutarjo memperoleh kesempatan meneruskan studinya di Bestuurschool di Jakarta. Sekolah ini setingkat dengan akademi, lama pendidikan dua tahun. Sekolah ini dulu menempati gedung yang sekarang menjadi Gedung Joang di Jalan Abdul Rahman Saleh Jakarta. Tidak semua orang bisa bersekolah di **Bestuurschool** ini. Calon siswa harus memenuhi persyaratan tertentu, harus sudah mempunyai masa kerja dalam pemerintahan. "Mereka ini dipilih dari para Wedana atau jabatan yang sederajat, yang kelak mungkin dapat menjadi Bupati. Di Indonesia sekolah semacam ini hanya ada sebuah yang ada di Jakarta ini" 28) . Selama belajar di Jakarta, Sutarjo sempat meluangkan waktu memimpin Redaksi Kalawarta **Oud OSVIA** sejak tahun 1919 sampai 1921, majalah berkala untuk konsumsi alumni **OSVIA**. Di samping kegiatan menangani kalawarta ini, Sutarjo juga melanjutkan pengabdianya sebagai Ketua Muda Pengurus Besar **Oud OSVIANEN BOND** (Perhimpunan Pegawai Pamong Praja yang memiliki ijazah **OSVIA**). Ia memiliki andil ikut mendirikan organisasi ini. Jabatannya sebagai Ketua Muda organisasi ini dijalannya selama lima tahun (1916 - 1921). Oleh karena Sutarjo memiliki kemampuan yang baik, maka studinya di **Bestuurschool** dapat diselesaikan menurut jangka waktu yang telah ditentukan. Tahun 1921 ia lulus dari sekolah ini. Selanjutnya pada tahun itu juga ia ditarik lagi sebagai Pamong Praja, menjabat Asisten Wedana di Sambong, kabupaten Blora. Namun jabatan itu hanya sebentar saja dijabatnya dan pada tahun 1921 itu juga Sutarjo diangkat menjadi Wedana di Papar, kabupaten Kediri. Jabatan ini dipangkunya sampai tahun 1924.

Demikianlah secara singkat riwayat pendidikan Sutarjo Kartohadikusumo, yang dimulai sejak **ELS** Tuban, **OSVIA** Magelang dan terakhir **Bestuurschool** di Jakarta.

D. MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA

Setelah menyelesaikan pendidikan di **OSVIA** Magelang tahun 1911, Sutarjo mengabdikan diri pada pemerintah. Sutarjo yang memiliki dasar pendidikan yang cukup, serta cakap, berdisiplin dan berprestasi dalam tugasnya, mempercepat menanjaknya pangkat, jabatan dan kariernya. Tahun 1911 ia magang, selanjutnya tahun 1913 telah berhasil menjadi Asisten Wedana (Camat). Ketika itu usianya belum lebih dari 23 tahun, telah sukses dalam kariernya. Pendidikan cukup, pangkat dan jabatan

memadai, masih muda usia, berwibawa dan pengalamannya yang luas, simpatik dan cerdas pikirannya, berdisiplin dan tegas tindakannya, semuanya ini menambah wibawa pribadinya yang menarik. Walaupun demikian rupanya ada sesuatu yang dirasa belum lengkap dalam hidup dan kehidupannya. Karena kesibukannya yang padat itu menyebabkan ia dapat agak lama bertahan hidup membujang. Demikianlah setelah dirasa segala sesuatunya telah siap, mulai dirintislah menuju ke arah hidup baru, bertekad mengakhiri masa bujangnya. Pilihannya jatuh pada gadis pantai yang sedang berkembang. Gadis ini baru berusia 14 tahun, ibarat bunga yang sedang mulai berkembang, tidak terlalu muda buat Sutarjo pada saat itu. Walaupun kalau ditinjau dari program Keluarga Berencana dan Undang-Undang Perkawinan dewasa ini, usia 14 tahun itu belum boleh melaksanakan perkawinan. Namun usia 14 tahun pada masa itu telah termasuk usia ideal dalam perkawinan. Gadis idaman ini bernama Siti Jaetun Kamarrukmi, suatu nama yang cukup manis. Ia dilahirkan di Baureno, termasuk kabupaten Bojonegoro, pada hari Rabu Paing tanggal 29 Juni 1900. Adalah putri Mas Prawirorejo, Wedana Krangan Kabupaten Rembang. Kamarrukmi adalah kembangnya kota Kragan dipantai utara Jawa. Kota kecil ini pada tahun 1942 menjadi sasaran pendaratan serdadu Jepang yang mau menggantikan penjajahan Belanda. Rupanya tidak salah Sutarjo memetik kembang pantai utara ini. Ternyata dikelak kemudian hari gadis ini sangat setia dalam menemani Sutarjo dalam suka dukanya perjuangan mencapai kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia. Setelah lamarannya diterima, dilaksanakanlah perkawinan agung itu pada tanggal 1 Mei 1914, lengkap dengan segala upacara kebesaran adat Jawa yang bercorak kebangsawanan. Kini lengkaplah sudah bagi Sutarjo dalam melaksanakan kewajibannya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Masa bulan madunya dinikmati tanpa melalaikan tugasnya sebagai pamongpraja yang baik, sehingga jenjang karier, kepangkatan dan jabatannya menyertai keberuntungannya. Setahun sesudah perkawinannya, ia diangkat menjadi Adjunct Jaksa dan pada tahun 1915 itu juga, naik lagi menjadi Jaksa. Tahun demi tahun dilaluilah hidup dan kehidupan suami istri yang berbahagia ini Sutarjo kemudian memakai nama tua Mas Sutarjo Kartohadikusumo, sedangkan Siti Jaetun Kamarrukmi menjadi Mas Ayu Sutarjo. Rasa syukur dan bahagia ini bertambah lagi setelah sepuluh bulan lebih sepuluh hari, lahirlah puteranya yang pertama laki-laki diberi nama Mas Susatio, yang kemudian bernama Sudarko. Putera pertama ini dilahirkan di desa Bogorejo, kabupaten Blora pada hari Sabtu Legi tanggal 10 Maret 1915. Kira-kira sembilan belas bulan kemudian, lahir anak yang kedua,

seorang putri diberi nama Mas Roro Setiowati atau Sutari. Anak ini dilahirkan di Lasem, pada hari Jum'at Legi, tanggal 13 Oktober 1916. Pada waktu bertugas belajar di **Bestuurschool** Jakarta, sang istri ikut mendampingi dalam tugas ini. Pada waktu tinggal di Jakarta ini lahir anak yang ketiga laki-laki, pada hari Jum'at Wage tanggal 26 September 1919, diberi nama Mas Setiajid alias Sutario. Setelah selesai studi di Jakarta, Sutarjo kembali bertugas di pamong-praja sebagai Asisten Wedana Sambong, Blora. Di tempat baru ini lahir anaknya yang keempat, diberi nama Mas Setiadi, yang kemudian mengabadikan nama ayahnya sebagai nama tua menjadi Setiadi Kartohadikusumo. Lahir pada hari Minggu Kliwon tanggal 11 September 1921. Selanjutnya anak yang kelima sampai dengan kesepuluh, dilahirkan di daerah Jawa Timur. Hal ini karena Sutarjo bertugas sebagai pamong-praja selalu berpindah-pindah, mulai dari Blora sampai ke Jawa Timur.

Anak-anak yang dilahirkan di Jawa Timur ini ialah : Mas Setioso, anak kelima lahir tanggal 2 September 1923 di Bangilan, Bojonegoro. Namun anak ini kurang mendapat usia panjang, wafat pada hari Sabtu Wage tanggal 26 Juli 1924 di Tambakrejo, Bojonegoro. Yang keenam, lahir seorang putri pada tanggal 8 Desember 1924, pada hari Senin Wage di Tambakrejo, Bojonegoro. Anak ini diberi nama Mas Roro Susanti. Anak yang ketujuh juga putri lagi diberi nama Mas Roro Sri Sudarti, lahir di Sumberrejo, Bojonegoro pada hari Rabu Legi, tanggal 19 Januari 1927. Kedelapan lahir seorang putri lagi. Dilahirkan di Sumberrejo, Bojonegoro tanggal 2 Agustus 1928 pada hari Rabu Legi, diberi nama Mas Roro Setiarti. Dua orang lagi yang lahir di Jawa Timur ialah Mas Setiotomo dan Mas Sutejo. Keduanya dilahirkan di Gresik. Mas Setiotomo lahir pada hari Kamis Pon tanggal 10 Oktober 1929, sedangkan Mas Sutejo pada hari Minggu Wage tanggal 7 Desember 1930. Keduanya merupakan anak yang kesembilan dan kesepuluh. Dua orang lagi lahir di Jakarta, semuanya laki-laki merupakan anak yang kesebelas dan keduabelas. Keduanya ialah Mas Budisatio lahir pada hari Rabu Wage, tanggal 17 Oktober 1934, sedangkan yang bungsu lahir kira-kira lima tahun kemudian yaitu pada hari Senin Wage tanggal 7 Agustus 1939, diberi nama Mas Haksomo. 29)

Demikianlah kebahagiaan yang dialami oleh keluarga Sutarjo Kartohadikusumo, bersama istri dan putra-putranya. Istri tercinta selalu mendampingi dalam pengabdian kepada pemerintah, perjuangan menghadapi penjajah dan pada masa revolusi fisik mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan Republik Indonesia. Disamping itu perhatiannya terhadap perawatan, pendidikan dan pembinaan agama Islam anak-anaknya tidak luput dari perhatian suami istri yang berbahagia ini.

Namun demikian ujian hidup menimpa juga keluarga ini semasa gencarnya perjuangan bangsa Indonesia menghadapi masuknya tentara Sekutu yang diikuti tentara NICA (**Nederland Indies Civil Administration**). Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan jabatan Gubernur Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat minta agar Sutarjo bersedia menjadi Gubernur Jawa Barat. Permintaan itu diterimanya. Mulailah Sutarjo beserta seluruh keluarga berpindah ke Bandung, menempati rumah kediaman resmi Gubernur Jawa Barat **Pakuan**. 30) Jabatan sebagai Gubernur ini dikokohkan dengan Surat Pengangkatan dari Presiden Republik Indonesia, yang ditandatangani Presiden Sukarno tanggal 19 Agustus 1945. 31)

Dalam rangka pendudukan Sekutu di Indonesia, tanggal 12 Oktober 1945 Brigade Mc. Donald dari Divisi 23, tiba di kota Bandung dengan menumpang kereta api, sesuai dengan persetujuannya yang telah dicapai antara pihak Sekutu dan pemerintah Republik Indonesia. Pendudukan Sekutu atas Indonesia dilakukan oleh Persemakmuran Inggris. Pada hakekatnya adalah atas dasar persetujuan **Civil Affairs Agreement** dan persetujuan-persetujuan lain antara Inggris dan Belanda. Isi persetujuan itu antara lain bahwa tentara Inggris bertindak sebagai tentara pendudukan, sambil berusaha membantu Belanda menguasai kembali Indonesia. Kedatangan tentara Sekutu itu selalu diboncengi tentara NICA dan telah terbukti bahwa kehadiran tentara Sekutu berarti pelanggaran, perkosaan atau penteroran terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Melihat semua ini, para pejuang di Bandung tidak berdiam diri. Dengan demikian hadirnya tentara pendudukan Sekutu di Bandung tanggal 12 Oktober 1945 berarti mulailah Palagan Bandung untuk menegakkan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 - di kota Bandung. 32) Peristiwa ini berlanjut sampai pembumi-hangusan kota Bandung tanggal 24 Maret 1946 dari pihak pasukan kita. Peristiwa ini terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Peristiwa inilah yang memberikan inspirasi kepada komponis Ismail Marzuki menciptakan lagu **Halo-halo Bandung**. Maksud pembakaran kota Bandung itu agar daerah yang harus dikosongkan itu tidak dapat digunakan oleh pasukan Inggris.

Pada masa awal terjadinya pertempuran melawan tentara Sekutu ini, gedung Pakuan tak luput dari sasaran pihak Inggris dengan tentara **Gurkha** nya. Tepat di depan gedung ini terjadi ledakan mortir dari serangan tentara Gurkha. Hal ini membikin kaget penghuninya, yaitu keluarga Gubernur Sutarjo, terutama istri beliau. Demi keselamatan dan keamanan keluarga Gubernur ini mulai mengungsi, seperti halnya penduduk kota Bandung yang lain. Semula keluarga Sutarjo menuju ke Ciamis, kemudian ke Tasikmalaya, terus ke Jawa Tengah, sampai akhirnya ke Surakarta. Di kota ini, Sutarjo

kemudian diangkat menjadi Residen Surakarta. Namun saat ini keluarganya diungsikan lagi ke Tawangmangu. Ketika terjadi ledakan mortir di depan gedung Pakuan tersebut, ternyata membawa akibat buruk bagi keluarga Sutarjo. Istri beliau Siti Jaetun Kamarrukmi jatuh sakit karena kaget dan hal ini berkelanjutan terus sampai di pengungsian Tawangmangu. Karena tidak tahan lagi atas sakit yang dideritanya, beliau wafat tanggal 26 Agustus 1947 di Tawangmangu. Jenazahnya dikebumikan di makam Bibisluhur, Mangkunegaran Surakarta. 33)

Demikianlah di tengah-tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia itu, kesedihan menimpa keluarga Sutarjo. Anak-anak masih kecil, yang bungsu Haksomo baru berusia 8 tahun, masih memerlukan perhatian khusus dan kasih sayang ibu. Demikian pula perawatan dan pendidikan kakak-kakaknya. Oleh karena itu dirasa sangat perlu bagi Sutarjo akan adanya istri sebagai pendamping suami. Kira-kira setahun sesudah wafat istri beliau, Sutarjo beristri lagi yang kedua dengan Siti Surat Kabirun, sebagai Mas Ayu Sutarjo. Istri yang kedua ini kelahiran tanggal 18 Maret 1898, adalah kemenakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Ia janda Bupati Bantul, Yogyakarta. Namun Siti Surat Kabirun hanya 10 tahun lamanya mendampingi dan membina keluarga Sutarjo. Pada tanggal 18 Agustus 1958, beliau mendahului suami pulang ke rokhmatullah. 34) Demikianlah musibah yang kedua telah menimpa keluarga Sutarjo. Walaupun anak-anak sudah dewasa, bahkan diantaranya sudah ada yang berkeluarga, namun adanya istri sebagai pendamping suami sangat diperlukan. Beliau beristeri lagi yang ketiga kalinya, dengan putri bangsawan Pakualaman Yogyakarta GBRA Kus Subandinah, yang dilahirkan di Yogyakarta, tahun 1912, adalah adik Sri Paku Alam VIII. Istri ketiga ini tetap mendampinginya sampai akhir hayatnya dan sekarang masih menetap di rumah kediaman almarhum Sutarjo, jalan Raden Saleh 18 Jakarta, dengan memperoleh jaminan pensiun janda Sutarjo sebagai Gubernur Jawa Barat, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 35)

Perhatian Sutarjo terhadap keluarga, istri dan anak-anaknya baik sekali. Peraturan-peraturan dan disiplin ditanamkan terhadap anak-anak sejak kecil. Seperti adat sopan santun, tatacara kemasyarakatan terutama adat Jawa, tatakrama, ditanamkan pada anak-anak. Tak luput dari perhatiannya ialah disiplin bersekolah, pengaturan waktu belajar, istirahat di rumah, ditanamkan pula. Pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari Minggu yang menjadi hari-hari keluarga, anak-anak dikumpulkan, diberi nasehat yang sangat berguna, bagi mereka sebagai bekal hidup dan kehidupan dikelak kemudian hari. Semua anak-anak diperlakukan sama,

tidak ada yang dibeda-bedakan. Demikian pula terhadap para menantu, dipandang sebagai anak sendiri. Kepada merek ini beliau berlaku sabar sekali. Pendidikan agama Islam bagi anak-anak, tak luput dari perhatiannya selalu diadakan pengajian yang harus dihadiri anak-anak dan cucu. Cara-cara menanamkan pendidikan terhadap anak-anak ini, dirasakan sangat mengesan dan lama tinggal di dalam ingatan anak-anak. 36) Juga cara hidup hemat, mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dengan dicatat yang tertib, ditanamkan pula kepada anak dan cucunya.

Demikianlah secara garis besar jalan hidup keluarga Sutarjo Kartohadikusumo. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut siapakah sebenarnya Sutarjo itu, perlu kiranya disini diungkap pula hobby dan kepribadiannya.

E. HOBI DAN KEPRIADIANNYA.

Ada beberapa hobi atau kegemaran Sutarjo, yang sejak kecil, masa dewasa bahkan sampai hari tuapun masih dilakukan atau tetap dibina. Beberapa hobi itu antara lain bidang olah raga, kesenian, membaca maupun menulis.

Beberapa cabang olah raga yang disenangi ialah sepak bola, naik kuda, berjalan kaki atau lari. Kesenangannya bermain sepakbola telah dimiliki sejak kecil dan waktu telah menjadi siswa OSVIA Sedangkan berkuda adalah kegemarannya yang lain. Kegemarannya naik kuda ini didukung dan berhubungan erat dengan tugasnya sebagai pamong praja, sebagai camat (Asisten Wedana) maupun sebagai Wedana. Pada waktu itu paling tidak memiliki tiga ekor kuda. Dengan berkuda atau naik **bendi** (dokar) beliau meninjau ke desa-desa memeriksa pekerjaan para Lurah atau Kepala Desa berdialog langsung dengan rakyat. Mereka ini diberi nasehat agar bekerja yang baik. Terutama pada waktu menjadi Camat Bangilan, Sambong, Wedana Sumberrejo di kabupaten Bojonegoro, maupun waktu menjadi Wedana Papan Kediri, kalau meninjau daerah selalu naik kuda atau bendi. Pada waktu meninjau selain ditemani para Lurah, kalau keadaan tidak aman ditemani oleh polisi. 37) Kegemarannya dalam bidang sport ini menyebabkan beliau pernah mendirikan dan menjadi Ketua Pengurus Besar Ikatan Sport Indonesia dari tahun 1937 - 1943. Merupakan persatuan olah raga nasional yang pertama di Indonesia. 38) Maksud didirikannya ikatan sport ini untuk mengimbangi sport dari pihak Belanda. Anggota-anggotanya terutama pelajar dan mahasiswa. Organisasi ini meliputi seluruh cabang sport yang ada di Indonesia. Kegiatan dari ikatan sport ini tidak bisa dilarang pihak Belanda karena tidak berlandaskan politik. 39) Sampai pada masa tua, hobinya dalam bidang sport ini tetap terpelihara baik. Setiap pagi

setelah sembahyang subuh, beliau berjalan kaki. Routenya tetap, dari tempat kediamannya di jalan Raden Saleh, menuju jalan Cikini, Cut Mutiah, Teuku Umar dan Suwiryu. Kadang-kadang sampai pula ke jalan Imam Bonjol atau jalan Thamrin. Sering juga singgah ke tempat teman lama atau duduk-duduk di Taman Suropati mengobrol dengan para gelandangan. Ternyata dari dialog dengan mereka ini, dapat disimpulkan bahwa para gelandangan ini banyak yang bekerja di pabrik, bukan sebagai penganggur. Kegiatannya dalam bidang sport ini menyebabkan ia tetap tampak sehat, pendengarannya baik, sebagian besar giginya masih utuh dan dalam usianya 86 tahun, tubuhnya tetap tegak, langkahnya gontai tidak bertongkat. 40) Sedangkan cabang sport yang lain yang masih dipelihara sampai masa tuanya ialah **treksandow**. 41)

Sutarjo juga memiliki hobi yang lain, seperti seni musik, kerawitan, tari dan wayang. Dalam seni musik (Barat) kesenangannya ialah bermain gitar. Sedangkan dalam seni kerawitan ia senang memainkan rebab, gender dan gambang. Seni pedalangan juga tak luput dari perhatiannya. Ia senang memainkan wayang sebagai dalang. Banyak petuah atau contoh-contoh yang sangat berharga yang bisa diperoleh dari ceritera wayang itu. Tari Jawa **bekso** juga digemari, ia sendiri pandai menari Jawa. Pada saat itu ada semacam ketentuan bahwa para pamong praja itu harus bisa **bekso** (tari Jawa). **Langendriyan** adalah satu diantara kegemarannya juga. 42)

Membaca dan menulis adalah hobi Sutarjo yang lain. Dengan membaca, orang dapat menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk menyampaikan hasil pemikiran, ide atau pendapatnya, selain dikemukakan dalam bentuk pidato, kata sambutan, ceramah, prasaran, mengajar atau memberi kuliah, menulis, dan lain-lain. Banyak sekali hasil karya tulisnya yang dimuat dalam berbagai surat kabar, majalah atau diterbitkan dalam bentuk buku. Bahkan ia sendiri juga pernah memimpin penerbitan majalah, seperti **Oud Osvian** (1919 - 1921) merupakan majalah buat pamong praja lulusan Osvia. Juga memimpin **kalawarta Pemimpin** dan **Penyuluh** (1929 - 1942). Dari tulisan-tulisannya yang telah dibukukan, membuat namanya menjadi terkenal, bahkan dikemudian hari memperoleh kehormatan berupa gelar **Doctor Honoris Causa** dalam Ilmu Pendidikan, bidang Pendidikan Masyarakat dari IKIP Bandung, pada tanggal 28 Januari 1976. Di antara karyanya yang terkenal ialah yang berjudul **Desa**.

Bagaimana kepribadian Sutarjo ?

Ada banyak sifat atau kepribadian Sutarjo yang menarik dan bersifat positif. Berhati-hati dalam berbicara, bersikap, maupun dalam berbuat adalah salah satu diantara sifatnya yang menonjol. Baik terhadap teman sendiri maupun

terhadap pihak musuh (Belanda atau Jepang) yang dihadapi. Ia adalah seorang yang penyabar, halus budinya dan suka menolong siapa saja yang membutuhkannya. Tentang sifat sabar, tidak hanya ditujukan kepada anggota keluarga saja, tetapi juga dalam melaksanakan tugas pemerintah. 43) Sifat ini rupanya mempengaruhi langkah yang ditempuh dalam perjuangan, ia lebih senang menempuh jalan **evolusi** dari pada cara revolusi. Di samping itu cara damai bagi Sutarjo lebih diutamakan dari pada cara kekerasan seperti yang ditempuh teman seperjuangannya M. Husni Thamrin yang memang lebih radikal. Sebagai seorang pamong praja, ia berhati-hati sekali dalam bertindak. Pihak penguasa dengan dalih apa saja akan mudah sekali untuk menyingkirkannya. Sifat berhati-hati, sabar dan teliti ini terutama dilandasi dengan menggunakan dasar hukum yang ada. Langkah-langkah yang ditempuh selalu ada landasannya, baik secara hukum maupun logika yang wajar dan bersifat terbuka. Biasanya pihak penguasa agak mau mengerti apabila alasannya kuat. Oleh karena itu sifat **sportif** juga dipegang teguh oleh Sutarjo. Ia lebih senang menghadapi pihak lawan secara sportif. Walaupun pihak lawan yang dihadapi justru sering tidak sportif dalam bertindak. 44) Namun demikian Sutarjo juga memiliki sifat pemberani, tetapi harus dilandasi pula dengan dasar hukum yang pasti, logika dan perhitungan yang mantap. Sifat berani ini terutama untuk membela kepentingan rakyat. Ia sebagai pamong praja harus berani melindungi rakyat dengan menggunakan sendi-sendi hukum yang pasti. Biasanya dengan menggunakan dasar-dasar ini, Belanda mau menerimanya. 45) Dengan kepribadiannya yang tenang, cerdas dan jujur, Sutarjo bisa menjalin hubungan berteman dengan pejuang-pejuang yang tajam pemikirannya dan agresif, seperti Dr. Sam Ratulangi dan Husni Thamrin. 46) Mengenai pemanfaatan waktu, Sutarjo termasuk orang yang pandai menghargai waktu. Ia tahu waktu dan bisa menggunakan serta membagi waktu secara tertib dalam kehidupan dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pembagian waktu diatur secara rapi sejak bangun tidur, bersembahyang, olah raga, berjalan-jalan pagi, ke kantor, pulang kantor, makan siang, beristirahat sore, makan malam dan lain-lain. Semuanya itu dilakukan tepat pada waktunya. Kebiasaan ini dimulai sejak masa muda sampai akhir hayatnya pada tahun 1976. Terlebih-lebih pada zaman Belanda, disiplin waktu ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Pada masa Perang Kemerdekaan, disiplin waktu itu pada umumnya menjadi kacau, karena perang tidak mengenal waktu, bisa pagi, siang atau malam. Walaupun demikian Sutarjo tetap pada pendiriannya berusaha keras berdisiplin waktu dan bisa melaksanakannya sampai pada masa tua. Sebagai contoh misalnya : Telah menjadi kebiasaan Sutarjo, bahwa tiap jam 22.00 beliau mulai tidur malam

dan bangun pagi jam 04.00. Selanjutnya melaksanakan acara rutin. Apabila diantara jam itu kebetulan ada undangan menghadiri peralatan, walaupun acaranya belum selesai, tepat jam 22.00 mendahului mohon diri, untuk menepati jam tidurnya. Sifat menghargai waktu ini dipegang teguh dan berusaha untuk diajarkan pula kepada anak-anaknya atau mahasiswa yang diajarnya. 47)

Sutarjo juga memiliki semangat besar dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dihadapinya. Misalnya ketika mengajukan Petisi pada tahun 1936, karena begitu besar semangatnya sampai tidak bisa tidur. 48) Di samping itu semua, Sutarjo termasuk orang yang suka bekerja dan berjiwa dinamis, walaupun tidak revolusioner. Ini terlihat sejak masa mudanya waktu bersekolah di OSVIA Magelang, ia telah menjadi Ketua Budi Utomo cabang Magelang. Setelah lulus ia menjadi Jurutulis, sampai akhirnya kariernya meningkat terus menjadi Patih.

Ada watak Sutarjo yang lain, yang bersifat positif. Hidup sederhana dan hemat merupakan sendi kehidupan keluarganya. Sebagai contoh misalnya untuk menyusun buku hariannya, cukup dibuat dari penanggalan (kalender) bekas yang dipotong-potong dan dijilid rapi. Sampai sekarang buku harian itu masih tersimpan baik. Demikian pula dalam mengatur anggaran belanja rumah tangga, pendapatan dan pengeluaranpun dicatat rapi. Semua pengeluaran harus berencana dan disesuaikan dengan kemampuan. Contoh lain adalah pada waktu mengkhitankan cucu-cucunya, tidak diadakan sendiri-sendiri melainkan diadakan secara massal atau bersama-sama. Hal ini selain untuk menghemat biaya, juga meneguhkan kegotong royongan keluarga. Sutarjo mempunyai pikiran yang **consistent** (berpendirian tetap). Sebagai contoh misalnya : Kalau ia sedang membicarakan sesuatu hal, baru berbicara sekitar 10 menit, tiba-tiba ada sesuatu urusan yang harus diselesaikan, setelah selesai dengan urusannya tadi, ia kembali lagi dan melanjutkan pembicaraan pada bagian yang dihentikan tadi. Di samping itu, Sutarjo adalah orang yang konsekwen antara kata dan perbuatannya. Apa yang diucapkan harus cocok dengan apa yang diperbuat dan sebaliknya. 49) Semua sifat dan sikap yang baik itu diusahakan dapat diteruskan kepada anak-cucunya. Pendiariannya bahwa orang tua itu kalau ingin dihormati dan ditaati, haruslah memberi contoh yang nyata dalam perbuatannya sehari-hari, bukan hanya omong dan nasehat-nasehat belaka.

Demikianlah sifat dan kepribadian Sutarjo, terutama yang bersifat positif. Sekarang bagaimana kehidupan keagamaan dan pandangan hidupnya ? Sutarjo adalah pemeluk agama Islam yang taat. Ibadat dan peraturan yang berlaku dalam agama Islam, dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Sembahyang lima waktu dilaksanakan secara tertib. Namun demikian beliau

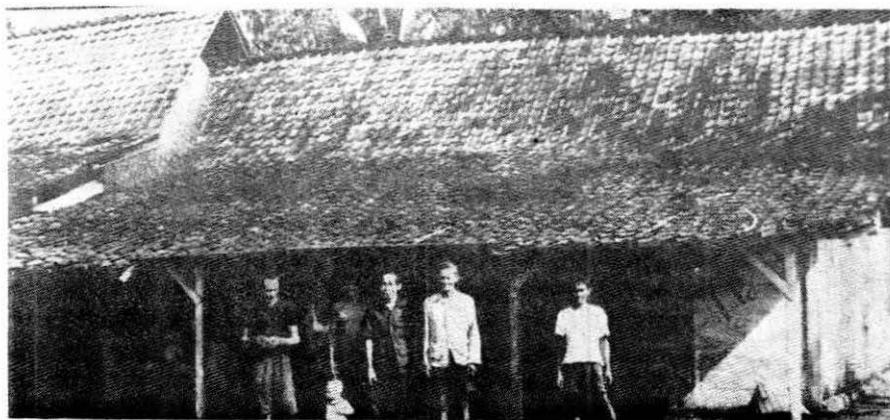
belum naik haji, alasan karena kesehatannya yang kurang memungkinkan. Mengenai pendiriannya sebagai penganut agama Islam, ia tidak menghendaki agama Islam itu dipolitikkan, oleh karena itu ia tidak mau masuk salah satu partai politik yang berdasarkan agama Islam. Ia tidak mau menonjolkan hidup keagamaan Islam ini secara demonstratif, misalnya dengan cara berbondong-bondong ke mesjid secara beramai-ramai, sehingga menarik perhatian orang banyak. Hal ini antara lain karena sikapnya yang sederhana itu. Terhadap anak-anak, tidak dipaksakan mengikuti agama tertentu, namun dinyatakan sebaiknya mereka ke beragama Islam saja. 50) Hidup yang selaras lahir dan batin diusahakan benar-benar, untuk bisa memberikan ketentraman hidup. Karena dari pendalamannya tentang agama Islam, mewarnai pandangan, ide-ide atau kebijaksanaannya. Hal ini tampak misalnya dalam pandangannya yang dikemukakan waktu menerima gelar Doctor Honoris Causa dari IKIP Bandung tanggal 28 Januari 1967 yang berjudul : **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila** . Dari sini dapat dilihat pandangan hidup keagamaannya. Antara lain ia yakin tentang adanya Tuhan, **Manunggalnya Kawulo-Gusti** atau bersatunya manusia dengan Tuhannya, tentang Demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan atau Demokrasi Pancasila, dan lain-lain. 51) Pandangannya tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersifat panteistis, dikatakan hal ini bisa dilaksanakan dengan cara diamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara praktis, tidak berdasar teori yang muluk-muluk, melainkan menurut filsafat asli Manunggalnya Kawulo Gusti dengan jalan mengekang hawa nafsu dan angkara murka, sehingga tidak berhaluan mementingkan diri sendiri, kepentingan bersama selalu ditaruh di muka. 52)

Sutarjo adalah nasionalis yang konsekwen. Ia cinta tanah air dan bangsanya, Indonesia. Ini dapat dilihat dari perjuangannya yang selalu membela dan memperjuangkan nasib bangsanya. Petisi yang diajukannya pada sidang **Volksraad** tanggal 9 Juli 1936, pada garis besarnya berisi tuntutan kepada Nederland, agar memberikan kedudukan tersendiri kepada tanah jajahan Hindia Belanda (Indonesia), yang sederajat dengan Nederland. Demikian pula usahanya membentuk **Sutarjo Bank** tahun 1940 yang kemudian menjadi Bank Pegawai pada tahun 1950, dan mosinya di **Volksraad** untuk mengubah sebutan **Inlander** menjadi **Indonesier**, serta tuntutannya terhadap **Volksraad** pada tahun 1936 agar Nederland memberikan sumbangan sebesar 25 juta Gulden untuk membangun ekonomi rakyat yang parah. Semuanya ini mencerminkan nasionalismenya yang kuat. Perjuangannya dalam bidang pendidikan, Palang Merah Indonesia maupun bidang radio dengan mendirikan PPRK (Perikatan Perhimpunan Radio Ketimuran) juga mencerminkan jiwa seorang nasionalis. Sifat ini juga

tampak dalam sikapnya yang secara spontan berdiri menghormat kalau dalam suatu upacara dinyanyikan lagu Indonesia Raya, walaupun di bawah ancaman pihak penguasa. Sedangkan untuk menunjukkan sportivitasnya, kalau dinyanyikan lagu kebangsaan Belanda, ia juga berdiri menghormati.

Di samping itu semua, Sutarjo juga memiliki jiwa sosial. Hal ini terlihat dalam usaha-usahanya membela rakyat kecil, memperbaiki taraf hidup, pendidikan, dan lain-lain. Misalnya waktu ia menjadi Wedana di Sumberrejo, kabupaten Bojonegoro, didirikan sekolah buat rakyat di kawedanan ini dan juga mengadakan bis sekolah untuk antar jemput anak-anak yang bersekolah di Bojonegoro.

Demikianlah secara garis besar hobi dan kepribadian Sutarjo Kartohadikusumo. Selanjutnya marilah kita tinjau lebih lanjut bagaimana perjuangan pamong praja yang berwatak sportif ini.



1. Lambang Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

(Foto : Jawa Tengah Selayang Pandang).

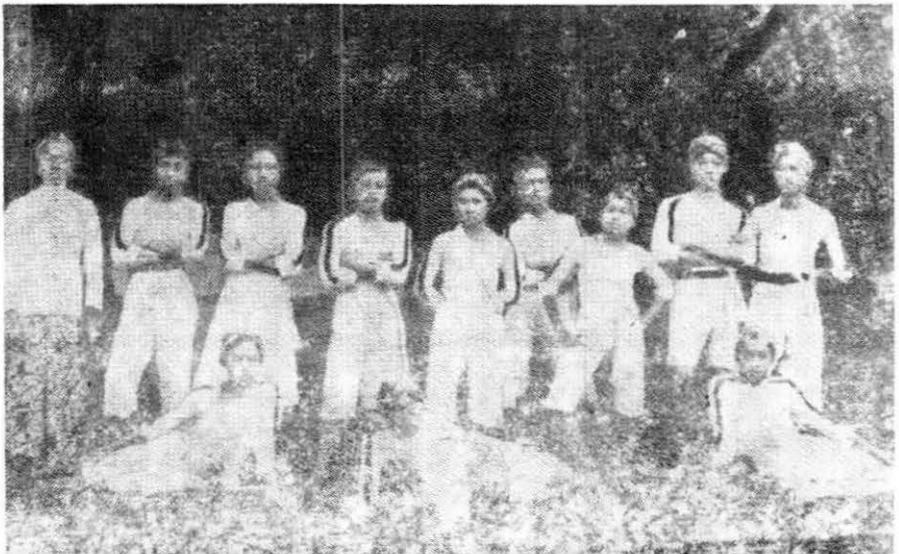
2. Tugu Pancasila di Blora.

Bagian atas berupa lambang negara Burung Garuda. Badan Tugu berbentuk pohon jati. Pada bagian bawah tugu terdapat relief yang menggambarkan pekerja hutan jati (blandong) sedang memuat hasil produksi ke kendaraan. Relief lain menggambarkan pabrik pengolahan, menara dan pengeboran minyak tanah. (Foto : Suara Merdeka).

3. Sekelompok orang Samin di depan rumah mereka. (Foto : Suara Merdeka).



4. Sutarjo Kartohadikusumo (nomer dua dari kiri) ketika menjabat Jaksa di Rembang tahun 1917. (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).
5. Keluarga Besar Sutarjo Kartohadikusumo. Berdiri di belakang dari kiri ke kanan berturut-turut : Susatio Kusumonoto, Setiowati, Sutarjo Kartohadikusumo, Setiajid dan Setiadi. Berdiri di barisan depan dari kanan ke kiri : Susanti, Sudarti, Setiarti. Sedangkan Ibu Siti Jaetun Kamarrukmi Sutarjo duduk di tengah-tengah. Yang berdiri di baris depan dari kiri ke kanan adalah Setiotomo, Sutejo dan Budisatio. Si bungsu Haksomo tampak menyelinp di tengah-tengah di sebelah kanan sang ibu. (Foto : Yayasan sutarjo).



6. Gedung OSVIA di Magelang, tempat Sutarjo Kartohadikusumo bersekolah selama 6 tahun dan tamat 1911. Gedung ini dibangun tanggal 12 Mei 1874. Sekarang ditempati KORESTA (Komando Resort Kepolisian Kota Magelang) 971 Magelang.
7. Sutarjo Kartohadikusumo ketika memimpin Perkumpulan Sepak Bola OSVIA Magelang tahun 1910 (Foto : Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila = Dasar Essentieel Pencasar Ps).

BAB. II PERJUANGANNYA

A. KARIERNYA.

Karier berasal dari bahasa Inggris **Career** berarti jalan hidup atau riwayat hidup. 1) Namun demikian dalam penulisan ini terutama membatasi tentang karier Sutarjo di bidang pemerintahan dan pendidikan. Setelah lulus dari OSVIA Magelang tahun 1911, Sutarjo magang sebagai calon pegawai di kecamatan Kunduran, kabupaten Blora selama tiga bulan. Selama magang, Sutarjo benar-benar mengabdikan tanpa menerima gaji sedikitpun. Oleh karena ia dipandang cakap, tekun, rajin dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka ia diangkat menjadi **Hulpschrijver** (Pembantu Juru tulis) di kecamatan Kunduran pada tahun 1911. Pada tahun itu juga bernasib baik, mengalami dua kali kenaikan pangkat atau jabatan. Dari Pembantu Juru tulis menjadi Juru tulis Jaksa dan kemudian menjadi Mantri Kabupaten di Blora. Semuanya itu dicapainya dalam tahun 1911. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1913, Sutarjo diangkat menjadi Asisten Wedana (Camat). Perhatian dan kegiatannya selama menjadi Camat ini, terutama meningkatkan sivilisasi masyarakat desa, khususnya bidang ekonomi dan pendidikan/pengajaran. Perhatiannya tertuju kepada kultur masyarakat, terutama nilai-nilai spiritual, moralitas dan mentalitas yang tinggi, tetapi dipraktekkan oleh masyarakat dengan cara yang mengharukan dan sederhana. Orang desa berprinsip bahwa watak dan laku yang baik itu akan berhasil apabila dilakukan (dipraktekkan) keduanya. Hanya dengan omong besar tentang laku baik saja, tak besar pahalanya. Demikianlah nilai kejiwaan orang desa menurut penghayatan Sutarjo. 2)

Pada tahun 1915 Sutarjo menjabat sebagai Adjunct Jaksa (Pembantu Jaksa). Belum ada setahun menjalani jabatan ini, beliau telah diangkat menjadi Jaksa pada tahun 1915 itu juga. Ini menunjukkan bahwa prestasinya cukup baik. Pada tahun 1917 Sutarjo menjabat Jaksa di Rembang. Selang empat tahun kemudian, Sutarjo mendapat tawaran melanjutkan studi di *Bestuur school* di Jakarta. Tawaran itu tidak disia-siakan, diterimanya dengan gembira karena hal ini merupakan kesempatan emas baginya. Sekolah ini hanya satu-satunya yang ada di Indonesia, setingkat akademi. Demikianlah maka pada tahun 1919 beliau berangkat ke Jakarta guna melanjutkan studinya itu. Dua tahun lamanya Sutarjo menekuni sekolah ini, sambil melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, jurnalistik atau organisasi di luar kampus.

Tahun 1912 beliau lulus dari **Bestuurschool**, kemudian ditugaskan ke profesi semula yaitu pada pamong-praja. Oleh karena itu Sutarjo kembali ke Blora,

untuk menjabat sebagai Asisten Wedana Sambong. Selama memangku jabatan Asisten Wedana ini beliau berpindah-pindah tempat, dari kecamatan yang satu ke kecamatan yang lain, tempat di mana beliau ditugaskan.

Pada waktu menjadi Asisten Wedana di Tuban Jawa Timur, ada suatu peristiwa yang berhasil diatasi dengan cara dan kebijaksanaannya yang bersifat mendidik. Pada waktu itu di daerah Bangilan dekat Tuban ada seorang penjahat ulung yang menjadi buronan polisi, namun belum bisa ditangkap. Penjahat ini telah melakukan berbagai kejahatan, penggarongan maupun pembunuhan. Tak seorangpun yang bisa menangkapnya, baik Komisaris Polisi maupun Asisten Wedana yang lain. Namun Sutarjo dengan kebijaksanaannya berhasil menangkapnya. Pada tengah malam pintu belakang rumah Sutarjo diketuk orang, padahal bagian depan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Setelah pintu dibuka, ternyata yang mengetuk pintu tadi adalah si penjahat yang dicari-cari itu. Penjahat ini dengan sepenuh hati menyerahkan diri kepada Sutarjo sebagai Asisten Wedana. Dia **pasrah bongkolan** kepada **ndoro Asisten**.

Ia menyerah betul-betul kepada Bapak Camat. Ternyata tindakan Sutarjo justru di luar dugaan si penjahat, ia diperlakukan baik-baik, malahan ditawarkan pekerjaan sebagai Opas. Sudah barang tentu tawaran ini tidak disia-siakan, diterima dengan penuh kegembiraan dan terima kasih yang mendalam. Dari tindakan yang bijaksana ini, maka tak sedikit penjahat-penjahat lainnya yang kemudian menyerahkan diri. Sejak saat itu daerah Bangilan aman dan sejahtera. Walaupun ada tuntutan dari pihak Wedana agar penjahat-penjahat itu diperkarakan, tetapi ketika Sutarjo menghadap Bupati mengemukakan policy yang ditempuh, Bupati malahan menghadihkan promosi jabatan Wedana kepadanya, disertai suguhan segelas champagne. Ini merupakan contoh pamong praja yang bertindak sebagai pendidik, sehingga tindakannya menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat yang diperintahnya. Tindakannya banyak memberi efek positif daripada tindakan balas dendam. Hal ini hanya bisa berhasil apabila si pendidik adalah orang yang baik, berwibawa dan pengabdikan Tuhan Yang Maha Esa. 3) Demikianlah promosi sebagai Wedana itu menjadi kenyataan, pada tahun 1924 Sutarjo diangkat menjadi Wedana. Jabatan ini ditekuninya selama lima tahun, tetapi tidak hanya pada suatu tempat saja, melainkan berpindah-pindah ke tempat-tempat yang memerlukan penangannya yang bijaksana itu. Mulai dari kawedanan Tambakrejo, Sumberrejo, keduanya di daerah kabupaten Blora, kemudian Wedana Papar, Kediri.

Tahun 1929 kariernya naik lagi, beliau diangkat menjadi Patih merangkap **Landrechter** (Hakim Khusus Urusan Tanah) di Gresik, yang berlangsung sampai tahun 1931.

Mulai tahun 1931 - 1942 Sutarjo duduk sebagai anggota **Volksraad** (Dewan Rakyat), merangkap menjadi **Wakil Ketua van Gedelgeerden Volksraad** (Badan Pekerja Volksraad) yang berkedudukan di Batavia (Jakarta).

Sebenarnya menurut jenjang kepamongprajaan, sesudah jabatan Patih seharusnya meningkat menjadi Bupati (**Regent**). Pada waktu itu Sutarjo ditawarkan oleh pemerintah Belanda untuk diangkat menjadi Bupati Pasuruan Jawa Timur. Ketika itu yang menjadi Bupati daerah ini ialah adik iparnya sendiri. Karena Bupati ini meninggal dunia, Sutarjo ditunjuk untuk menggantikannya. Tetapi pada waktu yang sama, Sutarjo ditawarkan menjadi anggota **Volksraad**. Beliau dihadapkan pilihan yang memerlukan pemikirannya yang cermat. Sebagai Bupati memang kedudukannya terhormat namun gerakannya tidak bebas, selalu diawasi. Dalam hal ini Sutarjo telah masuk daftar hitam, selalu diawasi **IVG (Inlichtingen Veiligheids Groep**; semacam Polisi Rahasia Belanda). Walaupun demikian Sutarjo belum pernah ditangkap penguasa Belanda karena bergerak dalam batas hukum yang berlaku. Sedangkan kalau memilih menjadi anggota **Volksraad** bisa **kiprah** (bergerak bebas) dan berbicara secara bebas pula. Akhirnya Sutarjo menentukan pilihannya menjadi anggota **Volksraad**. 4)

Sebagai anggota **Volksraad**, ia banyak mengemukakan pandangan-pandangannya, terutama untuk memperbaiki keadaan masyarakat Hindia Belanda bahkan menuntut kemerdekaan secara bertahap semacam **Commonwealth**, seperti yang dikemukakannya dalam petisi di depan sidang **Volksraad** tanggal 15 Juli 1936, yang kemudian dikenal dengan sebutan **Petisi Sutarjo**. Beliau duduk dalam **Volksraad** Mewakili **PPBB (Persatuan Pegawai Bestuur Bumiputra]** seluruh Indonesia. Sejak tahun 1934, ia menjadi Ketua Fraksi Pamong Praja menggantikan **RAA Wiranatakusumah** dan kemudian Sutarjo terpilih menjadi anggota **College van Gedelgeerden** (Badan Pekerja **Volksraad**). 5)

Pada zaman Jepang, Sutarjo mendapat tugas baru sebagai **Nalmubu Sanyo** (Pimpinan Departemen Dalam Negeri). Jabatan ini dipangkunya pada tahun 1942. Setahun kemudian, beliau mendapat kesempatan meninjau kegiatan **home front** Perang Dunia II (Perang Asia Timur Raya) di Jepang. Di sini beliau mengunjungi Departemen Dalam Negeri Jepang dan mekanisasi pertanian. Sekembalinya dari Jepang, pada tahun 1943 beliau diangkat menjadi **Syuytyookan** (Residen) Jakarta).

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 beliau diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat. Untuk melaksanakan tugas ini Sutarjo beserta keluarga berpindah ke Bandung. "Tetapi pada waktu itu pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Gubernur Mr. Datuk Jamin yang berkedudukan di Bandung pula". 6) Pada masa awal Revolusi fisik ini,

keluarga Sutarjo mengalami pahit-getirnya akibat pertempuran di Bandung melawan Sekutu Inggris NICA, yang terkenal dengan sebutan "Bandung Lautan Api". Menghadapi keadaan ini keluarga Sutarjo diungsikan ke Jawa Tengah, sampai di Tawangmangu. Sedangkan Sutarjo sendiri pada tahun 1946 ikut pemerintah Pusat ke Yogyakarta. 7)

Di tempat yang baru ini beliau tidak berpangku tangan, berjuang sesuai dengan bidangnya, untuk ikut menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Pada tahun 1946 ini, Sutarjo diangkat menjadi Gubernur, tetapi tugasnya sebagai Penasehat Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

Tatkala timbul kesulitan-kesulitan besar di Daerah Surakarta, berhubungan dengan masalah Swapraja, Sutarjo diangkat oleh Pemerintah Pusat sebagai Gubernur yang diberi tugas sebagai Residen Kepala Daerah Surakarta. Sedangkan yang menjadi Wakil Residen ialah Sudiro, yang dilantik oleh Presiden RI. 8) Tahun 1947 Sutarjo diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Dalam tahun itu juga ia menjadi Wakil Ketua dan tahun 1948 menjadi Ketua Dewan ini, yang dijabatnya sampai tahun 1950. Walaupun Sutarjo banyak kesibukannya dalam bidang pemerintahan, namun masih sempat pula menyisihkan waktunya ikut membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1948 - 1967, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Kurator Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sedangkan dari tahun 1950 - 1964, banyak jabatan di pemerintahan dan sebagai Dosen di Perguruan Tinggi yang dijabat bersamasama. Tahun 1950 - 1956 menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia dan tahun 1951 - 1955 menjadi Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri. Sedangkan dari tahun 1955 - 1956 menjadi Komisaris Negara Urusan Otonomi Daerah. Selepas dari jabatan ini, Sutarjo mendapat jabatan baru sebagai Gubernur diperbantukan pada Menteri Dalam Negeri (1956 - 1958). Dalam waktu yang sama beliau masih menyempatkan diri bertugas sebagai Dosen Luarbiasa pada Universitas Pajajaran Bandung, sejak 1956 - 1964. Tahun 1964 menjadi Dosen Luarbiasa IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan) di Bandung. Dari Perguruan Tinggi inilah kemudian Sutarjo memperoleh gelar **Doctor Honoris Causa** dalam Ilmu Pendidikan bidang Pendidikan Masyarakat, tanggal 28 Januari 1967.

Demikianlah alur karier Sutarjo Kartohadikusumo dalam tiga zaman, sejak lulus OSVIA Magelang pada zaman Belanda, zaman Jepang dan pada masa Indonesia Merdeka, bahkan sampai masa pemerintah Orde Baru.

B. PETISI SUTARJO

1. Tindakan tangan besi pemerintah Belanda.

Pada masa sebelum lahirnya Petisi Sutarjo tanggal 15 Juli 1936, pemerintah Belanda lebih banyak menggunakan tindakan tangan besi atau tindakan kekerasan terhadap aktifitas atau gerakan-gerakan politik bangsa Indonesia. Ini dimulai dengan penindasan terhadap pemberontakan di atas kapal perang Belanda **De Seven Provinciën** tanggal 4 - 10 Februari 1933. Sebenarnya peristiwa ini kejadian biasa, masalah perburuhan atau masalah gaji. Tetapi karena pihak Belanda dihinggapi rasa takut dan panik, maka peristiwa itu dianggap sebagai pemberontakan. Jadi sebenarnya adalah soal pemogokan buruh, tidak ada sangkut pautnya dengan soal politik. Hal ini terbukti dari pelaku pemberontakan itu bukan hanya marinir-marinir bangsa Indonesia, tetapi juga marinir-marinir bangsa Belanda. Bahkan yang berinisiatif adalah marinir bangsa Belanda, mengingat pengaruhnya yang besar. 9). Tindak lanjut kekerasan ini diteruskan terhadap sayap kiri dari partai-partai politik bangsa Indonesia yang sebenarnya tak bersalah apa-apa. Sehingga di sini kelihatan adanya kesan "siapa yang kuat dan dialah yang menang".

Kejadian-kejadian semacam ini yang mendorong M.H. Thamrin mengajukan interpelasi terhadap **College van Gedelegeerden** minta penjelasan tentang tindakan pemerintah yang tidak layak itu. Tetapi pemerintah kolonial malahan menuduh Thamrin mengadakan pembelaan terhadap partai-partai dan golongan ekstrim. Hal ini justru menimbulkan kekecewaan, dari pada kejernihan masalahnya. Di sini kelihatan bahwa pemerintah kolonial semata-mata ingin menunjukkan kekuasaannya, tanpa ada perlawanan sehingga membuat pemerintah Belanda lupa daratan, bertindak sewenang-wenang. Tanggal 27 Juni 1933 dengan menggunakan **gouvernements besluit** pegawai negeri dilarang menjadi anggota PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Partindo. Selanjutnya tanggal 1 Agustus 1933 Ir. Sukarno ditangkap dengan alasan politik, tanpa tuduhan pelanggaran hukum. Kemudian hak bersidang PNI dan Partindo dibatasi. Hal ini menimbulkan kelesuan dikalangan partai-partai pada umumnya. 10)

Awal tahun 1934 Perdana Menteri Belanda Dr. H. Colijn dan Gubernur Jenderal De Jonge melanjutkan tindakan-tindakan tangan besi. Tanggal 25 Februari 1934, pemimpin pergerakan yang tidak begitu radikal ditangkap. Mereka itu ialah Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Maskun, Burhanuddin, dan lain-lain. Tindakan semacam ini pada umumnya menimbulkan kekecewaan dikalangan masyarakat Indonesia. Untuk menumpas kegiatan politik, dalam tahun 1934 diadakan pengeledahan di mana-mana. Anggota PNI dan

Partindo yang berkumpul lebih dari dua orang ditangkap. Rapat-rapat pemuda dan wanita dibubarkan tanpa adanya undang-undang yang melarangnya. Setelah pemimpin-pemimpin pergerakan ditangkap, misalnya Ir. Sukarno ditangkap dan dibuang ke Flores kemudian dipindahkan ke Bengkulu, Drs. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir dibuang ke Banda dan dengan **Buisluit** tanggal 16 Nopember 1934 beberapa pemimpin PNI diasingkan ke Digul, kegiatan partainya dihentikan sama sekali, sedangkan pada tahun 1936 itu juga Partindo membubarkan diri. Suasana demikian membuat rakyat Indonesia menjadi apatis. Berbagai usaha dilakukan untuk mencegah sikap apatis ini. Antara lain Sutarjo Kartohadikusumo mengajak Sukarjo Wiryopranoto mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pembesar Belanda di Hindia Belanda di luar **Volksraad**, misalnya dengan Mr. WG Peekema (**Direktur Algemene Zaken**), tetapi tidak membawa hasil. Selanjutnya Sutarjo mengajukan tuntutan terhadap **Volksraad** minta bantuan f 25.000.000,— (dua puluh lima juta Gulden) dari Nederland, untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat, tetapi juga tidak banyak membawa perubahan. Malahan setelah mematahkan pergerakan politik yang ekstrim, Belanda mencari sasaran baru, mengurangi kekuasaan Swapraja Yogyakarta dan Surakarta, misalnya tentara kerajaan yang hanya satu Batalyon, upacara kraton, upacara adat kraton, dan lain-lain, mau dihapus. Menghadapi sikap Belanda yang makin sewenang-wenang dalam sidang **Volksraad**, Sutarjo mengecam keras, sehingga sebagian besar niat sewenang-wenang ini gagal. Dengan demikian selamatlah kekuasaan kedua swapraja itu. 11)

Dalam situasi dicekam oleh tindakan kekerasan ini, Sutarjo mencari jalan untuk membantu bangsa Indonesia mencari jalan keluar dari penindasan-penindasan ini, dengan mengajukan petisi di depan sidang **Volksraad**.

Petisi ini diajukan oleh **golongan cooperation** oleh karena **golongan non cooperation** saat itu lemah sebagai akibat tekanan-tekanan yang keras dari pemerintah Belanda. 12)

2. Petisi Sutarjo.

Guna menghadapi tekanan yang berat dari pemerintah Belanda terhadap kaum pergerakan, Sutarjo berusaha mencari jalan keluar. Direnungkan, dipikirkan, dibacanya berbagai lektur untuk mendapatkan jalan keluar yang diinginkan. Akhirnya berhasillah jalan yang dicita-citakan itu, berupa usul petisi yang diajukan kepada **Volksraad**, yang terkenal dengan sebutan **Petisi Sutarjo** karena Sutarjolah yang pertama-tama berinisiatif dan menandatangani petisi itu.

Bagaimana proses dicetuskannya petisi itu ? Mengenai hal ini Sutarjo menyatakan sebagai berikut :

Berbagai-bagai lektur saya baca berbulan-bulan lamanya akan tetapi masih saja belum mendapat petunjuk dari kecerdasan pikiran saya yang agak memuaskan. Kemudian sekonyong-konyong saya di kamar kerja rumah saya di jalan Raden Saleh 18 mendapat pikiran, bahwa bagi seorang Pangreh Praja setiap aksi yang dibenarkan oleh umum ialah kalau ia berdasarkan atas hukum. Dan sesaat itu juga tangan saya seperti ada yang menuntun. Tangan itu, sebelum berpikir banyak-banyak sudah memegang buku Himpunan Undang-Undang, yang diterbitkan oleh seorang bekas **Lid Raad van Nederlandsch Indie**, Mr. WA Engelbrecht cetakan tahun 1928. Yang saya buka ialah undang-undang yang dalam buku itu ditempatkan paling depan **Grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden** yaitu bab [hoofdstuk] pertama yang memuat aturan-aturan tentang **Van het Rijk en Zijne Inwoners** dan pasal 1 bunyinya sebagai berikut : **Het koninkrijk der Nederlanden omvat het grond gebied van Nederland, Nederlandsch Indie, Suriname en Curacao.** (Kerajaan Nederland mencakup/terdiri atas wilayah Nederland, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao 13).

Demikianlah setelah membaca buku Himpunan Undang-Undang, karangan Mr. WA Engelbrecht tersebut, tentang apa yang telah dibaca mengenai wilayah kerajaan Nederland itu kemudian dianalisa. Menurut Sutarjo, yang dimaksud dengan istilah **koninkrijk**, bukan kesatuan sosial tetapi persatuan politik yang di dalamnya tersusun dari empat bagian kesatuan hukum. Menurut pasal 2 kesatuan hukum yang pertama disebut bagian negara yang ada di Eropah (**het rijk in Eropah**), yang merupakan suatu negara (**staat**). Dengan demikian kalau ada **rijk in Eropah** maka dari ketentuan itu mengandung pengertian adanya **rijk** di luar Eropah, yaitu **Nederlandsch Indie** di Asia, Suriname dan Curacao di Amerika. Oleh karena bagian **koninkrijk der Nederlanden** yang berada di Eropah itu adalah suatu negara, maka bagian-bagian yang lain yang berada di Asia dan Amerika, bukanlah suatu kesatuan hukum yang berkedudukan administratif (propinsi), tetapi negara-negara juga seperti yang ada di Eropah. Ketika itu Sutarjo juga mengingatkan bahwa di dalam **Grondwet** tahun 1887 dan 1917 pasal 1, berbunyi : "Kerajaan Nederland mencakup/terjadi atas wilayah di Eropah beserta jajahannya dan tanah miliknya di benua-benua lain". Kedua **Grondwet** lama itu sudah jelas dalam perubahan isi fasal 1 dalam **Grondwet** baru (1922) itu jelas-jelas bermaksud hendak mengubah kedudukan **staatkundig** Nederlandsch Indie, Suriname, Curacao dari **koloni** menjadi **negara** yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, keempat negara itu kedudukan dan derajatnya adalah sama. Jadi Nederland tidak lebih tinggi dari **Nederlandsch Indie**, Nederlandsch Indie tidak lebih tinggi dari Suriname dan

Suriname tidak lebih tinggi dari Curacao. Tetapi keempat negara itu bersama-sama dibawah, menjadi bagian, dikoordinir di dalam dan oleh **het Koninkrijk der Nederlanden**. Terhadap negara inilah empat negara yang menjadi bagiannya, mempunyai kedudukan yang lebih rendah. 14)

Dengan semua **Grondwet** (Undang-Undang Dasar), menurut hukum ketatanegaraan Nederland telah membuat kesalahan-kesalahan yang prinsipil yaitu negara-negara bagian yang ada di Eropah. Kesalahan ini harus dikoreksi. Kalau tidak, **Koninkrijk der Nederlanden** akan berantakan. Keadaan politik internasional sudah berkembang yang tidak memungkinkan Nederland lebih lama mengekang bagian **Koninkrijk** yang ada di benua lain secara sewenang-wenang. Sebab Indonesia, Suriname dan Curacao mempunyai hak hidup atas bakat dan kekuatannya sendiri-sendiri. 15)

Setelah memperoleh kesimpulan demikian, Sutarjo bersama keluarga pergi ke tempat peristirahatannya (pondok) di Cimelati, Sukabumi. Dibawanya serta buku bacaan yang diperlukan. Pada saat itu keluarga Dr. Sam Ratulangie telah disana. Pondoknya berhadapan dengan pondok Sutarjo. Setelah beberapa hari mempelajari buku-buku yang diperlukan, pada suatu malam disusunlah konsep usul **Petisi** untuk dibawa ke sidang **volksraad**. Pada jam 05.00 pagi, konsep itu sudah selesai diketik. Tak lama kemudian datanglah Nyonya Ratulangie. Melihat Sutarjo sedang asyik bekerja di bawah sinar lampu minyak tanah, ia masuk ruang kerja itu lalu menegor : "Apa lagi yang sedang anda garap ?" "Diam saja," jawab Sutarjo. Kemudian dimintanya agar memanggilkan suaminya, Ratulangie. Setelah Dr. Ratulangie datang, disodorkan konsep petisi itu kepadanya. Ratulangie terperanjat setelah membaca konsep itu. Beliau bertanya : "He, dari mana kau dapatkan ini ?" Jawab Sutarjo : "Inilah baca sendiri". Kemudian disodorkan buku **Grondwet Nederland** dan kepada Ratulangie ditanyakan pendapatnya tentang isi petisi itu. Ia sangat membenarkan pendapat Sutarjo itu. Atas permintaan Sutarjo, tanpa ragu-ragu Ratulangie membubuhkan tanda tangannya dibawah tanda tangan Sutarjo. Segera Sutarjo kembali ke Jakarta, mengadakan pertemuan dengan teman-temannya anggota **Volksraad** di rumahnya. Atas permintaan Sutarjo mereka itu bersedia menandatangani usul petisi tersebut. Mereka itu ialah Kasimo dari PPKI (Perkumpulan Politik Katolik Indonesia), Lanjumin Gelar Datuk Tumenggung (Sekretaris PPBB, berasal dari Minangkabau), Mr. Ko Kwat Tiong dan SA Alatas dari front Fraksi PPBB. 16)

Mulai bulan Juni 1936 **Volksraad** mengadakan sidang membicarakan masalah anggaran belanja dan pendapatan tahun 1937. Tanggal 9 Juli 1936 Sutarjo memperoleh giliran mengucapkan pidato pada bagian Pemandangan Umum. Dalam kesempatan ini dikemukakanlah usul petisi. Petisi itu selengkapnya adalah sebagai berikut :

USUL PETISI SUTARJO. 17)

Dengan tarikh 15 Juli 1936 telah disorongkan kepada **Volksraad** usul :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dengan hormat menyorongkan usul supaya **Volksraad** dengan menggunakan hak yang diberikan kepada majelis itu dalam pasal 68 dari pada undang-undang **Indische Staadregering**, mengajukan permohonan pada Pemerintah Tinggi dan **Staten Generaal** supaya sukalah menolong daya upaya akan supaya diadakan satu sidang permusyawaratan dari wakil-wakil Nederland dan wakil-wakil Hindia Belanda, yang sidang permusyawaratan itu dengan memakai aturan hak bersamaan dengan anggota-anggotanya akan mengatur suatu rencana bagi memberikan kepada Hindia Nederland dengan jalan berangsur-angsur di dalam sepuluh tahun, ataupun di dalam yang oleh sidang permusyawaratan itu akan dianggap dapat melaksanakannya, kedudukan berdiri sendiri di dalam batas-batas pasal 1 dari pada **Grondwet**.

Sutarjo

Ratu Langie

Kasimo

Datuk Tumenggung

Ko Kwat Tiong

Alatas.

3. Berbagai tanggapan terhadap Petisi Sutarjo.

Selama dua belas hari, sejak tanggal 17 - 29 September 1936 diadakan **sidang pleno Volksraad**. Dari 60 anggota, yang hadir 46 orang. Setelah melalui perdebatan sengit, akhirnya pada sidang pleno tanggal 29 September 1936 diadakan pemungutan suara, hasilnya adalah : 26 orang menyetujui Petisi Sutarjo, sedangkan 20 orang menolak. Dengan demikian **Volksraad** menerima Petisi Sutarjo dan akan mengajukannya kepada pemerintah kerajaan Belanda di Nederland untuk mendapatkan pengesyahannya. 18) Suara-suara yang setuju dengan petisi ini dapat diperinci sebagai berikut : 19)

- a. Organisasi PPBB : Sutarjo Kartohadikusumo, Datuk Tumenggung, Prawoto, Kusumo Utoyo, Bustan, Gandasubrata.
- b. Organisasi IEV (**Indo Europeesche Verbond**) : |de Hoog, Doeve, Leonissen, White, Beets, van Ardenne, Vermuth.
- c. Golongan Nasionalis : MH Thamrin, Ratu Langie, Soongkupon, Otto Iskandardinata, Yahya, Abdul Rosyid.
- d. Golongan Timur Asing (Arab) : Alatas.
- e. Organisasi PEB (Politiek Economische Bond) : Mapuji, Sukawati, Roep.

- f. **Partai Tionghoa Indonesia** : Ko Kwat Tjong.
- g. **Organisasi Perkumpulan Politik Katolik di Indonesia** : Kasimo.
- h. Tidak berpartai : Kartowisastro.

Menghadapi petisi ini terdapat pertentangan antara dua golongan dalam fraksi Nasional. Golongan yang menyetujui tetapi dengan persyaratan tertentu, diwakili oleh Moh. Husni Thamrin. Sedangkan yang menolak ialah Sukarjo Wiryopranoto, cs. 20) Di samping itu juga masih ada suara-suara yang menyetujui yang berasal dari luar **Volksraad**, yaitu dari Persatuan Para Bupati dan para mahasiswa Indonesia di Nederland. Persatuan Bupati (**Regenten Bond**) **Sedio Mulio** diwakili oleh RAA Herman Kartowisastro. Sedangkan dari kalangan mahasiswa ialah Mahasiswa Indonesia di Nederland dan RM Notosuroto bangsawan dari keluarga Paku Alaman yang sedang belajar di Nederland. Ia juga terkenal sebagai pengarang dan penulis di surat kabar Belanda. 21)

Suara-suara yang menolak Petisi Sutarjo ada beberapa kelompok. Suara-suara itu ialah sebagai berikut : 22)

- a. **Partai CSP (Christelijk Staat Partij)** : van Lhoukhuyzen, Notosutarso, Mr. CC van Hellsdingen.
- b. **Organisasi Vaderlandsche Club** : Eekhout, Jansen, Verboom.
- c. **Organisasi PEB (Politiek Economische Bond)** : Kruyne.
- d. **Golongan Nasionalis** : Sukarjo Wiryopranoto, Ir. Moh. Noor, Wiwoho, Suroso.
- e. **Economische Groep** : Sandkujl, Weyer.
- f. **Militair deskundige** : van Kestern.
- g. Tidak berpartai (perorangan) : Sosrohadikusumo.
- h. **Ketua Volksraad** : Mr. WN van Hellsdingen.
- i. **Organisasi IEV (Indo Europeesche Verbond)** : Ny. Kozause Schultz.
- j. **Indische Katolieke Partij** : Piet Kersten, Heldebran (kecuali Kasimo).
- k. **Middenstand** : van Balen.

Di samping itu masih banyak juga suara-suara menolak petisi itu yang berasal dari luar **Volksraad**, yaitu dari pembesar-pembesar Belanda di Hindia Belanda dan Nederland. Yang berada di Hindia Belanda misalnya :

- a. **Direktur Algemene Zaken** : Mr. Peekema.
- b. **Direktur Onderwijs en Eredienst**.
- c. **Anggota-anggota Raad van Indie**.
- d. **Gubernur Jenderal** : Tuan Jonkh van Starckenborg Stachhouwer.

Sedangkan suara dari Nederland yang menolak petisi itu ialah :

- a. **Minister van Kolonien** : Tuan Welter.
- b. **Minister President** : Dr. Colijn.
- c. **Staten Generaal** (kecuali beberapa anggota). 23)

Persuratkabaran Belanda mengejek petisi Sutarjo ini dengan kata-kata sinis **Petisi Sutarjo**. Petis adalah sejenis bumbu atau lauk atau sambal yang mempunyai bau khas, dibuat dari udang atau ikan laut.

Tetapi dari kalangan persuratkabaran Indonesia banyak yang menyetujui petisi itu, antara lain surat kabar Pemandangan, Cahaya Timur, Pelita Andalas, Pewarta Deli, majalah Katolik, Suara Katolik, dan lain-lain. Oleh karena itu usul petisi ini disiarkan oleh pers secara luas, sehingga dengan cepat isi permohonan ini telah tersebar luas pula. Pada akhir September 1936 telah banyak pers yang menyetujui usul tersebut. 24)

Sambil menunggu disetujui atau ditolakny petisi tersebut, diadakan perjuangan untuk suksesnya petisi itu.

Di Indonesia sendiri diadakan penerangan dan kampanye secara besar-besaran. Gerakan ini dipelopori oleh Tabrani, menjabat sebagai Kepala Redaktur harian Pemandangan, sehingga surat kabar lainnya di Indonesia maupun Netherland menulis tentang Petisi Sutarjo. Atas saran Tabrani dibentuklah suatu Panitia Petisi Sutarjo, agar penerangan dapat dilakukan secara intensif dan terorganisir. 25) Sedangkan Haji Agus Salim yang menyetujui usul petisi itu, juga menyarankan kepada Sutarjo untuk menunjukkan bahwa petisi itu tidak bersifat meminta-minta, perlu dibentuk suatu organisasi yang berusaha mendapatkan sokongan dari tiap-tiap usul Indonesia berdiri sendiri. 26) Demikianlah maka pada tanggal 5 Oktober 1937, dibentuklah Panitia Petisi Sutarjo. Panitia Pusat Petisi Sutarjo berkedudukan di Gedung Pertemuan Rakyat di Gang Kenari Jakarta. Sebagai Ketua dipilih Sutarjo Kartohadikusumo, anggota-anggotanya Mr. Hendromartono, Atik Suwardi, Otto Iskandardinata, H.A. Salim, IJ Kasimo, Sinsu, Mr. Sartono, Lanjumin Gelar Datuk Tumenggung, SA Alatas dan Mr. Ko Kwat Tiong. Selanjutnya baik di Jawa maupun luar Jawa dibentuk panitia-panitia daerah. Di mana-mana diadakan kampanye dan mendapat sambutan luar biasa. Misalnya di Surabaya, Madura, Jakarta, Palembang, Sumatra Selatan, dan lain-lain. Pada waktu mengadakan penerangan di Jawa Timur, Sutarjo mendapat peringatan Gubernur Ch. O van der Plas, karena dianggap melampaui batas yang diizinkan. 27)

Sutarjo diperiksa oleh alat keamanan negara untuk mendapat peringatan dan ancaman dasingkan atau tindakan administratif. Tetapi berkat keunggulannya berdiplomasi dan berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Sutarjo dapat lolos dari marabahaya dan dapat melanjutkan perjuangannya ala Sutarjo. 28) Akhirnya Bung Karno dari pengasingannya di Bengkulu dengan perantaraan Moh. Husni Thamrin, dalam sepucuk suratnya menyatakan penghargaan terhadap perjuangan Pamong Praja, yang tak kenal menyerah sewaktu gerakan politik dikalangan rakyat berhasil dilumpuhkan pemerintah Belanda. 29)

Bagaimana sikap partai-partai politik dan organisasi-organisasi lain terhadap petisi Sutarjo ini ? Ada yang menyetujui tetapi ada pula yang menolak. Empat partai politik yang menolak dengan alasannya masing-masing ialah PNI Baru, PSII (Partai Serikat Islam Indonesia), Gerindo (Gerakan Indonesia) dan Parindra (Partai Indonesia Raya). Sedangkan yang menyetujui ialah PPBB, Chung Hua Hui, Group IEV, PEB, Penysadar, Pasundan, PPKI (Perhimpunan Partai Katolik Indonesia), PAI (Persatuan Arab Indonesia), Perserikatan Indonesia, Serikat Ambon, Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia, serta beberapa orang nasionalis seperti H. Agus Salim dan Mr. Sartono. 30)

4. Penolakan Petisi Sutarjo.

Setelah lebih dari dua tahun lamanya menunggu keputusan pemerintah Belanda, akhirnya datanglah putusan yang diharap-harapkan itu. Pada tanggal 16 Nopember 1938, datanglah Keputusan Kerajaan Nomer 40, yang diajukan atas nama **Volksraad** itu. Alasan penolakan itu ialah bahwa bangsa Indonesia dianggap belum matang memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri. Surat keputusan itu disampaikan kepada sidang **Volksraad** tanggal 29 Nopember 1936. Penolakan yang diambil tanpa keputusan sidang **Staten General** itu mengecewakan para pemimpin pergerakan Indonesia. Sutarjo menyatakan bahwa penolakan itu menunjukkan sikap sombong dan ceroboh pemerintah Belanda, di samping itu juga mendemonstrasikan sampai berapa jauh sebenarnya kedudukan **Volksraad** dalam pemerintahan. Sutarjo mengingatkan bahwa sikap yang diambil pemerintah Belanda terhadap petisi itu adalah keliru. Dalam perkembangan selanjutnya, pada rapat pengurus Panitia Pusat Petisi Sutarjo tanggal 11 Mei 1939 di Jakarta, panitia itu dibubarkan karena adanya keinginan membentuk Nasional Konsentrasi dan menjaga jangan sampai timbul kekecewaan dan salah paham dari masyarakat Indonesia. Penolakan ini menyadarkan kaum pergerakan bahwa kedudukan **Volksraad** itu makin lemah, maka setelah terbentuk Nasional Konsentrasi "GAPI" (Gabungan Politik Indonesia) menuntut dibentuknya parlemen yang sesungguhnya di Indonesia. 31) Semboyan GAPI ialah **Indonesia berparlemen**. Tuntutan ini sesuai dengan suasana Indonesia saat itu. Akibat penolakan petisi Sutarjo, semboyan Indonesia berparlemen lebih tegas dan jelas dari pada petisi Sutarjo, sehingga semboyan ini mendapat sambutan hangat dari rakyat. Karena **Volksraad** adalah **pseudo** (bayangan) parlemen, maka harus diganti dengan parlemen yang mempunyai wewenang sempurna, anggotanya terdiri wakil-wakil rakyat dengan perbandingan jumlahnya sesuai dengan jumlah rakyat yang diwakili. Dengan demikian kepentingan rakyat dapat diperjuangkan setelah Petisi Sutarjo ditolak. 32)

Demikianlah setelah Ratu Wilhelmina menolak petisi Sutarjo tanggal 16 Nopember 1938 lewat **Koninklijk Busluit**, tidak berarti jiwa petisi itu mati. Sepuluh tahun kemudian ternyata bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Jangka waktunya mirip dari perkiraan yang diajukan Sutarjo dalam petisinya. Walaupun setelah dua tahun dipeti es-kan di negeri Belanda, namun setelah didesak pergerakan rakyat, ternyata jawab Menteri Jajahan Welter adalah : "Orang Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri".

Menanggapi penolakan petisi ini, Mohamad Natsir berkomentar bahwa "ditolakny petisi itu justru punya arti lebih penting dari pada petisinya sendiri". Hal ini dibenarkan oleh Sutarjo karena sebagai akibat penolakan itu semangat bernegara dikalangan rakyat berkobar ! Sejak saat itu Sutarjo sendiri sikapnya semakin garang. Ia mengusulkan dalam **Volksraad** agar sebutan **Inlander** diganti **Indonesiner** dalam semua perundang-undangan. 33)

Dengan ditolakny Petisi Sutarjo itu, banyak orang Belanda yang tidak senang terhadap usul petisi itu melampiasikan ejekannya kepada Sutarjo atau keluarganya. Misalnya dalam suatu perjumpaan, ada orang Belanda yang langsung bertanya kepada Sutarjo : "Bagaimana petisimu ditolak ? Mau apa kau ? Jawab Sutarjo : "Ya, sekarang tiba gilirannya saudara Thamrin untuk bergerak !" Mendengar jawaban ini orang Belanda itu diam tak berkutik ! Rupanya nama Thamrin cukup jadi momok baginya. Kalau Sutarjo yang evolusioner saja ditolak, apa lagi yang revolusioner seperti Thamrin. Tetapi dengan menyatakan Thamrin yang kemudian mau bergerak, orang Belanda tadi menjadi takut. Terhadap Setiadi, anak Sutarjo yang pada waktu itu masih bersekolah di AMS (**Algemene Middelbare School** atau SMA zaman Belanda) bagian B di jalan Salemba Jakarta, juga tak luput dari ejekan guru-guru maupun teman-temannya orang Belanda. Katanya : "Kau mau merdeka, ya ? Apa sudah bisa merdeka ?" Jawab Setiadi : "Kenapa tidak ?" Sambung temannya yang berbangsa Belanda tadi : "Ayahmu itu bikin gara-gara saja". 34)

Sebenarnya Ratu Wilhelmina tidak menolak petisi itu. Ini terlihat dari kata-kata anggota **Volksraad** Piet Kertens yang berbisik kepada Sutarjo : "Sebenarnya Ratu berada dipihakmu !" Tanya Sutarjo : "Bagaimana engkau mengetahui ?" Jawabnya : Percayalah kepada saya". 35) Oleh karena yang menjadi Perdana Menteri adalah Dr. Colijn yang kolonialis itu, maka petisi ini ditolak ! Walaupun usul itu ditolak Ratu Wilhelmina tetapi tanggal 15 Desember 1954 Ratu Yuliana melaksanakan usul Sutarjo itu dalam bentuk **Statement voor het koninklijk der Nederlanden** tanpa Indonesia yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Demikian pula ketika Ratu Yuliana berkunjung ke Indonesia pada tahun 1971, Sutarjo diundang oleh Duta Besar Belanda di Jakarta, diperkenalkannya dengan Ratu, katanya : "Ini Tuan Sutarjo yang bikin petisi". Secara spontan Sutarjo dirangkul Ratu Yuliana. Rupanya memang Ratu, orang-orang Belanda di Nederland, maupun anggota **Volksraad** menyesal, mengapa petisi itu tidak disetujui, sehingga malahan terjadi revolusi untuk mencapai kemerdekaan, yang banyak menimbulkan korban itu. 37)

Seperti dikemukakan di depan, menjelang meletusnya Perang Dunia II, kaum pergerakan meningkatkan persatuan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan dalam perang. Atas inisiatif Perindra pada bulan Mei 1939 dibentuklah GAPI.

Tanggal 10 Mei 1940 Jerman telah menyerbu negeri Belanda, kemudian pemerintah Belanda mengumumkan keadaan darurat perang. GAPI tak banyak bersuara untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Barulah pada bulan Agustus 1940 GAPI mengajukan Resolusi kepada Gubernur Jenderal, **Volksraad**, Ratu Wilhelmina dan Kabinet Belanda yang ada di London, menurut perubahan ketatanegaraan dan adanya parlemen yang penuh pengganti **Volksraad**. Resolusi ini didukung anggota-anggota **Volksraad** seperti Wiwoho, Sutarjo Kartohadikusumo, Moh. Husni Thamrin dan kawan-kawan lainnya. Tanggal 23 Agustus 1940 datang jawaban dari Dr. HJ Levelt, bahwa belum waktunya mengadakan perubahan ketatanegaraan Indonesia. Hanya akan dibentuk suatu Komisi untuk meninjau dan mengumpulkan alasan-alasan yang terdiri para cendekiawan bangsa Belanda. Maksud Komisi ini menganalisa keinginan Indonesia dari semua tingkat mengenai susunan pemerintah. Komisi ini diketuai Dr. FR Visman maka disebut **Komisi Visman**. Semua GAPI menolak Komisi ini kemudian menerima dengan mengajukan rencana bentuk dan susunan parlemen kepada komisi ini tanggal 14 Februari 1941. 38)

Berulang kali bangsa Indonesia dikecewakan oleh jawaban pemerintah yang menolak perubahan ketatanegaraan Indonesia. Demikian halnya jawaban terhadap rencana yang diajukan GAPI kepada **Komisi Visman** ini pada bulan April 1941 tidak membawa harapan yang diinginkan. Malahan tanggal 14 Juni 1941 keluar peraturan pemerintah yang membatasi gerak politik kaum pergerakan. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan milisi bumiputra untuk disyahkan **Volksraad** pada bulan Juni 1941. Semula disambut dingin kaum pergerakan nasional, tetapi akhirnya diterima pula. Dengan adanya milisi ini justru mempererat persatuan golongan bangsa Indonesia yang ada di dalam maupun di luar **Volksraad**.

C. MENGHADAPI PENJAJAHAN JEPANG

1. Masa penjajahan Jepang.

Pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang mendarat di tiga tempat di pulau Jawa : Merak, Indramayu dan Kragan. Secara mudah pasukan Jepang menyerbu ke pedalaman, karena tidak banyak menjumpai perlawanan yang cukup berarti. Dalam menghadapi pasukan Jepang ini banyak pasukan Belanda yang menyerah atau mundur. Pasukan induknya yang berada di Bandung terkepung dan akhirnya Komandan Pasukan Hindia Belanda Jenderal Ter Porten menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati tanggal 9 Maret 1942. Pasukan Belanda yang dengan mudah dan dalam waktu singkat dapat dihancurkan oleh pasukan Jepang ini, berakibat hilangnya prestise Belanda dimata bangsa Indonesia dan kemudian bangsa Indonesia yakin apabila mereka diberi senjata tentu dapat mengalahkan Belanda seperti halnya pasukan Jepang. 39)

Kedatangan pasukan Jepang di pulau Jawa disambut baik oleh rakyat karena dianggap akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Di seluruh Jawa rakyat menyambutnya dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di samping bendera Jepang **Hinomaru** dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rakyat di Jawa percaya terhadap ramalan **Jayabaya** yang menyebutkan bahwa pulau Jawa akan diperintah orang pendek berkulit kuning selama seumur jagung (kira-kira tiga setengah bulan), sesudah itu Jawa akan merdeka. Tetapi setelah tiga setengah bulan dilewati, ternyata Jepang malahan bersikap keras. Pengibaran bendera Merah Putih dilarang, sebaliknya diwajibkan mengibarkan bendera Jepang **Hinomaru**. Dalam upacara resmi, lagu Indonesia Raya juga dilarang, rakyat hanya boleh menyanyikan lagu kebangsaan Jepang **Kimigayo**. Kegiatan partai politik dan organisasi lainnya dilarang. Gelombang pendek radio milik rakyat disegel agar tidak bisa mendengarkan siaran radio luar negeri.

Pada masa awal menancapkan kekuasaannya di Indonesia, Jepang berusaha keras menghapuskan sisa-sisa pengaruh Barat, sebaliknya dengan berbagai cara berusaha mengadakan infiltrasi kebudayaan Jepang ke dalam masyarakat Indonesia. Maksud Jepang apabila rakyat Indonesia sudah berkebudayaan Jepang, maka mudah diperintah, mudah dimintai pengabdian dan pengorbanannya untuk kepentingan perang Jepang. Oleh karena itu pemakaian bahasa Belanda dilarang keras dan berusaha diganti dengan bahasa Jepang. Tetapi dalam waktu yang singkat itu, maksud ini tidak berhasil. Terpaksa Jepang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa

resmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Selanjutnya nama-nama jalan, kota, negeri, jabatan-jabatan, angka tahun, perhitungan waktu, diganti dengan yang baru. Misalnya Batavia diganti Jakarta, tahun Masehi 1942 diganti tahun Jepang Sumera 2602, perhitungan waktu juga diganti dengan waktu Nippon.

Hal baru yang diciptakan Jepang ialah adanya kesatuan kecil **Rukun Tetangga** yang disebut **tonari gumi**. Ini untuk memudahkan penyaluran perintah, distribusi, pengerahan tenaga, pengawasan mata-mata, dan lain-lain. Kesatuan beberapa kampung disebut Kelurahan yang dalam bahasa Jepang disebut **ku**. Nama-nama jabatan yang pada zaman Belanda disebut dengan kata Jawa atau Belanda, diganti dengan kata-kata dari bahasa Jepang. Misalnya : Gubernur Jenderal = **seiko sikikan**; gubernur = **gunseikan**; residen = **sico**; bupati = **kenco**; wedana = **gunco**; camat = **sanco**; lurah = **kuco**; kepala rukun tetangga = **tonari gumico**, dan lain-lain. 40)

Sendenbu, barisan propaganda Jepang giat melakukan aktivitasnya keberbagai pelosok desa, menyebarkan kebudayaan Jepang dan semangat berperang. Latihan baris berbaris, perang-perangan diberikan kepada anak-anak sekolah. Tiap hari radio mengajarkan taiko (olah raga) dan lagu-lagu Jepang. Bulan April 1942 Jepang membentuk gerakan Tiga A yaitu **Nippon Cahaya Asia**, **Nippon Pelindung Asia** dan **Nippon Pemimpin Asia**. Ini merupakan cermin dari maksud yang sebenarnya dari Jepang sebagai penjajah. Gerakan ini tidak berhasil menarik kaum nasionalis dan kaum terpelajar. Pertengahan tahun 1942 Jepang mengalami kemunduran dalam perangnya. Dalam pertempuran di Laut Karang dan Midway kapal-kapal induk Jepang dapat dihancurkan oleh Amerika. Hal ini mempengaruhi jalannya perang Pasifik. Strategi Jepang berubah dari **offensive** (menyerang) menjadi **defensive** (bertahan) menghadapi Sekutu. 41) Strategi ini mempengaruhi kebijaksanaan politik Jepang di Indonesia. Sehingga tindakannya di bidang politik, militer dan ekonomi ditujukan untuk mempersiapkan suatu perlawanan rakyat yang luas guna menghadapi serangan Sekutu. Pemuda-pemuda Indonesia dimanfaatkan untuk usaha pertahanan Jepang. Untuk ini pada awal tahun 1943 diselenggarakan latihan-latihan kemiliteran. Kemudian dibentuk organisasi-organisasi semi militer, seperti **Keibodan** (Barisan Pembantu Polisi), **Seinendan** (Barisan Pemuda), **Gakutotai** (Barisan Pelajar), Barisan Pelopor, dan lain-lain. Selain itu juga dibentuk pasukan yang bersifat militer yang disebut **Heiho** (Pembantu Tentara). **Heiho** bersama-sama pasukan Jepang dikirim ke front terdepan seperti di Burma, Biak, dan lain-lain. Jepang membutuhkan tenaga-tenaga kasar untuk membuat proyek-proyek militer. Untuk itu dibentuk barisan **Romusha** yang dikerahkan

dari pemuda-pemuda desa yang tertipu atau dipaksa oleh Jepang. Mereka ini disanjung-sanjung sebagai **Pahlawan Pekerja** tetapi dalam kenyataannya diperlakukan sebagai budak. Di samping itu, juga dilaksanakan **kinrohshi** yaitu kerja bakti rakyat untuk tentara pendudukan yang tak dapat dihindarkan oleh siapapun.

Agar usahanya dalam pertahanan ini berhasil, Jepang mendekati rakyat dan kaum nasionalis seperti Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan lain-lain, diajak bekerjasama. Untuk menggantikan Gerakan Tiga A yang tidak berhasil dan kemudian dibubarkan, pada bulan Maret 1943 bersama-sama kaum nasionalis dibentuk **PUTERA** (Pusat Tenaga Rakyat).

Bagi Jepang organisasi ini dimaksudkan untuk mendapat dukungan rakyat Indonesia guna membantu usahanya dalam perang, tetapi oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dimanfaatkan untuk mengintensifkan cita-cita kebangsaan dikalangan rakyat. Sifatnya yang bercorak kebangsaan ini, menyebabkan **PUTERA** memperoleh dukungan luas dari rakyat. Hasil kreatif Putera yang tak dapat disangsikan lagi ialah berkembangnya kesadaran politik, terutama kesadaran dan kemauan untuk merdeka dari masyarakat Indonesia. 42)

Pada bulan September 1943, atas usul Gatot Mangkuprojo dibentuk organisasi kemiliteran yang disebut **PETA** (Pembela Tanah Air). Pembentukan organisasi ini didukung oleh **PUTERA**. Ada dua syarat dari konsepsi pembentukan **PETA**. Pertama, pasukan itu dibentuk atas dasar sukarela bagi anggotanya. Kedua, pasukan itu hanya digunakan untuk pertahanan tanah air.

Oleh karena **PUTERA** lebih banyak bermanfaat bagi kepentingan gerakan kaum nasionalis, maka organisasi ini dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk **Jawa Hokokai** (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa). Organisasi baru ini langsung dibawah **Gunseikan** (Gubernur), sedangkan Bung Karno hanya ditunjuk sebagai penasehat. Di daerah-daerah yang menjadi ketua adalah para Pamong Praja. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kontrol secara langsung dan untuk menetralsir pengaruh kaum nasionalis. 43) Walaupun demikian organisasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh kaum nasionalis untuk kepentingan perjuangan.

Untuk mendekati hati bangsa Indonesia yang beragama Islam dan untuk mendapatkan pengaruh serta dukungannya, organisasi **MIAI** (Majelis Islam Ala Indonesia) yang pada zaman Belanda dilarang, pada zaman Jepang ini diizinkan berdiri lagi. Tetapi ternyata **MIAI** tetap bersifat anti kolonialis, dengan demikian apa yang diharapkan Jepang dari organisasi ini tidak berhasil.

Keadaan perang Jepang melawan Sekutu makin suram, pulau demi pulau di Pasifik jatuh ke tangan Sekutu. Bulan Februari 1945 Philipina

jatuh ke tangan Sekutu. Ini berarti suatu ancaman terputusnya hubungan antara Indonesia dengan negara Jepang. Di mana-mana rakyat Indonesia mengalami kekecewaan sebagai akibat penindasan Jepang, sehingga di berbagai tempat terjadi pemberontakan. Misalnya pada bulan Februari 1945 terjadi pemberontakan PETA di Blitar. Dengan adanya pemberontakan-pemberontakan ini mendorong Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dan mempercepat proses janji kemerdekaan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (**Dokuritu Zyunbi Tyoosakai**) pada tanggal 29 April 1945. Walaupun badan ini dibentuk oleh Jepang, namun hasil yang dicapai bersifat nasional, tidak mencerminkan adanya pengaruh Jepang. Hal ini karena tokoh nasional yang mewakili berbagai daerah di Indonesia dalam sidang-sidang badan tersebut. Hasil terpenting yang dicapai badan ini antara lain : Rancangan UUD (1945) dan rumusan dasar filsafat negara Pancasila. Oleh karena Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini telah selesai melaksanakan penyelidikan, maka badan ini dibubarkan. Kemudian diperintahkan dibentuknya **Dokuritsu Zyunbi Iinkai** (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang pengumuman pembentukannya diadakan tanggal 14 Agustus 1945. Tugas pokok badan ini mempercepat usaha pembentukan pemerintah Indonesia merdeka. Namun dalam pelaksanaannya nanti, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 tidak melalui badan bentukan Jepang seperti yang direncanakan, melainkan proklamasi itu diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sendiri yang diwakili oleh Sukarno dan Hatta. Jepang ternyata mengingkari janji kemerdekaan yang mau diberikan kepada bangsa Indonesia.

Demikianlah secara singkat perjuangan bangsa Indonesia di zaman penjajahan Jepang.

Selanjutnya apa peranan Sutarjo dalam menghadapi penjajahan Jepang ini, dapat diikuti pada uraian di bawah ini.

2. Sumbangan Sutarjo Kartohadikusumo menghadapi penjajahan Jepang.

Pada zaman Jepang, jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan yang pada zaman Belanda hanya boleh dijabat orang-orang Belanda, oleh Jepang terpaksa diberikan kepada bangsa Indonesia, karena personilnya tidak cukup jumlahnya untuk mengisi jabatan-jabatan itu. Demikianlah Sutarjo Kartohadikusumo yang pada zaman Belanda berkecimpung dalam pamong praja dan menjadi anggota **Volksraad**, pada zaman Jepang kariernya dalam bidang kepamongprajaan, pemerintahan maupun politik diteruskan. Ada beberapa jabatan yang dipangku Sutarjo. Misalnya sebagai **Naimubu Sanyo**, anggota **Cuo Sangiin**, **Sutyokan**, anggota **PUTERA**, anggota **PPKI**, dan lain-

lain. Di samping itu banyak kegiatan yang dilakukannya baik dalam bidang sosial, budaya maupun ekonomi. Setelah berkuasa di Indonesia, Jepang berusaha mengadakan infiltrasi kebudayaan ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah agar setelah rakyat Indonesia berkebudayaan Jepang mudah diperintah dan dimintai pengabdian dan pengorbanannya untuk kepentingan perang Jepang. Berbagai cara dilakukan untuk keperluan itu.

Namun demikian Sutarjo dengan berbagai cara juga tak jemu-jemu mengajak dan mendidik rakyat Indonesia untuk percaya pada kekuatan diri sendiri, kembali berorientasi kepada kepribadiannya yang asli, lebih memperhatikan kebudayaannya sendiri, dan sebagainya. Oleh karena itu untuk ini Sutarjo menjadi anggota Panitia Adat dan Tatanegara (1942), anggota Panitia Bahasa Indonesia (1942), anggota Badan Persiapan Pergerakan Rakyat (1942) dan anggota Badan Penasehat Pusat Kebudayaan Indonesia (1943). 44) Pada tahun 1942 Jepang membentuk **Cuo Sangiin** (Dewan Rakyat) untuk menggantikan **Volksraad**, yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Jepang. Sutarjo juga menjadi anggota **Cuo Sangiin**, namun beliau mengakui bahwa dalam Dewan ini tidak ada aktivitas yang sangat penting yang dapat dikerjakan. 45) Pada tahun 1942 itu juga Sutarjo menjadi **Naimubu Sanyo** (Pimpinan Departemen Dalam Negeri). Setahun kemudian (1943) ia mendapat kesempatan memimpin Delegasi Indonesia meninjau **home front Perang Dunia** di negara Sakura.

Pada waktu meninjau ke negara Jepang ini, dunia masih diliputi suasana perang. Kapal yang ditumpangi delegasi ini juga mengangkut bahan peledak. Dalam perjalanan, tiba-tiba muncul pesawat udara Sekutu. Semua penumpang lari tunggang langgang mencari perlindungan dalam kapal ini. Untuk sekali akhirnya kapal ini berhasil mencari perlindungan di Hongkong dan selamatlah perjalanan itu sampai di Jepang. Yang menjadi obyek peninjauan adalah pemerintahan desa. Sekembalinya dari Jepang, route yang ditempuh tidak lagi melewati route waktu berangkat tetapi lewat Singapura, terus ke Indonesia. Tak henti-hentinya Sutarjo maupun keluarga yang ada di rumah berdoa untuk keselamatan dalam perjalanan tugas ini. 46)

Pada suatu rapat di rumah pegawai tinggi Jepang di Jakarta (sekarang di jalan Diponegoro), Sutarjo mengemukakan pendiriannya tentang kedudukan dan fungsi **Corps Pamongpraja**. Dalam rapat itu kaum pergerakan mengusulkan agar pamongpraja dihapuskan karena dipandang berbau feodal. Dalam kesempatan ini Sutarjo sebagai Korps Pamongpraja mengemukakan pendiriannya, boleh saja **corps** itu dihapus tetapi harus diganti dengan aparatur yang nilainya lebih baik dari pamongpraja. Menanggapi maksud ini Bung Hatta yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan bahwa untuk merubah **corps** tersebut harus berhati-hati sekali. Rupanya saran

Bung Hatta ini diperhatikan oleh pemerintah militer Jepang. Setelah berkuasa di Jawa sekitar satu tahun, **corps Pamongpraja** ini tidak dikurangi atau dihapuskan fungsinya, malahan diperluas. Tahun 1943 jabatan **syucokan** (Residen) dan **fuku syucokan** (wakil residen) di beberapa daerah dipercayakan kepada fungsionaris bangsa Indonesia. Jabatan asisten residen dan **controleur** di kabupaten dihapus, sehingga bupati berkuasa penuh dibawah pengawasan **syucokan**. Demikian pula wedana dan asisten wedana kedudukannya juga bertambah kuat. 47)

Demikianlah pada tahun 1943 Sutarjo diangkat menjadi **syucokan (residen)** untuk daerah karesidenan Jakarta.

Pada waktu itu tidak banyak tokoh bangsa Indonesia yang mendapat jabatan tinggi dalam pemerintahan. Untuk jabatan **syucokan** ini, hanya tiga tokoh yang ditunjuk. Mereka itu ialah Suryo bekas bupati [**regent**] diangkat menjadi residen Bojonegoro, Raden Panji Suroso pemimpin Pergerakan Nasional menjadi residen Kedu dan Sutarjo Kartohadikusumo menjadi residen Jakarta, tidak termasuk Kota Istimewa Jakarta. 48)

Sebagai residen, yang pertama-tama diusahakan Sutarjo adalah menertibkan distribusi beras didaerahnya. Sutarjo menghendaki agar beras tidak boleh seluruhnya dikuasai Cina. Sejak mulai menanam sampai menjemur gabah harus berada di tangan rakyat desa atau petani. Orang-orang Cina hanya boleh menggiling saja. Sedangkan mengenai pendistribusiannya, Sutarjo lebih banyak membela atau membantu untuk kepentingan rakyat daripada untuk Jepang. Hal ini terlihat pada waktu Jepang mengangkut beras dari Krawang ke Jakarta. Pada waktu Jepang mengangkut produksi beras Krawang ke Jakarta ini, Sutarjo berusaha menyetopnya. Ia mendatangi Markas Besar Jepang. Kepada pihak Jepang Sutarjo menyatakan : "Tuan mau menang dalam perang dengan bantuan rakyat atau menghendaki agar rakyat memberontak karena lapar, sebab beras tuan angkuti ?" Setelah mendengar pernyataan Sutarjo ini, pihak Jepang mengambil keputusan untuk mengurangi pengangkutan beras. Sebagian diangkut dan sebagian ditinggalkan. Dengan demikian rakyat terhindar dari bahaya mati kelaparan. 49)

Tahun 1943 ketika dibentuk **PUTERA**, Sutarjo menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan organisasi yang bersifat kebangsaan ini. Tanggal 14 Agustus 1945, tiga hari sebelum proklamasi kemerdekaan, pemerintah **Dai Nippon** mengumumkan dibentuknya PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Panitia ini diketuai oleh Ir. Sukarno, sedangkan Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya. Dalam organisasi ini Sutarjo menjabat sebagai anggota.

Secara lengkap anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini adalah sebagai berikut : Anggota-anggota dari Jawa : Rajiman Wedyadinigrat, Otto Iskandardinata, Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Suryohamijoyo, Puruboyo Sutarjo Kartohadikusumo, Suroso, Supomo, Abdul Kadir, Yap Cwan Bing. Anggota-anggota dari Sumatra : Moh. Amir, Teuku Moh. Hasan, Abdul Abbas. Sedangkan anggota yang berasal dari daerah Angkatan Laut : Ratulangie, Andi Pangeran, AA Hamidan, I Gusti Kutu Puce dan Latuharhary. 50) Walaupun anggota PPKI ini diangkat oleh Jepang, tetapi pada umumnya mereka ini adalah tokoh-tokoh pergerakan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Suara mereka merupakan suara dan cita-cita rakyat setempat. Mereka merupakan lambang persatuan seluruh Indonesia. Rasa persatuan ini sangat penting untuk melaksanakan Revolusi Nasional. Mereka berpendapat bahwa revolusi itu tidak ditujukan kepada Jepang yang sudah masuk zaman lampau, tetapi terhadap Belanda yang mau menjajah kembali Indonesia.

Pada saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan pemuda. Yang termasuk golongan tua seperti Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Akhmad Subarjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Dr. Samsi, Dr. Buntaran, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk golongan pemuda misalnya : Sukarni, Khairul Saleh, Wikana, Adam Malik, Sayuti Melik, BM Diah, Maruto Nitimiharjo, dan lain-lain. Golongan tua bersikap hati-hati penuh perhitungan, sudah banyak berpengalaman dalam perjuangan, sudah berkeluarga, usia mereka telah lebih dari empat puluh tahun, mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan atau masyarakat. Sikap golongan tua ini menimbulkan ketidak sabaran golongan pemuda. Golongan tua menghendaki pengumuman kemerdekaan Indonesia merupakan kelanjutan janji kemerdekaan yang diberikan Jepang. Hal ini untuk menghindari bentrokan dengan Jepang yang masih bersenjata lengkap. Pengumuman itu harus ditetapkan oleh PPKI. Karena anggota PPKI ini dianggap mewakili rakyat dari berbagai daerah Indonesia, merupakan lambang persatuan Indonesia.

Golongan tua berpendapat, revolusi tidak ditujukan kepada Jepang yang sudah memasuki zaman lampau, melainkan ditujukan terhadap Belanda yang mau menjajah kembali ke Indonesia.

Sedangkan golongan pemuda menghendaki pengumuman kemerdekaan itu harus segera dilakukan, lepas dari campur tangan dan hubungan dengan badan yang dibentuk Jepang seperti PPKI, agar dunia luar tidak mengancam bahwa negara Indonesia yang merdeka itu adalah ciptaan Jepang. Mereka menghendaki proklamasi dilakukan secara revolusioner, harus direbut dari tangan Jepang kalau perlu dengan cara kekerasan. Mereka ini menghendaki

agar Bung Karno sendiri yang mengumumkan kemerdekaan ke seluruh dunia lewat radio, bahwa Indonesia telah merebut kekuasaan dari tangan Jepang.

Di samping kedua golongan itu, masih ada satu golongan lagi yang dipimpin oleh Sutan Syahrir. Kelompok ini semula tergabung dalam kelompok pemuda, tetapi kemudian memisahkan diri karena tak menyetujui tindakan Sukarni dan teman-temannya yang dianggap menjerus kearah **choos** dan **anarchi**. Tetapi mereka juga tak setuju pendirian Sukarno - Hatta yang dipandang tidak anti Jepang.

Dalam menghadapi proklamasi kemerdekaan, mereka ini bersikap menanti dan tidak ikut mengambil bagian dalam kegiatan proklamasi kemerdekaan itu. 51)

Oleh karena tidak sabar lagi menunggu tindakan golongan tua, maka golongan pemuda mau mengadakan proklamasi sendiri dan merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Untuk ini Bung Karno dan Bung Hatta harus disingkirkan ke luar kota agar kedua tokoh itu tidak digunakan oleh Jepang untuk menindas dan menghalang-halangi proklamasi itu. Demikianlah maka pada tanggal 16 Agustus 1945, jam 04.00 pagi sekelompok pemuda di bawah pimpinan Sukarni membawa Bung Karno dan keluarganya serta Bung Hatta ke Rengasdengklok, suatu kota kecil sebelah utara Krawang. Sehari sebelumnya pasukan Peta di bawah pimpinan **Shodanco** Umar Bakhsan telah melakukan perebutan kekuasaan dari tangan Jepang di Rengasdengklok. Sebenarnya tanggal 15 Agustus 1945 setelah mengetahui Jepang menyerah kepada Sekutu, Bung Karno dan Bung Hatta mengundang PPKI untuk bersidang tanggal 16 Agustus 1945 jam 10.00 pagi. Namun kedua tokoh itu telah didahului diculik pemuda pada pagi hari tanggal tersebut. Sehingga pertemuan itu gagal, karena yang mengundang tak ada di tempat.

Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, sebagai **syucokan** Sutarjo meninjau penggilingan padi rakyat yang dikerjakan dipenggilingan Tionghoa di Rengasdengklok, Cimalaya dan Cikampek. Jam 09.30 Sutarjo tiba di kawedanan Rengasdengklok. Wedana Rengasdengklok minta agar Sutarjo singah di Markas **Cudanco** PETA. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, **Cudanco** tidak tampak juga, maka Sutarjo mau kembali ke Jakarta menghadiri rapat PPKI. Dengan perkataan terputus-putus Bintara PETA mengatakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di Rengasdengklok. Atas permintaan Sutarjo, beliau diantar ke rumah seorang Tionghoa tempat Bung Karno dan Bung Hatta di **interneer** (ditawan). Kedatangannya disambut baik oleh kedua tokoh itu serta Ibu Fatmawati. Mereka menceriterakan bahwa tadi malam dibawa pemuda kesitu, tak tahu apa

maksudnya. Mereka bersenda gurau dengan berbaring di balai-balai yang tikarnya cukup bersih. Siang harinya datang perwira-perwira PETA, Bupati Purwakarta dan Wedana kesitu. Berjalan paling depan adalah **Daidanco** Purwakarta Setiadi Kartohadikusumo yang telah dikenal Sutarjo. Kedatangan mereka disambut gembira para tawanan, kemudian Sutarjo bertanya : "Macam apa ini orang tua dibikin mainan macam ini". Jawab **Daidanco** dengan berbisik : "Kami ini hari memberontak menuntut kemerdekaan. Orang-orang Jepang dalam daerah kami sudah kami tangkapi semua". Tanya Sutarjo : "Sampai kapan kami ditahan di sini ?" Jawabnya : "Dimohon kesabaran Bapak-Bapak dan Ibu, supaya suka istirahat di sini dulu sampai tugas kami selesai. Segera kalau sudah selesai, kami akan ngaturi khabar". Setelah **Daidanco** dan rombongan pergi, mereka berempat bersenda gurau lagi, bergembira, bersabar hati sambil menunggu apa yang akan terjadi. Sore harinya Sutarjo mohon diri ke Kawedanan, membicarakan pekerjaan yang terbengkelai pada hari itu. 52)

Bung Karno dan Bung Hatta mengatakan selama sehari di Rengasdengklok itu tidak terjadi apa-apa, tidak ada pembicaraan dan tidak ada proklamasi dari pemuda. Sukarni dan kawan-kawannya hanya menyertai dan mengawasi mereka. Bung Hatta dalam bukunya Sekitar Proklamasi menyatakan bahwa sebagai akibat pengasingan di Rengasdengklok, sidang PPKI yang direncanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi hari itu terbengkelai. Ketika minta izin kepada Jepang pada malam harinya, Jepang telah berubah pendirian dan menolaknya. 53) Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 itu Akhmad Subarjo mencari Bung Karno - Bung Hatta tidak ketemu, setelah menghubungi Wikana dari pihak pemuda, akhirnya tahu di mana kedua tokoh itu berada. Pihak pemuda mau memberitahukan tempat kedua tokoh itu disingkirkan, asal Mr. Subarjo mau mendesaknya agar proklamasi segera diumumkan. Sore hari rombongan Mr. A. Subarjo sampai di Rengasdengklok menjemput kedua tokoh itu. Rombongan tiba kembali di Jakarta sudah menjelang tengah malam.

Sutarjo Kartohadikusumo yang sudah seharian berada di Rengasdengklok, ikut kembali bersama-sama rombongan ini menuju ke tempat kediaman Bung Karno di Pegangsaan Timur no. 56. Subarjo mengatakan, sebaiknya Sutarjo pulang kembali ke rumah dulu untuk menunggu khabar lebih lanjut. Pada tengah malam Sutarjo ditilpon. Atas permintaan Bung Karno, Sutarjo langsung menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda di jalan Imam Bonjol. Sesampai di tempat itu sudah banyak orang berkumpul membicarakan penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 54) Sukarno - Hatta menghubungi **Gunseikan** minta agar bersikap netral dalam menghadapi proklamasi kemerdekaan Indonesia, ternyata mengalami kegagalan. Jepang telah terikat dengan syarat penyerahan kepada Sekutu

untuk mengembalikan Indonesia ke **status quo** sebelum Perang Dunia II. Dengan demikian bantuan dan janji kemerdekaan yang diberikan Jepang tak dapat diharapkan lagi. Kini Jepang hanya sebagai polisi sekutu yang ditugaskan memelihara keamanan dan status quo tersebut.

Dengan demikian persoalannya menjadi jelas bahwa bangsa Indonesia harus mencari jalan sendiri untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaannya, tidak lagi menurut rencana kerjasama dengan Jepang. Suatu revolusi tanpa pertumpahan darah tidak mungkin lagi bisa dihindarkan.

Pada jam 03.00 dini hari tanggal 17 Agustus 1945, tokoh-tokoh, anggota-anggota PPKI, pemimpin-pemimpin pemuda, pemimpin pergerakan, serta anggota-anggota **Cuo Sangi In** yang berada di Jakarta, berkumpul di rumah Laksamana Muda Laut Tadasi Maeda di jalan Imam Bonjol nomer satu Jakarta, membicarakan penyusunan teks Proklamasi. Mereka berkumpul di sini karena di rumah itu dipandang aman dan Maeda juga bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Sukarno, Hatta, Akhmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik mengambil tempat tersendiri di ruang tamu kecil merumuskan naskah tersebut, sedangkan yang lain berada di ruangan lain atau serambi dan jalan. Setelah teks proklamasi itu mendapat persetujuan yang hadir, ditentukan agar mereka berkumpul lagi pada esok harinya tanggal 17 Agustus 1945 di tempat kediaman Bung Karno jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, untuk menghadiri upacara Proklamasi Kemerdekaan yang diselenggarakan jam 10.00 pagi.

Tepat pada waktu yang telah ditentukan itu dilaksanakanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks yang telah ditanda tangani Sukarno - Hatta itu dibacakan oleh Bung Karno, yang kemudian tersiar keseluruh tanah air dan dunia.

Di mana-mana dipelosok tanah air proklamasi itu disambut rakyat secara gegap gempita. Sejak saat itu bangsa Indonesia menyatakan dirinya bebas dari penjajahan.

Proklamasi itu tak lagi sesuai dengan rencana golongan tua lewat PPKI, tetapi juga tidak sesuai dengan rencana pemuda. Akhirnya kedua unsur serta pejuang-pejuang yang lain, berkumpul bersama untuk menyatakan keinginan itu. Tepatlah ungkapan yang mengatakan : "**Man propoces, God desposes**". "Manusia bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan".

Demikianlah sumbangan Sutarjo dalam perjuangan menghadapi penjajahan Jepang.

Selanjutnya di bawah ini adalah perjuangannya dibidang kesejahteraan rakyat, sosial dan budaya.

D. PERJUANGANNYA DIBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL, DAN BUDAYA

Di samping bidang politik, Sutarjo juga mempunyai andil dalam perjuangan dibidang kesejahteraan rakyat, sosial maupun budaya. Untuk membantu memajukan kesejahteraan rakyat, banyak jabatan yang dipangkunya, misalnya duduk diberbagai kepengurusan yang ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan itu. Seperti menjadi Ketua Pengurus Besar POMER [**Perhimpoean Oentoek Memadjoekan Ekonomi Rakyat**], yang dijabat sejak tahun 1937-1942, Ketua Panitia Penentang Penghematan Pengajaran bagi bangsa Indonesia (1935 - 1936); Anggota Pengurus **Stichting Fonds voor Klein Nijverheid** (1936 - 1942); Anggota **Eere Commiltee Tentoonstelling** di Nagoya Jepang tahun 1937, dan lain-lain. Pada waktu POMER didirikan mendapat sambutan yang baik dari kepala-kepala daerah bangsa Belanda maupun Indonesia, terutama di luar Jawa.

Pada tahun 1936 ketika menjadi anggota **College van Gedelegeerde Volksraad**, Sutarjo mengajukan tuntutan kepada Nederland agar memberi sumbangan kepada Indonesia sekurang-kurangnya 25 ribu gulden. Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit pada waktu itu. Uang ini digunakan untuk membangun ekonomi rakyat desa, yang pada waktu itu sangat parah. Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda berpendirian bahwa seorang Indonesia cukup hidup dengan segobang (dua setengah sen) sehari. Semula Minister Presiden Nederland, Dr. H. Colijn menentang keras tuntutan itu dengan kata-kata yang terkenal diseluruh Indonesia yaitu "**Geen cent voor Nederlands Indie**" (Tak satu senpun buat Hindia Belanda). Tetapi dengan adanya perdebatan keras di **Volksraad**, maka pemerintah Nederland tunduk kepada keputusan **Volksraad**. Dana itu kemudian untuk membangun irigasi di daerah Cirebon dan Banyumas, memperbaiki peternakan di Madura, memajukan industri, memberantas penyakit rakyat, mendirikan sekolah-sekolah rakyat dan lain-lainnya. 55) Sebenarnya sebagai anggota **Volksraad**, gaji Sutarjo sudah lebih dari cukup untuk membina kesejahteraan keluarganya. Pada waktu itu gajinya telah mencapai 2000 gulden. Tidak banyak orang Indonesia yang menerima gaji sebesar itu. 56) Walaupun demikian, hati nuraninya terpanggil untuk ikut memperjuangkan keadaan rakyat yang serba kekurangan itu.

Untuk ikut memperjuangkan kesejahteraan rakyat ini pula, pada tahun 1940 Sutarjo mendirikan bank yang diberi nama **Sutarjo Bank** yang berlangsung dari tahun 1940 - 1943. 57) Pada awal mulanya prakarsa mendirikan bank ini setelah Sutarjo selesai bertugas sebagai ketua PPBB. Teman-temannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Sutarjo, diwujudkan dalam bentuk

uang. Uang ini dihimpun dari para pegawai pamongpraja. Oleh Sutarjo, uang yang diterimanya ini dimanfaatkan untuk menolong para pegawai. Caranya ialah dengan membentuk suatu bank yang kemudian diberi nama Sutarjo Bank itu. 58) Selain memberi pinjaman, bank ini juga menerima simpanan dari para pegawai. Sehingga merupakan bank simpan pinjam. Tujuan pendirian bank ini terutama untuk membantu meringankan beban pegawai. Prioritas pinjaman terutama untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti membeli : rumah, sepeda, alat untuk meringankan pekerjaan atau untuk modal usaha seperti mesin ketik, mesin jahit, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya peminjaman juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti membeli obat-obatan, menolong kebutuhan sehari-hari, memberi modal penjual jamu seperti KIK (**Kredit Investasi Kecil**), mengurus pensiun pegawai dengan biaya administrasi yang ringan, dan lain-lain. 59) Kantor pusat Sutarjo Bank ini berkedudukan di jalan Raden Saleh 18 Jakarta. Direktornya dijabat oleh Sutarjo, Sekretaris Direktur Setiajid, pengurus lainnya Mr. Abdul Wahab. 60) Bank ini cukup banyak menolong pegawai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun dengan adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada zaman Jepang, terpaksa bank ini dibubarkan tahun 1943.

Pada tahun 1950 Sutarjo berinisiatif mendirikan bank lagi. Bank ini diberi nama Bank Pegawai dan Sutarjo bertindak sebagai Presiden Direktur. Kantor Pusat bank ini berada di Jakarta, sedangkan cabang-cabangnya dibuka di beberapa kota besar di Jawa, seperti Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Magelang, Semarang. Bank ini merupakan bank swasta tetapi bekerja sama dengan pemerintah (Departemen Keuangan), yang membantu menanamkan saham-sahamnya. Bahkan saham yang terbesar adalah dari pemerintah. Tujuan didirikannya bank ini ialah untuk membantu pegawai negeri atau pensiunan, meningkatkan kesejahteraannya atau menolong mereka yang mengalami kesulitan ekonomi rumah tangga. Lebih dari sepuluh tahun lamanya bank ini mengalami kemajuan dan banyak menolong rakyat.

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, pada suatu ketika pemerintah menghentikan bantuannya kepada semua bank swasta. Semua kredit untuk bank swasta dihentikan. Dengan demikian Bank Pegawai harus mencari modal sendiri. Untuk ini ditempuh jalan dengan mencari modal kepihak swasta. Pemerintah kemudian menjual saham-sahamnya kepada swasta, sehingga Bank Pegawai lebih dikuasai oleh swasta yang punya modal besar. Dalam perkembangan selanjutnya bank ini kemudian berganti nama menjadi **Bank Bumi Arta**. Sudah barang tentu operasionalnya tidak semata-mata ditujukan untuk menolong pegawai, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas lagi. 61)

Menjelang pembubaran Bank Pegawai ini, cabang-cabangnya yang berada di Jakarta, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Magelang dan Semarang mulai dijual ke pihak swasta, terutama kepada Cina. Walaupun demikian pegawai-pegawainya masih tetap setia bekerja di bank ini sampai menjelang pembubarannya, walaupun hanya digaji besarnya kira-kira sepertiga dari gaji pegawai bank lain. 62)

Setelah pensiun kegiatan Sutarjo ditujukan untuk membenahi organisasi pensiunan pegawai negeri. Dari tahun 1961 - 1965 Sutarjo terpilih menjadi Ketua Dewan Presidium Persatuan Pensiunan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini beliau berusaha mempersatukan semua organisasi pensiunan yang ada.

Pada tahun 1961 Sutarjo berhasil merealisasikan keinginan itu, yaitu mempersatukan sekitar 20 organisasi pensiunan pegawai negeri yang diberi nama PPPRI (Persatuan Pensiunan Pegawai Republik Indonesia). Selanjutnya Sutarjo menganjurkan untuk mengubah istilah **pensiunan** menjadi **wredatama**. Wreda berarti orang tua, tama adalah utama. Istilah ini kemudian cepat menjadi populer. Dalam Konggres PPRI di Bandung tahun 1965, penggunaan istilah tersebut diterima. Sehingga istilah PPPRI diubah menjadi PWRI (**Persatuan Wredatama Republik Indonesia**). Istilah ini selanjutnya dipakai terus sampai sekarang. 63)

Untuk ikut membantu memikirkan mencapai kemajuan taraf hidup rakyat, Sutarjo menulis diberbagai majalah, brosur, surat kabar atau penerbitan buku. Beberapa buku yang telah diterbitkan dari hasil karya Sutarjo yang berhubungan dengan hal itu, antara lain : **Mengangkat Rakyat Jelata** (1946), **Membangun Masyarakat Murba** (1947), **Desa** (1953), dan lain-lain.

Sedangkan setelah beliau pensiun, masih juga membantu memikirkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat dilapisan bawah.

Untuk ini ada beberapa masalah aktual dan menarik, seperti yang dikemukakannya dalam wawancara dengan Klarawijaya wartawan majalah Tempo bulan Desember 1976, beberapa saat sebelum beliau wafat. Secara singkat pandangannya adalah sebagai berikut : Rakyat terbanyak, lebih dari 80% masih tetap melarat dan menderita karena politik pembangunan nasional yang salah. Untuk ketahanan nasional politik pembangunan yang salah itu harus segera diubah. Untuk ini pimpinan harus ditaruh ditangan tenaga muda yang ahli dan bersih. Pembangunan apa saja harus dimulai dari bawah. Yang penting pembangunan desa. Dalam waktu singkat pembangunan desa akan efektif kalau dilaksanakan lewat daerah otonomi tingkat III yang dulu disebut **desa moco pat** dan **desa moco llmo**, yang

kemudian diubah menjadi **onderdistrik** (kecamatan). Pada tahun 1960 prinsip Daswati III ini sudah disetujui MPRS, tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Desa satu persatu menjadi lemah sangat lamban kemajuannya. Demikian pendapat Sutarjo. 64)

Dalam bidang sosial, ada beberapa sumbangan Sutarjo yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Misalnya bidang sport atau olah raga, pemerintahan desa, Palang Merah Indonesia. Dalam bidang sport, Sutarjo pernah membentuk persatuan olah raga nasional yang pertama kali di Indonesia. Bahkan ia duduk sebagai Ketua organisasi yang didirikannya itu, yang diberi nama ISI (**Ikatan Sport Indonesia**). Sutarjo menjadi Ketua Pengurus Besar organisasi itu sejak tahun 1937 - 1943. Organisasi ini didirikan di tempat kediamannya jalan Raden Saleh 18 Jakarta dan menghimpun semua cabang olah raga yang ada. 65) Menghadapi berdirinya organisasi ini, Belanda tidak dapat berbuat apa-apa karena organisasi ini bukan organisasi politik.

Diantara cabang olah raga yang digemari sejak bersekolah di **OSVIA** Magelang tahun 1908 ialah sepakbola.

Pada waktu itu Sutarjo telah menjadi Ketua Perhimpunan Sport cabang Sepakbola di **OSVIA** Magelang. Kawan-kawannya yang ikut dalam cabang olah raga ini antara lain : Supardi (Prof, Dr), Urip Sumohardjo (Jenderal) dan beberapa lainnya yang di kemudian hari banyak yang menjabat sebagai Bupati. Kostum atau pakaian seragam kesebelasan yang dipimpin Sutarjo ini agak unik. Tutup kepala berupa **blangkong** (tutup kepala model Jawa), kaos putih lengan panjang bergaris warna gelap, celana putih yang panjangnya sampai bawah lutut, memakai ikat pinggang. 66)

Setelah ISI terbentuk, di Jakarta pernah diadakan **POR (Pekan Olah Raga)** Nasional yang pertama. Selain Sutarjo, yang memegang peranan penting dalam POR ini ialah Hendarmin (Prof. Dr.), Kuncoro Purbopranoto (Prof. Mr.). Hobby Sutarjo yang lain di bidang sport adalah menunggang kuda, berjalan kaki atau lari, **treksandow**, dan lain-lain.

Perhatian Sutarjo yang lain di bidang sosial ialah keadaan masyarakat desa. Salah satu karyanya yang berhubungan dengan masyarakat desa dituangkan dalam bukunya yang berjudul **Desa**. Pada tahun 1949 Sutarjo mengemukakan buah pikirannya di depan sidang DPA (**Dewan Pertimbangan Agung**) yang bersifat terbuka. Dalam sidang ini Sutarjo menguraikan tentang lembaga adat, demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem kekeluargaan dan gotong royong, semangat keadilan sosial, budaya dan lain-lain. Pemerintah minta agar uraiannya itu dihimpun dan dibukukan. Maksud itu akhirnya menjadi kenyataan, terbitlah untuk pertama kalinya buku yang memuat buah pikiran Sutarjo itu tahun 1953 berjudul **Desa**.

Pada tahun 1956 Menteri PP dan K (Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan) Sarino Mangunpranoto, menyatakan buku yang berjudul *Desa* itu dipandang tepat dan bernilai tinggi, maka ditetapkan sebagai pedoman untuk kuliah-kuliah dalam Ilmu Tata Desa pada Universitas Pejajaran dan IKIP Bandung. Dari uraian ini terkesan bahwa Sutarjo adalah ahli Ilmu Kemasyarakatan dan beliau berusaha mengetrapkannya untuk menaikkan taraf hidup rakyat di tanah airnya, sehingga pada tanggal 28 Januari 1967 memperoleh gelar **Doctor Honoris Causa** Ilmu Pendidikan bidang Pendidikan Masyarakat dari IKIP Negeri Bandung. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto, ini merupakan penghargaan yang tepat untuk Sutarjo. 67) Sedangkan menurut Pak Diro (Sudiro), buku *Desa* itu menunjukkan bahwa pengetahuan Sutarjo tentang Desa sangat luas dan mendalam. Menurut Sutarjo sendiri buku tersebut pantas untuk - "**Standaardwerk**" (buku pegangan) bagi pamongpraja, terutama para lurah. 68) Buku ini telah dicetak dua kali yaitu pada tahun 1953 dan 1965.

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri dalam suratnya kepada putra almarhum Sutarjo yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo tanggal 9 Nopember 1976, menyatakan menyambut baik penerbitan ulang buku *Desa* tersebut, karena dipandang sangat penting untuk memahami dan mendalami pengetahuan tentang desa di seluruh tanah air. Tetapi dengan sedikit perubahan terutama tentang Daerah Otonomi Tingkat III, yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomer 5 tahun 1974. Di samping itu ejaannya harus disesuaikan dengan ejaan baru. Demikian tanggapan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Akhmadi. 69)

Pada waktu tentara Belanda menduduki Ibu Kota RI Yogyakarta tahun 1949, Sutarjo mempunyai peranan penting sebagai **Ketua Central Komite Palang Merah Indonesia** menggantikan Bung Hatta, karena beliau bersama Bung Karno diasingkan Belanda ke Sumatra.

Pada waktu itu Sutarjo selaku Ketua berkali-kali didesak oleh Pemerintah Militer Pendudukan agar PMI digabungkan dengan **Het Nederlandsche Rode Kruis** (Palang Merah Belanda). Setelah diadakan perdebatan selama dua jam, akhirnya utusan Belanda itu kembali ke Jakarta dengan tangan hampa. PMI yang menjadi lambang kemerdekaan RI tetap ada dan dapat meneruskan tugasnya membantu para pejuang, berupa bahan makanan maupun obat-obatan di garis depan. Ini dirasakan Belanda sebagai duri dalam daging pihak Sekutu Inggris - Belanda. 70)

Mengenai pemaksaan pihak Belanda agar PMI digabungkan dengan Palang Merah Belanda ini, peristiwanya adalah sebagai berikut : Pada suatu hari datanglah rombongan Palang Merah Belanda di Yogyakarta, diketuai oleh

Ny. Ramoer istri Gubernur Sekretaris Belanda yang telah dikenal Sutarjo. Kedatangannya dibantu oleh seorang Gurubesar (Profesor) bangsa Indonesia, dua orang jurist (ahli hukum) dan seorang Dokter Belanda. Sutarjo dipanggil agar datang ke kantor tentara Belanda di jalan Tugu Kidul dan tidak boleh membawa pembantu. Selama dua jam Sutarjo dipaksa oleh lima orang petugas Belanda itu untuk menyetujui penggabungan PMI dengan Palang Merah Nederland, disertai ancaman akan dilakukan sanksi militer. Dalam perdebatan satu lawan lima itu, keputusan Belanda itu akhirnya kembali ke Jakarta tanpa membawa hasil yang diharapkan. 71)

Tetapi lain hari Sutarjo dipanggil ke markas tentara Belanda di jalan Gondokusuman. Di sini ia harus berhadapan dengan komandan tentara Belanda dan **Residen Belanda Stock**. Ia dipaksa menyerahkan PMI kepada Palang Merah Belanda dengan ancaman tindakan militer. Ternyata paksaan ini juga gagal, akhirnya PMI tetap dapat meneruskan tugasnya membantu para pejuang di garis depan, berupa makanan, pakaian, obat-obatan. Selama berdirinya PMI itu, Sutarjo tak pernah absen ikut berjuang menegakkan wibawa Negara Republik Indonesia selama pendudukan tentara Inggris - Belanda di Yogyakarta. 72)

Demikianlah beberapa sumbangan Sutarjo di bidang sosial, baik pada masa perjuangan menghadapi penjajahan maupun setelah proklamasi kemerdekaan. Di samping itu masih ada pula sumbangan Sutarjo dalam bidang budaya, misalnya tentang siaran radio, karya tulis, penerbitan majalah, seperti diungkapkan di bawah ini.

Pada tahun 1937 Sutarjo mendirikan PPRK (**Perikatan Perhimpunan Radio Ketimuran**) seluruh Indonesia. Beliau kemudian dipilih menjadi Ketua Pengurus Besar PPRK, yang dijabatnya sejak tahun 1937 - 1943. PPRK adalah organisasi radio nasional yang pertama di Indonesia, yang berhasil membebaskan pengaruh dan pengawasan organisasi radio Belanda NIROM (**Nederlands Indische Radio Omroep**) terhadap siaran-siaran ketimuran, yaitu siaran radio untuk bangsa Indonesia guna mengembangkan kebudayaan nasional.

Pada waktu itu siaran radio yang pertama-tama lahir di Hindia Belanda adalah yang diselenggarakan oleh BRV (**Bataviasche Radiovereniging**) yang didirikan tanggal 16 Juni 1925. Lima tahun kemudian (1930) berdiri perkumpulan NIROM. Dalam perkembangan selanjutnya NIROM ini yang diberi lisensi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan siaran dan merupakan saluran siaran pemerintah. NIROM yang bersifat perusahaan itu lebih banyak mengejar untung yang tidak kecil, berusaha memonopoli penyiaran dan berusaha menyingkirkan perkumpulan radio lainnya, terutama radio ketimuran. 73)

Menghadapi sikap NIROM dan karena dipengaruhi semangat nasional yang telah berkobar sejak tahun 1908, lahirlah perkumpulan-perkumpulan radio swasta nasional. Misalnya : SR (**Solose Radio Vereniging**) di Solo tanggal 1 April 1933 yang diprakarsai oleh SP. Mangkunegoro VII, yang ketuanya dijabat oleh Ir. Sarsito Mangunkusumo. Di Jakarta berdiri VORO (**Vereniging voor Oosterse Radio Omroep**) tahun 1934. Di Bandung VORL (**Vereniging Oosterse Radio Luisteraars**) pada tahun 1934, Di Surabaya berdiri VORS yang kemudian menjadi CIRVO (**Chinese en Inheemse Radio Vereniging Oost Java**). Di Madiun berdiri EMRO (**Eerste Madiunse Radio Omroep**). Sedangkan pada tahun 1936 di Semarang didirikan Radio Semarang dan tahun 1934 di Solo berdiri lagi SRI (**Siaran Radio Indonesia**) yang dipimpin oleh Mulyadi Joyomartono. 74)

NIROM yang bersandar kepada kekuatan penjajahan dan bersendi mencari keuntungan sebesar-besarnya, bermaksud membunuh perkumpulan-perkumpulan Radio Ketimuran dengan jalan menghentikan subsidi. Padahal Radio Ketimuran banyak menarik minat para pendengarnya, sehingga memperoleh iuran radio cukup banyak. Hal ini berarti memperbesar keuntungan NIROM yang menerima iuran itu. Untuk mengatasi kesulitan ini Radio Ketimuran menaikkan iuran radio. Hal ini menyebabkan timbulnya kegelisahan dan pembicaraan-pembicaraan dalam pers. Suara ini terdengar oleh Sutarjo yang menjadi anggota **Gedelegeerden Volksraad**. Tanggal 19 Nopember 1936, Sutarjo mengajukan usul kepada **Volksraad** agar iuran radio bagi pemilik radio itu diperingan. Tetapi pemerintah Hindia Belanda menolak, namun demikian ada gambaran bahwa siaran Radio Ketimuran akan diserahkan kepada suatu organisasi Radio Ketimuran. Menanggapi pernyataan pemerintah Belanda itu, Sutarjo dan Ir. Sarsito Mangunkusumo mengambil inisiatif menyelenggarakan pertemuan wakil-wakil Radio Ketimuran di Bandung tanggal 28 Maret 1937. Sejak hari itu lahirlah badan baru yang diberi nama PPRK (**Perikatan Perhimpunan Radio Ketimuran**), dengan pengurus : Ketua M. Sutarjo Kartohadikusumo, Penulis/Bendahara Ir. Sarsito Mangunkusumo, Anggota R. Abdurakhman dan R. Rujito. PPRK mempunyai enam perkumpulan sebagai anggotanya. Perkumpulan-perkumpulan itu ialah **VORO, VORL, MVRO**, Radio Semarang, **CIRVO** dan **SRV**. Sedangkan SRI tak ikut tetapi bersedia membantu PPRK. Tujuan PPRK adalah non komersial, melulu memajukan kesenian dan kebudayaan nasional, guna kemajuan rohani dan jasmani masyarakat Indonesia, jadi bersifat **social cultural**. 75)

Setelah timbul PPRK, semua Radio Ketimuran memutuskan hubungan dengan NIROM, sehingga NIROM menjadi kelabakan (kalangkabut), kemudian berusaha memecahbelah dengan menawarkan sejumlah uang

untuk kepentingan siaran. Tetapi anggota PPRK tetap kompak bersatu dan kuat, sehingga usaha **NIROM** itu tak berhasil. Tanggal 26 Maret 1938 keluar keputusan pemerintah yang mengakui PPRK sebagai **rechts persoon**. Hal ini ditentang oleh Dr. Ciong Bun Kie dari **NIROM** yang merasa bahwa kepentingan pendengar Tionghoa akan terlantar. Sehubungan dengan itu, dalam sidang **Volksraad** ke-34 tanggal 16 Agustus 1938, Sutarjo mengajukan mosi, mendesak pemerintah agar mempercepat penyerahan hak penyelenggaraan program Ketimuran dan penyiaran kepada PPRK. Pemungutan suara menghasilkan 36 menyetujui (termasuk golongan Cina dalam **Volksraad**) dan 12 menolak. Setelah mendengar pertimbangan yang masak dari **Oosterse Raad van Advies**, yang anggota-anggotanya antara lain adalah: Sosrohadikusumo (Ketua), MH Thamrin, Mr. Wongsonegoro, Sayid Moh. Abdulbakar Alatas, Dr. Mulia, RA. Abdurachman, Wiranatakusuma, Dr. Syaaf, Dr. Haaksma, Dr. Ciong Bun Kie, akhirnya pemerintah pada bulan Agustus 1939 memberikan subsidi kepada PPRK dan pada tanggal 30 Juni 1940 menyetujui agar **NIROM** menyerahkan pekerjaannya kepada PPRK. 76)

Setelah melalui perjuangan yang panjang itulah maka pada tanggal 1 Nopember 1940 siaran pertama PPRK dapat diselenggarakan. Pada saat itu para pemimpin PPRK pusat dan daerah berkumpul di rumah kediaman Sutarjo jalan Raden Saleh 18 Jakarta, untuk mendengarkan pidato pembukaan yang disampaikan oleh Sutarjo sebagai tanda dimulainya siaran radio nasional yang pertama oleh PPRK itu. 77) Untuk menyiapkan siaran kebudayaan, tempat latihannya juga di rumah Sutarjo. Mereka yang ikut latihan di sini antara lain penyanyi dan musikus terkenal saat itu seperti Miss Rukiah, Kusbini, Kartolo, dan lain-lain.

Demikianlah perjuangan para angkasawan radio dizaman penjajahan Belanda menghadapi monopoli **NIROM** dan perjuangannya menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda sebelum **RRI** muncul. Perjuangan ini berhasil, tetapi kemudian datang penjajah baru Jepang tahun 1942. Tak lama setelah Jepang berkuasa di Indonesia, dunia radio menjadi gelap karena dikuasai oleh bala tentara Jepang.

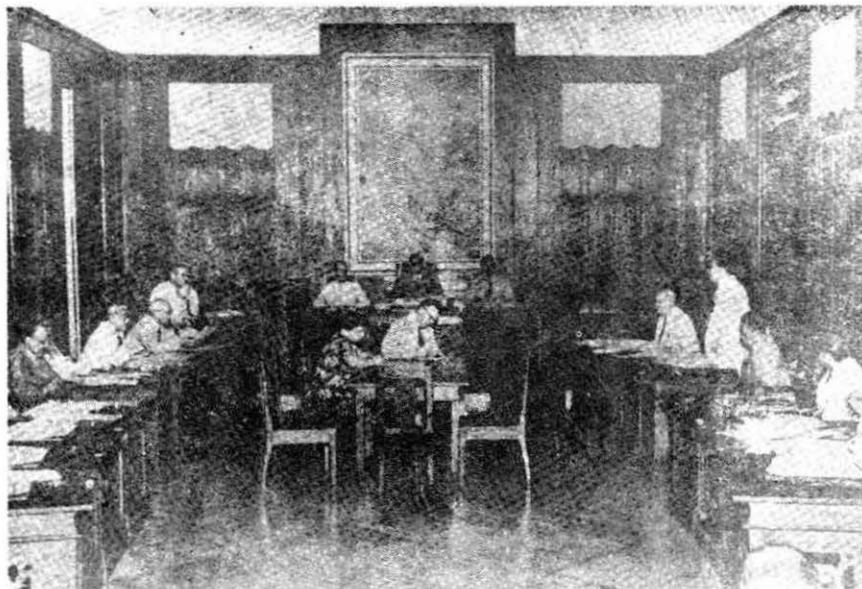
Selanjutnya apa sumbangan Sutarjo dibidang persuratkabaran ? Dalam bidang pers ini, Sutarjo juga mempunyai banyak andil. Ia dikenal sebagai wartawan dan pengarang. Beberapa penerbitan majalah yang pernah dipimpinnya antara lain : **Oud Osviaan** (1919 - 1921), **Pemimpin dan Penyuluh** (1929 - 1942), **Swatantra** (1957 - 1958). Di samping itu ada pula beberapa buku yang ditulisnya seperti : **Keuangan Daerah** (1946), **Membangun Masyarakat Murba** (1947), **Desa** (1953), **Sejarah Radio Indonesia** (1953), dan lain-lain. 78) Hasil-hasil tulisannya itu dibicarakan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Demikianlah secara singkat perjuangan Sutarjo Kartohadikusumo menghadapi penjajahan Belanda, Jepang, maupun sumbangan atau perjuangannya dalam bidang politik, memajukan kesejahteraan rakyat, bidang sosial maupun budaya bagi rakyat Indonesia.

Sekarang marilah kita tinjau sejenak bagaimana pengabdianya dimasa Republik Indonesia.



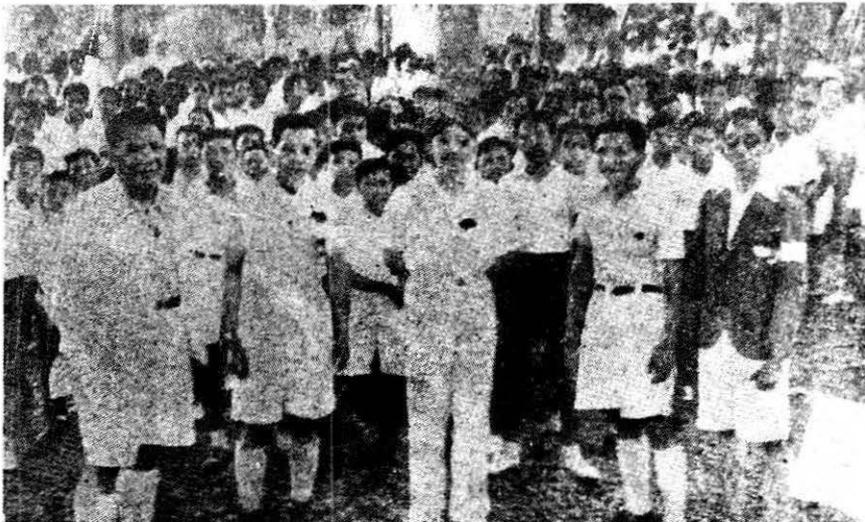
8. Perhimpunan Istri Bestuur Cabang Jakarta, membuka Sekolah Rumah Tangga untuk kaum wanita. Tampak Ny. Tjarda van Starckenborg Stachouwer istri Gubernur Jenderal, diapit oleh Ny. Sutarjo dan Ny. Datuk Tumenggung. Berdiri paling kanan adalah Sutarjo Kartohadikusumo. (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps.).
9. Sutarjo Kartohadikusumo (kanan depan berkain) ketika tahun 1934 menggantikan jabatan Ketua Fraksi PPBB dalam **Volksraad** dari tangan RAA Wiranatakusuma yang telah menjabat Ketua Fraksi ini tahun 1931 - 1934. (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).



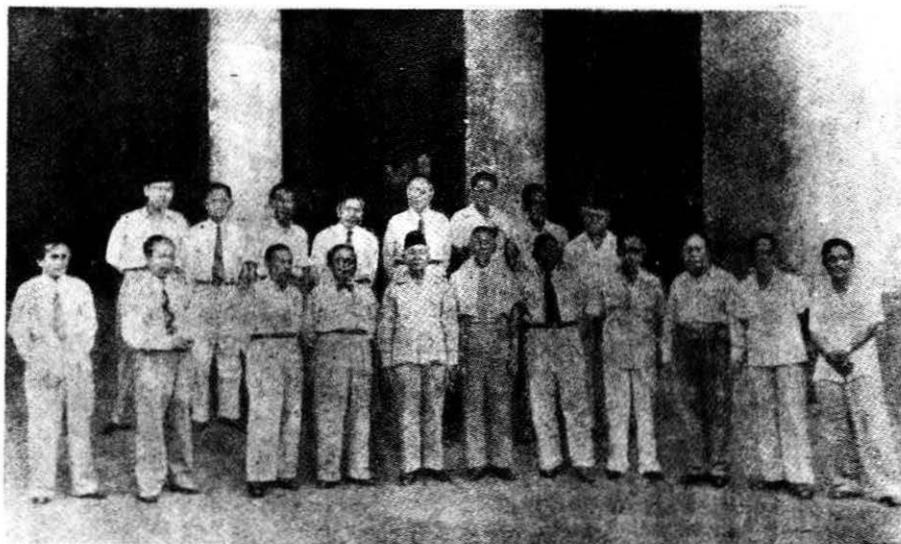
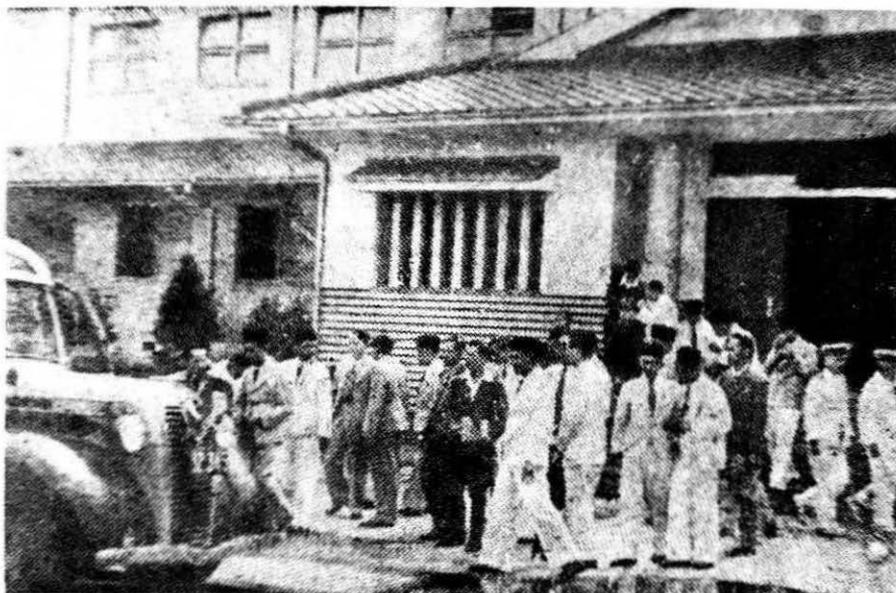
10. Sidang **College van Gedelegeerden Volkraad.**

Tampak Moh. Husni Thamrin sedang berdiri berpidato di barisan kanan. Sedangkan nomor tiga di sebelah kiri adalah Sutarjo Kartohadikusumo. (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).

11. Rapat Umum **Petial Sutarjo** di Palembang. (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).



12. Pekan Olah Raga Nasional pertama yang diselenggarakan oleh ISI (Ikatan Sport Indonesia) di Jakarta. Dari kiri ke kanan adalah yang memegang pimpinan, terdiri dari : Syamsudin, Hendarmin (Prof. Dr), Sutarjo Kartohadikusumo, Kuncoro Purbopranoto (Prof. Mr). (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).
13. Para pemimpin PPRK pusat dan daerah berkumpul di jalan Raden Saleh 18 Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1940, memeringati siaran radio nasional pertama. Pidato pembukaan disampaikan oleh Sutarjo Kartohadikusumo. (Foto : Sejarah Radio di Indonesia).



14. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sutarjo berkunjung ke Departemen Pemerintahan Dalam Negeri Jepang. (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).

15. Foto bersama ketika Sutarjo Kartohadikusumo menjabat Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri 1955. (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).



16. Sutarjo Kartohadikusumo (gambar kanan) ketika menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Tingkat IV, tanggal 17 Agustus 1962, diserahkan oleh Presiden Sukarno. (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).
17. Sutarjo Kartohadikusumo ketika mengucapkan pidato **Wisuda Gelar Doctor Honoris Causa** di IKIP Bandung tanggal 28 Januari 1967, yang berjudul **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila = Dasar Essentieel Pencasar Ps.** (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).
18. Sutarjo Kartohadikusumo bersama Istri setelah menerima gelar **Dr. HC.** (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).



19. Penyerahan Piagam Gelar Doctor HC dari Pejabat Rektor IKIP Bandung Prof. Dr. Akhmad Sanusi SH kepada Dr. Sutarjo Kartohadikusumo, disaksikan oleh Menteri P dan K Sarino Mangunpranoto dan Gubernur Jawa Barat. (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).
20. DR. Sutarjo diapit oleh anak dan menantunya ketika menerima gelar Dr. HC. Sebelah kanan Mr. Abdul Wahab Suriadiningrat (menantu) dan sebelah kirinya Brigjen Drs. Setiadi Kartohadikusumo. (Foto : Dasar Essentieel Pencasar Ps).

BAB III. PENGABDIANNYA DIMASA REPUBLIK INDONESIA

A. PENGABDIANNYA DI BIDANG PEMERINTAHAN

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 14 Agustus 1945 dibentuk PPKI (**Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia**) diketuai oleh Bung Karno dan Wakil Ketuaanya Bung Hatta, sedangkan Sutarjo duduk sebagai anggota. Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI melaksanakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang ini ditetapkan UUD Republik Indonesia serta memilih Presiden dan Wakilnya, dimana Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta secara aklamasi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Pada sidang berikutnya tanggal 19 Agustus 1945, berhasil dibentuk **Kabinet Presidential**. Sedangkan dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945, ditetapkan pembentukan **KNI (Komite Nasional Indonesia)**, **PNI (Partai Nasional Indonesia)** dan **BKR (Badan Keamanan Rakyat)**.¹⁾ Pembentukan KNI ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah. Badan ini dibentuk dari pusat sampai di daerah. Tanggal 27 Agustus 1945 KNI Pusat mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang itu menetapkan Mr. Kasman Singodimejo menjadi Ketua KNIP dan menyerukan suatu ikrar diantaranya mengajak seluruh rakyat menyempurnakan kemerdekaan RI dan menganjurkan agar daerah-daerah secepat mungkin menyusun pemerintahan RI. Dalam KNIP ini Sutarjo pun memiliki andilnya sebagai anggota badan tersebut.

Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 masih mempunyai kekuasaan yang lengkap di Indonesia, baik sipil maupun militer. Untuk menghindari diserahkannya alat kekuasaan itu kepada Sekutu, pemerintah RI berusaha melakukan pemindahan kekuasaan pemerintah dari tangan Jepang "dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya" sebagaimana makna dari bunyi kalimat kedua proklamasi kemerdekaan. Perkataan **saksama** di sini mengandung arti sedapat mungkin pemindahan kekuasaan itu dilaksanakan tanpa menimbulkan korban dipihak kita. Sedangkan **secepat-cepatnya** berarti pemindahan kekuasaan itu dilaksanakan dan selesai sebelum Sekutu tiba di Indonesia. 2) Guna mencapai tujuan ini pemerintah RI pertama-tama mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada segenap pegawai negeri agar mengaku dirinya semata-mata sebagai pegawai RI dan berjanji hanya akan menerima perintah dari atasannya yang berbangsa Indonesia.

Untuk melaksanakan tujuan ini diadakan rapat di tempat kediaman Bung Karno, di Pegangsaan Timur 56 yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Rapat ini dihadiri para pemimpin, pemuka dan para pejuang lainnya.

Rapat berlangsung bertele-tele dan belum ada kesepakatan. Setelah itu Sutarjo tampil mengajukan usul tentang cara melaksanakan permintaan janji para Bupati yang masih memegang kekuasaan di daerah-daerah dan pegawai negeri, untuk hanya menerima perintah dari atasannya yang berbangsa Indonesia. Caranya adalah dengan legal yaitu Bung Karno dan Bung Hatta agar menemui **Gunseikan** Jenderal Yamamoto, minta agar para Bupati diberi kesempatan berkumpul di Jakarta, untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan kata perpisahan atas pimpinan yang baik dan berharga dari pemerintah militer Jepang selama tiga setengah tahun itu. Kalau acara itu sudah selesai, pembesar-pembesar Jepang meninggalkan ruangan dan segera Bung Karno dan Bung Hatta tampil minta agar para Bupati tetap tinggal di tempat sebentar. Kesempatan ini digunakan Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah RI telah dibentuk, di bawah pimpinan Bung Karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Kemudian para Bupati diminta agar berjanji untuk mematuhi segala perintah yang dikeluarkan pemerintah R.I. Segera setelah Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada Sekutu, secepat kilat para Bupati itu memanggil para Wedana, Asisten Wedana, pegawai pusat dan daerah, berkumpul di pendopo Kabupaten. Di sini Bupati menjelaskan bahwa mereka diminta mengajukan pernyataan dan janji bahwa mereka bersama rakyat yang dipimpinnya, mulai hari itu tidak lagi mengakui pemerintah lain kecuali pemerintah RI yang dipimpin Presiden Sukarno, serta akan taat setia hanya kepada pemerintah RI. Demikian usul Sutarjo kepada rapat di tempat kediaman Bung Karno itu. Usul ini disambut dengan tepuk tangan yang gemuruh dari hadirin dan mendapat tanggapan yang baik. Setelah melalui pembicaraan lagi, akhirnya usul ini yang disetujui. 3)

Malam harinya Bung Karno mengutus Menteri Dalam Negeri yang pertama Wiranatakusuma bersama Menteri Muda Dalam Negeri Mr. Harmani, menemui Sutarjo di rumahnya, minta agar dibuatkan teks sumpah atau janji Bupati bersama-sama pegawai negeri dan alim ulama sedaerah kabupaten, untuk disodorkan kalau pemerintah militer Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada pimpinan tentara Sekutu. Setelah naskah yang dimaksudkan itu selesai dibuat, selanjutnya disampaikan kepada Presiden Sukarno. Beberapa hari kemudian datanglah undangan dari **Gunseikan** untuk hadir di hotel Des Indes di jalan Hayam Wuruk Jakarta mengikuti pertemuan antara pemerintah militer Jepang dengan para Bupati seluruh Jawa, dengan acara pokok seperti yang telah direncanakan tadi. Sayang Sutarjo sendiri tidak dapat hadir dalam pertemuan yang bersejarah ini. Namun menurut keterangan Wiranatakusuma yang disampaikan kepada Sutarjo, rencana

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, semua yang hadir senang sekali, baik para Bupati, pemerintah Jepang, pemerintah RI dan terlebih-lebih Bung Karno serta Bung Hatta. Sutarjo sangat lega dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Adil, karena RI akhirnya dapat diselamatkan dari tangan Sekutu yang beberapa hari kemudian akan mendarat. 4)

Berdasarkan Surat Pengangkatan yang ditanda-tangani Presiden Sukarno di Jakarta tanggal 19 Agustus 1945, Sutarjo diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat. Dalam surat pengangkatan itu ditegaskan bahwa yang bersangkutan diberi kepercayaan untuk menumpahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga guna keselamatan Negara Republik Indonesia. 5)

Dalam perkembangan selanjutnya berhubungan dengan gentingnya keadaan, maka mulai tanggal 4 Januari 1946 ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejak saat itu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Keamanan dan beberapa Kementerian yang lain berpindah ke Yogyakarta. Dengan demikian semua kegiatan politik dikemudian dari Yogyakarta. 6)

Menghadapi perpindahan ibukota ke Yogyakarta ini, Sutarjo-pun menyesuaikan diri ikut berpindah pula ke Jawa Tengah untuk melanjutkan perjuangannya, bersamaan dengan perpindahan ibukota RI itu. Perpindahan Sutarjo ke Jawa Tengah dilakukannya ketika terjadi pertempuran Bandung Lautan Api (12 Oktober 1945 - 24 Maret 1946). Beliau melanjutkan perjuangannya di daerah Surakarta, sedangkan keluarganya diungsikan ke Tawangmangu.

Oleh karena pada waktu itu Sutarjo telah berada di Jawa Tengah, maka pengaturan keamanan daerah Jawa Barat yang sedang menghadapi pertempuran Bandung Lautan Api ditangani Pejabat Gubernur Jawa Barat yang baru, Datuk Jamin. Pada tanggal 22 Pebruari 1946, Datuk Jamin mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada penduduk Jawa Barat, berupa petunjuk-petunjuk tercapainya keamanan serta kesejahteraan dan perintah kepada warga negara asing agar kembali ke tempat kediamannya. 7) Sedangkan di tempat yang baru Sutarjo mendapat tugas baru pula, yaitu menjadi Residen Surakarta. Walaupun jabatan yang baru ini lebih rendah tingkatannya dari jabatan sebelumnya, namun demi perjuangan dilaksanakan dengan penuh pengabdian dan senanghati.

Dalam masa perjuangan selanjutnya, antara tahun 1947 - 1950, Sutarjo berkecimpung didalam lembaga Pemerintah yang baru yaitu di DPA (**Dewan Pertimbangan Agung**) Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Pengangkatan Presiden RI Nomer 13-A-'47 tanggal 23 Maret 1947 Sutarjo diangkat menjadi anggota DPA. Di samping jabatan ini Sutarjo merangkap sebagai Penasehat Kementerian Dalam Negeri. Tepat sebulan kemudian, berdasarkan Surat Pengangkatan Nomer 37-A-'47 tanggal 3 Juni 1947, beliau diangkat menjadi Penasehat Kementerian Dalam Negeri merangkap sebagai

Wakil Ketua II DPA, terhitung mulai tanggal 23 April 1947. 8) Dari surat tembusan, dapat diketahui bahwa pada saat itu DPA berkedudukan di Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri berkedudukan di Purwokerto, sedangkan Kementerian Keuangan berada di Magelang. Jabatan sebagai Wakil Ketua II DPA ini dipangkunya sampai tanggal 15 Nopember 1948.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomer 89/A. Civ/48 tanggal 15 Nopember 1948 yang ditetapkan di Yogyakarta, Sutarjo diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dalam Surat Ketetapan itu disebutkan pula gaji pokok Sutarjo sebagai Ketua DPA sebesar Rp. 700,- (Tujuh ratus rupiah). 9) Pengabdianannya kepada negara lewat lembaga ini dilaksanakan secara baik sampai tanggal 16 Agustus 1950. Walaupun gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak memadai, namun semua ini demi untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan RI.

Di samping jabatannya ini Sutarjo juga merangkap jabatan, sebagai Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Noper 109/M tahun 1953, jabatan ini dipangkunya terhitung mulai tanggal 1 Mei 1948. Namun setelah diangkat menjadi Ketua DPA dan menjadi anggota DPR (**Dewan Perwakilan Rakyat**) tanggal 17 Agustus 1950, beliau dinyatakan non aktif dari jabatan Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri. 10)

Demikianlah pengabdian Sutarjo di DPA yang dilaksanakan selama 3 tahun, dimulai sejak menjadi anggota, Wakil Ketua II sampai akhirnya dipilih menjadi Ketua DPA. Selama menjadi Anggota, Wakil Ketua atau Ketua DPA, ada beberapa aktifitas perjuangan Sutarjo yang cukup penting diantaranya ialah seperti yang diuraikan di bawah ini.

Setelah Perjanjian Linggarjati diparap (15 Nopember 1946), terdapat perbedaan penafsiran atas pasal-pasal perjanjian itu yang menjadi pangkal perselisihan antara pihak RI dan Belanda. Belanda mengajukan tuntutan-tuntutan yang tak mungkin dipenuhi oleh pihak RI. Pada tanggal 27 Mei 1947 Belanda mengajukan tuntutan yang bersifat ultimatif yang harus dijawab pemerintah RI dalam waktu 14 hari. Di antara tuntutan itu ialah dibentuknya **Gendarmarie bersama** yaitu menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bersama di seluruh Indonesia (daerah kekuasaan Belanda) dan daerah-daerah RI yang diperlukan, dengan bantuan Belanda. 11) Ada berbagai saran kepada pemerintah menghadapi tuntutan tersebut. Diantaranya ialah saran atau nasehat dari Sutarjo Kartohadikusumo selaku Anggota/Wakil Ketua DPA agar menolak tuntutan tersebut. 12) Nota pemerintah RI tentang penolakan **Gendarmarie bersama** itu dibalas pihak Belanda tanggal 15 Juli 1947. Dalam surat itu dinyatakan Belanda tetap menuntut agar **Gendarmarie bersama** itu dilaksanakan dan dalam tempo 32 jam pemerintah RI harus memberikan jawaban. Sebagai pertimbangan mengapa pemerintah

RI menolak tuntutan Belanda tersebut adalah karena jaminan ketertiban dan keamanan di daerah RI semata-mata kewajiban pemerintah RI. Kalau tuntutan itu disetujui, hal itu akan membahayakan pertahanan RI. Ini berarti Belanda bebas memasuki daerah RI dan dengan demikian rahasia militer dan pertahanan RI diketahui pihak Belanda. Penolakan inilah yang digunakan Belanda untuk melancarkan Agresi Militernya yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947.

Selaku Ketua DPA, selain menyarankan agar pemerintah RI menolak **Gendarmarie** bersama, Sutarjo juga mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap unsur-unsur dalam negeri sendiri, ketika terjadi pemberontakan PKI/Madiun dan menghadapi Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948). 13)

Pada waktu Belanda menduduki Yogyakarta tahun 1949 seluruh pimpinan pemerintahan diasingkan atau dinonaktifkan. Sutarjo sebagai Ketua DPA dengan dibantu oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai Wakil Ketua DPA dan Profesor Sunario SH sebagai Sekretaris DPA, berhasil menegakkan wibawa negara RI, dengan jalan mengadakan rapat-rapat di Gondokusuman Yogyakarta. Aktifitas ini diketahui musuh tetapi tidak berani mengganggunya. Pada waktu yang sama, Sutarjo yang menjabat sebagai **Ketua Central Comite Palang Merah Indonesia** berhasil menggagalkan usaha pemerintah Pendudukan Belanda yang mau menggabungkan Palang Merah Indonesia dengan Palang Merah Belanda, sehingga dengan demikian PMI sebagai lambang Kemerdekaan RI tetap ada dan dapat meneruskan tugasnya membantu para pejuang digaris depan. 14)

Jabatannya sebagai Ketua DPA ini berlangsung sampai tahun 1950. Namun pengabdianya tidak berhenti sampai di situ, ia kemudian menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Sebagai anggota DPR, Sutarjo mengucapkan sumpahnya di hadapan Presiden RI Sukarno, di Jakarta tanggal 16 Agustus 1950. 15) Sutarjo mengabdikan dirinya sebagai anggota DPR ini sampai tahun 1956.

Di samping kegiatannya sebagai anggota DPR, ia juga aktif dalam berbagai lembaga atau kepanitiaan misalnya menjadi Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri (1950 - 1951), Komisaris Negara Urusan Otonomi Daerah (1954 - 1956), dan Wakil Ketua Pimpinan Partai Persatuan Indonesia Raya (1950 - 1956). 16) Setelah menjadi anggota DPR, Sutarjo mendapat tugas baru menjadi Gubernur diperbantukan pada Menteri Dalam Negeri (1956 - 1958) dan dalam waktu yang sama ia juga aktif sebagai Ketua Yayasan Balai Pembangunan Daerah (1957 - 1958) dan sejak 1948 - 1967 beliau menjadi **Ketua Dewan Kurator Universitas Gajah Mada**. 17)

Di samping pengabdianya di bidang pemerintahan, terutama setelah pensiun sebagai Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri,

Sutarjo banyak mengabdikan diri di bidang pendidikan dan persuratkabaran. Misalnya di Universitas Gajah Mada, Dosen pada Universitas Pejajaran (1956 - 1964) maupun IKIP Negeri Bandung (1964 - 1967). Di bidang pers, beliau memimpin Redaksi **Kalawarta Swatantra** (1957 - 1958). Sedangkan dari tahun 1961 - 1965 menjabat sebagai Ketua Dewan Presidium Persatuan Pensiunan Republik Indonesia. 18)

Demikianlah secara singkat pengabdian Sutarjo Kartohadikusumo di bidang pemerintahan sejak berdirinya Republik Indonesia sampai masa pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto. Selanjutnya marilah kita tinjau sejenak pengabdianannya di bidang lain, khususnya bidang pendidikan.

B. PENGABDIANNYA DI BIDANG PENDIDIKAN

Selain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, Sutarjo juga mempunyai andil di bidang pendidikan. Baik pada masa penjajahan Belanda, Jepang maupun setelah Indonesia merdeka, bahkan sampai akhir hayatnya. Di samping beliau telah mendapat pendidikan formal di **OSVIA** Magelang tahun 1911, **BESTUURSCHOOL** di Jakarta 1921, Sutarjo juga seorang **autodidact** .

Ada beberapa prinsip pendidikan yang dianut oleh Sutarjo selama hidupnya. Menurut Prof. Dr. Sikun Pribadi dalam pidatonya sebagai Promotor pada **Wisuda Gelar Doctor Honoris Causa** bagi Sutarjo Kartohadikusumo tanggal 28 Januari 1967, "prinsip-prinsip" yang dianut Sutarjo adalah : 19)

1. Dasar hidup dan pendidikan ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Metode mendidik praktis yang paling baik ialah contoh dari pendidik dan pemimpin.
3. Setiap pemimpin rakyat harus berjiwa pendidik yang selalu memberikan contoh yang setinggi-tingginya kepada rakyat (memerintah ialah mendidik).
4. Prinsip-prinsip pendidikan itu telah kita warisi dari nenek moyang kita sendiri sejak dahulu kala. Prinsip-prinsip itu menghendaki supaya kita menghormati dan mentaati Guru, Ratu (Pembesar) dan Orang tua. Tetapi prinsip itu membawa konsekuensi yaitu jika Guru, Ratu, Orangtua itu ingin dihormati dan ditaati, haruslah memberi contoh yang nyata dalam perbuatan sehari-hari dan bukan hanya omongan dan nasehat belaka.
5. Yang mendapat penghormatan dan ketaatan diatas segala-galanya ialah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nomer satu adalah Tuhan, baru Guru, Pembesar dan Orangtua.

6. Kemerdekaan batin dihidupkan di dalam setiap pemerintahan dan pendidikan, bukan perkosaan, paksaan dan pemerasan orang serta rakyat.
7. Inti tujuan pendidikan ialah pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengenai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa secara sempurna, oleh Sutarjo disebutnya **Ilmu Manunggal**, **mistik** atau **ngrogo sukmo** yaitu kesatuan antara jasmani dan rokhani, kesatuan antara individu dan masyarakat dan kesatuan antara manusia dengan Tuhan. Kalau prinsip hidup itu dilaksanakan, maka di dalam praktek hidup, orang bekerja dengan dasar **sepi ing pamrih, rame ing gawe** (bekerja keras dan sungguh-sungguh tanpa banyak menuntut balas jasa).

Bagaimana pandangan Sutarjo tentang pendidikan nasional ? Pendidikan nasional menurut Sutarjo adalah pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam arti yang semurni-murninya. Setiap bangsa diberi Tuhan Yang Maha Esa sifat-sifat tertentu, ada yang positif ada yang negatif. Sifat-sifat itu ada hubungannya dengan keamanan geografis dan alam tempat hidup bangsa itu. Pembawaan bangsa itu sifatnya kuat dan akan dipertahankan sekuat-kuatnya, kalau tidak ada keadaan yang memaksanya, diantaranya ialah pengaruh dari dunia internasional yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus dapat mengawinkan pembawaan bangsa Indonesia dengan pengaruh dari dunia internasional berupa ilmu pengetahuan dan teknologi itu, supaya kita dapat bersama-sama dengan bangsa lain mencapai perdamaian dunia dalam bentuk masyarakat dunia. Perkawinan dengan unsur-unsur dari luar itu tidak boleh mengakibatkan tenggelamnya pembawaan bangsa Indonesia yang kuat itu ialah Pancasila. Bangsa Indonesia harus dapat menghargai pembawaannya sendiri-sendiri supaya dapat menjadi bangsa yang jaya. Jika bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang jaya, yang dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain yang telah maju, ia harus dapat mengembangkan dan melaksanakan bakatnya sendiri yaitu jiwa Pancasila diiringi kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dunia. 20) Menurut Sutarjo, untuk melaksanakan pendidikan diperlukan pula psikologi ialah pengertian tentang jiwa yang dididik yaitu rakyat. Jika hendak mengerti jiwa rakyat Indonesia yang masih murni itu, harus pergi ke desa dan memahami jiwa rakyat desa. Untuk ini Sutarjo telah memelopornya, hal ini terbukti dari hasil karyanya yang berjudul **Desa**.

Pada zaman kolonial Belanda banyak jasa Sutarjo di bidang pendidikan bagi bangsa Indonesia. Sutarjo mempunyai cita-cita, bahwa dengan memajukan pendidikan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat dicapai kemerdekaan penuh. Di bawah ini adalah berbagai contoh jasa Sutarjo dalam bidang pendidikan pada zaman Belanda. 21)

1. PPBB yang beliau ketuai telah berhasil memperjuangkan bertambahnya jumlah **Inlandsche MULO** (SMP khusus untuk bangsa Indonesia).
2. Beliau juga mengusulkan diadakannya "**Inlandsche Middelbare Volk-scholen**" untuk memberikan pelajaran pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan, dan lain-lain. Tetapi sampai waktu beliau mencapai gelar **Doctor Honoris Causa** (1967), belum tercapai secara memuaskan.
3. Beliau mengusulkan juga adanya "**Wajib Belajar Local**" (**Locale leer-plicht**).
4. Penambahan jumlah beasiswa untuk pelajar-pelajar Indonesia.
5. Beliau telah berhasil mencegah ditutupnya sejumlah besar Sekolah Desa (50 HIS dan 140 **Vervolg scholen**), karena penghematan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ketika terjadi krisis ekonomi.
6. Tahun 1938 beliau berusaha keras memperjuangkan **Bestuuracademie** guna peningkatan mutu akademis, peraturan yang adil terhadap siswa dan kedudukan bagi lulusnya untuk jabatan di Pamong Praja.

Di samping itu semua, pada waktu Sutarjo menjadi Wedana di Sumberrejo, kira-kira lima belas kilometer dari Bojonegoro, beliau telah mengusahakan adanya Bus Sekolah untuk menolong pengantaran bagi anak-anak yang bersekolah di Bojonegoro. Juga di kawedanan ini dibuka sekolah untuk mendidik rakyat sekitarnya. Sedangkan tahun 1935 - 1936 beliau mengetahui Panitia Penentang Penghematan Pengajaran bagi bangsa Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan usahanya untuk ikut memajukan pendidikan di Indonesia juga diteruskan. Selama 16 tahun yaitu sejak tahun 1948 - 1964 beliau duduk sebagai anggota Dewan Kurator dan sebagai Wakil Ketua Dewan tersebut pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Di samping itu beliau juga menjadi Dosen Luar Biasa pada Universitas Pejajaran Bandung (1956 - 1964). Selanjutnya sejak tahun 1964 beliau menjadi Dosen Luar Biasa juga pada IKIP Negeri Bandung. Atas jasa-jasanya yang besar dalam masalah pendidikan yang dipersembahkan kepada bangsa Indonesia, khususnya bidang Pendidikan Masyarakat, maka pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 1967 Sutarjo Kartohadikusumo memperoleh Piagam Penghargaan berupa Gelar **Doctor Honoris Causa** dalam Ilmu Pendidikan Bidang Pendidikan Masyarakat dari IKIP Bandung. 22) Untuk wisuda Gelar **Doctor Honoris Causa** tersebut, **Promovendus** Sutarjo menyampaikan pidato wisuda yang telah disetujui promotor-promotornya, berjudul **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila** sebanyak duabelas halaman folio ketik sesuai dengan ketentuan. Adapun yang menjadi Promotor pertama adalah Prof. Dr. Akhmad Sanusi SH, pejabat Rektor IKIP Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang Ilmu Adminis-

trasi/Tatapraja. Sedangkan Promotor kedua Prof. Dr. Sikun Pribadi MA. PhD, Guru Besar Tetap pada IKIP Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan. 23)

Di samping jasa-jasanya dalam bidang pendidikan, banyak pula hasil karyanya berupa tulisan atau karangan yang dimuat dalam berbagai penerbitan, baik surat kabar, majalah atau berupa buku. Khusus mengenai hasil karyanya ini dibahas tersendiri dalam bagian yang lain dari tulisan ini. Di antara karya-karyanya yang paling menonjol ialah pidatonya yang dikemukakan di depan sidang terbuka DPA tahun 1949 yang berisi mengenai : Lembaga-lembaga adat, demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem kekeluargaan dan gotong-royong, Semangat keadilan sosial, dan lain-lain. Atas permintaan pemerintah, pidato ini kemudian dihimpun dan diterbitkan berupa buku berjudul **Desa** tahun 1953. Pada tahun 1956 buku tersebut ditetapkan sebagai pedoman untuk kuliah-kuliah dalam Ilmu Tata Desa pada Universitas Pejajaran dan IKIP Bandung.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto, dari buku **Desa** tersebut dapat disimpulkan bahwa Sutarjo Kartohadikusumo adalah ahli dalam Ilmu kemasyarakatan dan mentrapkan keahliannya itu untuk menaikkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan hal ini maka penghargaan berupa gelar **Doctor Honoris Causa** Ilmu Pendidikan bidang Pendidikan Masyarakat yang diberikan oleh IKIP Bandung itu merupakan kebijaksanaan yang tepat, 24) di samping jasa-jasanya yang lain dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan maupun hasil-hasil karyanya.

Sutarjo adalah orang yang konsekwen dengan pendirian dan cita-citanya. Sampai tahun menjelang akhir hayatnya, memajukan bidang pendidikan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat di pedesaan tetap menjadi perhatiannya. Pada waktu Ulang Tahun Kemerdekaan tahun 1974, kepada Mpok Ani wartawan RRI yang mewawancarai, Sutarjo secara bersemangat mengemukakan pentingnya **koran masuk desa**. Saran ini ditujukan kepada pemerintah agar masyarakat di pedesaan maju. 25) Sedangkan kira-kira empat bulan sebelum beliau wafat, tanggal 17 Agustus 1976 beliau mendirikan **Yayasan Dana Pembangunan Desa**, dengan cara mencari dana dari orang-orang kaya baik usahanya di dalam maupun luar negeri. Antara lain menghubungi Pangeran Bernhard dari negeri Belanda dan bekas Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborg di negeri Belanda pula, maupun bantuan yang diharapkan dari Jepang. Bantuan-bantuan dana tersebut untuk pembangunan desa, yang penyalurannya dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, dari Departemen Dalam - Negeri. 26)

Atas jasa-jasanya yang luar biasa terhadap nusa dan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang, sebelum mendapat gelar **Dr. HC** tersebut, oleh Kepala Negara kepadanya diberikan Anugerah Tanda kehormatan Bintang Mahaputra tingkat IV yang diserahkan oleh Presiden Sukarno pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1962.

Demikianlah sekilas tentang pengabdian Sutarjo Kartohadikusumo di bidang pendidikan. Kini marilah kita tinjau sejenak hasil-hasil karya beliau, terutama karya tulis atau karangan-karangannya yang dimuat dalam berbagai surat kabar, majalah atau dicetak dalam bentuk buku.

C. HASIL KARYANYA

Selain sebagai penulis, sejak zaman Belanda Sutarjo juga memimpin berbagai penerbitan majalah, misalnya majalah **Oud Osviaan** (1919), **Pemimpin** dan **Penyuluh** (1929) dan **Swatantra** (1957). Hasil karya tulisnya selain dimuat di surat kabar atau majalah, juga banyak yang dibukukan. Di bawah ini adalah hasil karya Sutarjo sejak masa mudanya di zaman Belanda sampai masa tuanya. Hasil-hasil karya beliau itu adalah sebagai berikut : 27)

1. **Grievan van den Inlandscher Bestuursamtenaar** (1919).

Berisi laporan hasil **enquite** perihal nasib pegawai Pamong Praja. Buku ini dulu menggoncangkan pemerintah Belanda, menyebabkan untuk pertama kalinya diadakan **Regenten Confrentie**, yang dipimpin Gubernur Jenderal sendiri dan selanjutnya diadakan tiap tahun sekali.

2. **Petisi Sutarjo, in originali teks.**

Teks aslinya diterjemahkan oleh Haji Agus Salim tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul **Hindia Berdiri Sendiri, Usul Petisi Sutarjo Kartohadikusumo**.

Teks pidato Sutarjo dalam sidang **Volksraad** tanggal 9 Juli 1936, dimuat dalam surat kabar **Pemandangan**, tanggal 15 Juli 1936.

3. **Himpunan Stenografis Verslag dan Perscommentaren**, berisi tuntutan dalam **College van Gedelgeerden Volksraad** kepada **Nederland Indonesia** f 25, juta buat pembangunan ekonomi rakyat di desa tahun 1936.

4. **De Bezuinigen op het Indonesisch Bestuur** (1936). Buku ini berisi tentang perjuangan menentang penghematan atas **corp Pamong Praja**, yang berarti hendak mendesak mundur kedudukan bangsa Indonesia.

5. **De Bestuursacademie** (1937).

Merupakan karangan dan perjuangan dalam **Volksraad** untuk mendapat **Bestuur academie** yang bernilai penuh bagi Pamong Praja.

6. **Indonesie weerbaar**

Mengenai Politik, **Cultureel Economisch**.

Rede van de Heer Sutarjo in Volksraad van Nederland Indie, 9 Juli 1937.

7. **De Pacific** (1938)
Tentang perjuangan dalam **Volksraad** menghadapi Perang Dunia II.
8. **Perjuangan Pamong Praja**, dimuat dalam majalah **Pemimpin** tahun 1938/1939.
9. **Kuangan Daerah** (1946)
Merupakan bahan untuk menyusun peraturan keuangan daerah.
10. **Pegawai Pangreh Praja dan Pemerintah Daerah** (1946).
Uraian singkat tentang bahan-bahan untuk membangun pemerintah daerah Otonom.
11. **Membangun Masyarakat Murba**
Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 17 Agustus 1947. Cetakan II 1 Pebruari 1952, Cetakan III, Mei 1952. Buku ini berisi analisa singkat tentang adanya fakta-fakta yang dulu digunakan untuk membangun masyarakat desa.
12. **Sejarah Radio di Indonesia**
Penerbit Kementerian Penerangan-Jawatan Radio Republik Indonesia, Jakarta, 1953, mulai hal. 15.
Berisi catatan-catatan perjuangan dalam bidang radio nasional, yang berhasil merebut kekuasaan dari tangan radio milik perusahaan Belanda NIROM, tahun 1938.
13. **Desa**
Buku ini ditulis tahun 1953. Cetakan II diterbitkan oleh Sumur Bandung 1965.
Berisi masalah Desa, antara lain memuat tentang : Bentuk Desa, Desa sebagai Pendukung Hukum Asli, Pemerintahan Desa, Rumah Tangga Desa, serta pandangan Sutarjo mengenai Daerah Otonom dan Daerah Tingkat III.
14. **Himpunan Tigabelas Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah** (1955) : Tulisan ini dibuat sewaktu Sutarjo menjabat sebagai Komisaris Negara Urusan Otonomi Daerah.
15. **Rapat Desa**
Merupakan analisa singkat tentang filsafat Hukum Negara Asli dan Demokrasi Indonesia Asli.
16. **Musyawaharah dan Mufakat**, (Bandung 1963)
Merupakan prasaran yang diajukan kepada Badan Pembantu Pimpinan MPRS untuk mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sutarjo, prasaran ini telah dilaksanakan oleh MPRS.
17. **Rumah Tangga Desa**, diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta.
18. **Pembangunan Otonomi Daerah**
Artikel yang dimuat dalam majalah **Swatantra**, tahun 1957, halaman : 5, 123, 316, 572, 679 dan 739.

19. **Masyarakat Desa Sebagai Dasar Yang Kuat Bagi Daerah Swatantra dan Negara.**
Dimuat dalam majalah *Swatantra* tahun 1958, No. 1, hal. 57.
20. **Kedudukan Pamong Praja Berhubung Dengan Undang-Undang No. I/1957.** Dimuat dalam majalah *Swatantra*, th. 1958 No. 2, hal. 100.
21. **Bentuk Pemerintahan Desapraja, (I).**
Dimuat dalam majalah *Swatantra*, th. 1958, No. 3, hal. 131, 178.
22. **Bentuk Pemerintah Desapraja, (II).**
Dimuat dalam majalah *Swatantra*, th. 1958, No. 9, hal. 568.
23. **Bentuk Pemerintah Desapraja, (III).**
Dimuat dalam majalah *Swatantra*, th. 1958, No. 12, hal. 736.
24. **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila,** Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1969.
Berisi Pidato yang diucapkan untuk mencapai gelar **Doctor Honoris Causa** pada IKIP Bandung, tanggal 28 Januari 1967.
25. **Bung Hatta dan Pamong Praja**
Dimuat dalam buku : Bung Hatta Mengabdikan Pada Cita-cita Perjuangan Bangsa, penerbit Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70, Jakarta, 1972, hal. 205 - 215.
26. Dua artikel yang dimuat dalam *Harian Kompas*, Jakarta, 1976, yaitu :
 - a. **Riwayat Lahirnya Petisi Sutarjo**
 - b. **PMI dan Eksistensinya Sewaktu Yogyakarta Diduduki Sekutu**
27. **Wujudkan Ordening Mental Secara Total**
Pidato Sambutan pada Malam Reuni Pejuang/ **Exponen** Angkatan 45 di Gedung Joang 45, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke 31, tanggal 17 Agustus 1976.

Demikianlah berbagai artikel, karangan atau buku yang ditulis oleh Sutarjo Kartohadikusumo yang dapat penulis himpun. Kemungkinan besar, masih banyak lagi yang belum tercantum dalam tulisan ini, yang dimuat dalam berbagai mass media, penerbitan atau masih berbentuk konsep yang dihimpun oleh keluarga almarhum.

Dengan pengabdiannya yang besar terhadap nusa dan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang dan hasil-hasil karya yang diciptakannya, sudah selayaknya Sutarjo memperoleh Tanda Kehormatan atau Tanda Penghargaan, seperti yang tertera di bawah ini.

D. TANDA KEHORMATAN YANG DIMILIKI

Berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan yang dikeluarkan pemerintah ada beberapa jenis Tanda Kehormatan atau Penghargaan. Khusus untuk Tanda Kehormatan yang bersifat umum, berupa Bintang dan **Satyalencana** (Medali). Bintang yang tertinggi diantara tanda kehormatan yang ada ialah Bintang Republik Indonesia. Bintang ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan kehormatan istimewa kepada mereka yang berjasa sangat luar biasa guna keutuhan, kelangsungan dan kejayaan negara.

Bintang ini terdiri lima kelas (U.U. Darurat No. 5 tahun 1959). Yang kedua Bintang Mahaputra. Bintang ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan kehormatan tinggi kepada mereka yang berjasa sangat luar biasa terhadap nusa dan bangsa disatu bidang tertentu di luar bidang militer. Bintang ini terdiri lima kelas, merupakan bintang sipil yang tertinggi (UU Darurat No. 6 tahun 1959). Tanda kehormatan yang lain adalah **Satyalencana**. Menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan tahun 1959, dibedakan berbagai macam **Satyalencana**, misalnya **Satyalencana** : Perintis Pergerakan Kemerdekaan, Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Pembangunan, Karya Satya, Kebaktian Nasional, Kebudayaan, Trikora, Penegak, dan lain-lain. 28)

Di samping itu ada tanda kehormatan atau penghargaan juga diberikan pula oleh Lembaga Pendidikan, Pemerintah Daerah atau lembaga-lembaga yang lain, menurut peraturan yang berlaku.

Demikianlah Sutarjo Kartohadikusumo, juga memperoleh beberapa Tanda Kehormatan atau Penghargaan atas jasa-jasanya yang besar terhadap nusa dan bangsa Indonesia.

Tanda-tanda kehormatan itu antara lain :

1. **Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tingkat IV**

Tanda Kehormatan ini dianugerahkan dan ditandatangani oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Sukarno di Jakarta tanggal 17 Agustus 1962. Penganugerahan Tanda Kehormatan ini berdasarkan bahwa Sutarjo dipandang memiliki jasa yang luar biasa terhadap nusa dan bangsa Indonesia. 29)

2. **Satyalencana Karya Satya tingkat II**, tanggal 13 April 1968. 30)

Tanda Kehormatan ini dianugerahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 31 tahun 1959, dengan tujuan untuk memberi penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam waktu yang lama sekali setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

3. **Tanda Kehormatan berupa Gelar Doctor Honoris Causa**, dalam Ilmu Pendidikan Bidang Pendidikan Masyarakat.

Gelar ini diberikan oleh Rektor/Ketua Senat Guru Besar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung, tanggal 28 Januari 1967. Piagam Penghargaan **Doctor Honoris Causa** ini ditandatangani oleh Pejabat Rektor IKIP Bandung/Ketua Senat Guru Besar, yang bertindak pula sebagai Promotor I, Prof. Dr. Akhmad Sanusi SH. Sedangkan Promotor II Prof. Sikun Pribadi MA. Ph. D. 31)

4. **KGPAA** (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario) Paku Alam VIII dari Paku Alaman Yogyakarta, memberikan Gelar **Pangeran** dan kemudian menganugerahi Sebutan **Dr. KPH** (Kanjeng Pangeran Hario) Sutarjo Kartohadikusumo **Kartaningprang** .

Gelar ini diberikan oleh KGPAA Paku Alam VIII, di Yogyakarta tanggal 30 Maret 1970. 32)

Inilah beberapa Tanda Kehormatan atau Penghargaan yang diperoleh Dr. Sutarjo Kartohadikusumo atas jasa-jasanya terhadap nusa dan bangsa Indonesia, yang diperolehnya sebelum beliau wafat.

Kini sampailah kita ke bagian berikutnya, merupakan pembahasan masa terakhir hidup dan kehidupan serta perjuangannya yaitu akhir dari hayatnya.

BAB IV. AKHIR HAYATNYA

A. AKHIR HAYATNYA

Manusia tidak bisa lepas dari lingkaran hukum alam yaitu lahir, hidup dan mati. Atau kalau diperinci lagi lahir, masa kanak-kanak, masa dewasa, masa tua dan mati. Demikian halnya tumbuh-tumbuhan juga mengenal siklus mulai dari tumbuh, berbunga, berbuah, menua, mati, dan seterusnya. Walaupun teori sejarah yang berkembang kemudian telah meninggalkan teori siklus itu dan menyatakan bahwa sejarah itu berkembang, namun manusia sebagai pelaku sejarah yang terdiri dari jasmani dan rokhani, tidak dapat terlepas dari siklus ini. Terutama badan jasmani, sedangkan jiwa atau rokhani masih tetap hidup kekal di akhirat.

Demikian pula halnya dengan Sutarjo Kartohadikusumo, pada akhirnya sampai pula pada masa siklus yang terakhir yaitu kembali ke Rakhmatullah atau meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu Pahing, tanggal 20 Desember 1976 jam 00.30 (setengah satu malam), di tempat kediamannya jalan Raden Saleh 18 Jakarta.

Ada beberapa peristiwa yang mendahului sebelum beliau wafat. Empat bulan sebelumnya, tepatnya tanggal 20 Agustus 1976, beliau masih sempat menyampaikan pidatonya yang terakhir di Gedung Joang 45 jalan Menteng 31 Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 31. Seperti biasanya setiap tahun eksponen Angkatan 45 selalu mengadakan reuni yang pelaksanaannya dikaitkan dengan HUT Kemerdekaan RI. Pada kesempatan itu secara bergiliran ditampilkan satu atau dua tokoh tua untuk menceritakan pengalamannya, khususnya yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh telah mendapat kesempatan, antara lain Mr. Ahmad Subarjo, I.J. Kasimo, Dr. Moh. Hatta dan lain-lain. Untuk tahun 1976 kehormatan diberikan kepada Sutarjo Kartohadikusumo, si tokoh tiga zaman itu.

Pada waktu itu usianya telah mencapai 86 tahun, tubuh agak kurus, namun semangatnya tidak kalah dengan yang muda. Pada malam itu, sebelum maju ke mimbar beliau diminta duduk di samping Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45, Jenderal Surono. Namun keadaan fisiknya tidak mengizinkan untuk menahan tiupan angin malam, maka memilih di teras sambil menunggu gilirannya. Setelah saat tiba, majulah si tokoh tua ini ke mimbar. Jalannya tertatih-tatih, diikuti pandangan ratusan pasang mata penuh perhatian. Ketika mulai pidato, suaranya sedikit bergetar, kemudian meninggi karena semangatnya. Rupanya semangatnya tak kunjung padam

sejak masa muda. Pidato terakhir yang disampaikan Sutarjo itu berjudul **Wujudkan Ordening Mental Secara Total**. Pada garis besarnya isi pidato Sutarjo itu antara lain menghendaki dihidupkannya kembali jiwa dan semangat 45 untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu agar generasi bangsa Indonesia itu merupakan generasi yang penuh keberanian, penuh semangat perjuangan untuk kepentingan nusa, bangsa dan negara, baik material maupun spiritual. Salah satu jalan untuk membangkitkan kembali jiwa yang ingin bebas dan semangat menyala-nyala itu ialah dengan cara memberikan kesempatan-kesempatan kepada generasi muda itu untuk berkarya tanpa belenggu. Dalam hal-hal yang sangat menyeleweng dari garis-garis etika jiwa dan semangat 45, harus ditegur secara tutwuri handayani. Selanjutnya Sutarjo menyatakan bahwa rakyat banyak, telah lama merindukan keadilan dan kemakmuran bersama. Untuk ini Angkatan 45 harus bertekad membantu pemerintah mewujudkan suatu **Ordening Mental** yaitu tekad yang disertai keberanian moril untuk menyetop segala jenis penyelewengan yang menghambat tercapainya masyarakat adil dan makmur itu. Sutarjo yakin bahwa daya tahan semangat Angkatan 45 masih cukup ampuh, mampu dan akan berhasil melahirkan tekad tersebut. Terhadap koreksi penyelewengan ini menurut Sutarjo, Presiden Suharto telah menganjurkan, tinggallah Angkatan 45 yang harus berani memulainya. Demikian semangat Sutarjo dalam pidatonya yang terakhir untuk memperjuangkan tercapainya masyarakat adil dan makmur, dengan jalan memberantas segala macam penyelewengan. Walaupun semangatnya meninggi, namun kondisi fisiknya mulai menurun, di samping usianya yang mulai bertambah lanjut. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah generasi sesudahnya berkewajiban meneruskan perjuangannya itu.

Pada minggu-minggu sebelum hari wafatnya, beliau masih sibuk menulis naskah untuk mengisi buku peringatan yang ke 50 Pemerintahan Paku Alam. Saat ini kesehatannya sudah mulai menurun, sudah mulai sakit-sakitan. Walaupun demikian beliau tidak mau dirawat di rumah sakit. 1) Secara fisik sejak tanggal 8 Desember 1976, hari Rabu Pahing beliau jatuh sakit. 2) Tetapi rupanya sakitnya ini tidak dirasakan dan tokoh tua yang tidak mau berpangku tangan ini, selalu mencari kesibukan guna mengisi waktu luang atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan yang bermanfaat. Kira-kira sepuluh hari sebelum beliau wafat, putranya yang sulung Susatyo Kusumonoto diutus membeli album foto untuk menyimpan foto-fotonya pada waktu masih menjabat di Pamong Praja. Setelah album yang dimaksudkan didapat, segera diserahkan kepada sang ayah. Ketika sedang mau menata foto-foto tersebut, kepalanya terasa pusing, yang akhirnya tidak sadarkan diri sampai beberapa saat lamanya. 3) Perawatan tetap diadakan

di rumah sendiri jalan Raden Saleh 18 Jakarta, karena beliau tidak bersedia dirawat di Rumah Sakit. Rupanya sakit yang dideritanya sejak tanggal 8 Desember 1976 itu tidak berangsur membaik, walaupun segala usaha keluarga untuk menanggulangi telah dilaksanakan. Manusia wajib berikhtiar namun Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan.

Akhirnya pada hari Senin Wage tanggal 20 Desember 1976, jam 00.30 WIB dengan tenang Tokoh Petisi yang berusia 86 tahun itu pulang ke Rahmatullah di tempat kediamannya jalan Raden Saleh 18 Jakarta. 4) Oleh karena almarhum telah mendapat Tanda Kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia berupa Bintang Mahaputra, maka seharusnya jenazah almarhum berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atas biaya negara dengan upacara militer. Tetapi rupanya keluarga menetapkan lain, mungkin karena permintaan almarhum sendiri ketika masih sakit. Jenazah akan dimakamkan di Makam Keluarga di Astana Bibis Luhur Surakarta. Pada siang harinya, Senin tanggal 20 Desember 1976 jenazah diberangkatkan dari rumah duka jalan Raden Saleh 18 Jakarta ke Lapangan Terbang Halim Perdanakusuma. Selanjutnya tepat jam 12.00 diberangkatkan menuju Surakarta. 5) Di Surakarta jenazah disemayamkan selama satu malam di rumah jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 144 A Surakarta. Keesokan harinya, Selasa Kliwon tanggal 21 Desember 1976 jenazah diberangkatkan dari rumah tersebut menuju Astana Bibis Luhur jam 10.00 pagi. Selanjutnya pemakaman dilaksanakan secara upacara militer. 6) Makam Sutarjo ini berdampingan dengan makam istri almarhum yang pertama Mas Ayu Siti Jaetun Kamarrukmi Sutarjo Kartohadikusumo, yang telah meninggal lebih dulu tanggal 27 Agustus 1947. 7) Astana Bibis Luhur ini terletak di dekat batas utara kota Surakarta. Pada zaman Belanda Sutarjo pernah berjasa dalam membantu Mangkunegara menghadapi tindakan Belanda yang merugikan pihak Mangkunegaran. Atas jasanya itulah Sutarjo memperoleh hadiah berupa tanah di Bibis Luhur, Mangkunegaran Surakarta. Di samping itu pada waktu almarhum menjadi anggota **Volksraad**, erat sekali hubungannya dengan para Bupati Kraton. 8) Sekarang makam Sutarjo ini diapit oleh makam kedua istrinya yang telah meninggal terlebih dulu. Makam almarhum Sutarjo berada di tengah-tengah. Pada batu nisannya bertuliskan nama, tanggal lahir dan hari tanggal wafatnya berhuruf Latin dengan ejaan lama. Bunyi tulisan itu adalah sebagai berikut : **Dr. KPH Kartaning Prang** (Sutarjo Kartohadikusumo), Lahir Djumat Paing, Tgl 22-10-1892 di Kunduran, Wafat Senen Wage, Tg. 20-12-1976 di Djakarta". Sebelah kanan makam Sutarjo terdapat makam istrinya yang pertama. Pada batu nisan makam ini bertuliskan : **SDK Soetardjo Kartohadikoesoemo**, Wafat di Tawangmangu Surakarta. Pada malem Hari Rebo Legi, 27 Agustus 1947-10 Syawal 1878 .

Sedangkan disebelah kirinya terdapat makam istrinya yang kedua. Tulisan pada batu nisan makam ini berbunyi : **Bendoro Raden SSK Soetardjo Kartohadikoesoemo**, Wafat di Djakarta, Pada Malam Hari Selasa Legi, Tgl. 18-19 Agustus 1958, Tg. 3-4 Safar 1890 .

Pada waktu meninggal maupun ketika pemakamannya, banyak para **lelayu** (pelayat) dari segala lapisan masyarakat yang menyatakan dukacitanya dengan berbagai macam cara. Ada yang datang di tempat kediamannya, ada yang ikut mengantarkan jenazah ke Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, ada yang tugur waktu jenazah disemayamkan atau melayat di Surakarta, maupun mengantarkan dan mengikuti upacara pemakaman di Astana Bibis Luhur. Ada juga yang menyatakan dukacitanya lewat mass media, radio, telepon, pengiriman karangan bunga, bantuan material, penulisan pada mass media, dan lain-lain. Mereka yang menyampaikan dukacita itu tidak hanya dari keluarga saja melainkan juga dari masyarakat luas seperti : tetangga, handai-taulan, teman seperjuangan, para pejabat dan pembesar sipil maupun militer, rakyat kecil yang mengenalinya. Berturut-turut pernyataan duka cita itu antara lain disampaikan oleh : Presiden Republik Indonesia Suharto, Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri **PUTL** (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik), Ketua DPR RI beserta Anggota dan Staf, Ketua Mahkamah Agung RI beserta Anggota dan Staf, Kepala Staf Angkatan Udara beserta Staf, Gubernur **LEMHANAS** (Lembaga Pertahanan Nasional) beserta Staf, Panglima **KOPADARA** beserta Staf, Panglima **KODAM V/Jaya** beserta Staf, Gubernur/**KDH I Jawa Tengah**, Wakil Gubernur/**KDH I Jawa Tengah** di Surakarta, Walikota/**KDH II Kotamadya Surakarta** beserta Staf, Sri Paku Buwono XII, Sri Paku Alam VIII, Sri Mangku Negero VIII, Staf dan Mass Media Sekretariat Negara Republik Indonesia, TVRI, RRI, Radio El Shinta Jakarta, Radio Pambors, Radio Amigos serta Mass Media Pusat dan Daerah, Para Anggota **ABRI**, Pegawai Negeri dan Swasta, Pamong Praja, Para Pemimpin Badan-badan Pemerintah-Semi Pemerintah dan Swasta, Yayasan Bunga Kamboja di Jakarta, Pengurus atau Anggota **RW** (Rukun Warga) dan **RT** (Rukun Tetangga) setempat di Jakarta, Keluarga Masjid Al Makmur Jakarta, Para Dokter (Dr. Salatun, Dr. Sumargo dan Dr. **HAA NOOR**) beserta Jururawat, Keluarga Besar Yayasan Perguruan Cikini Jakarta dan lain-lain lagi yang belum tersebut di sini satu persatu. Atas pernyataan ikut berbelasungkawa (dukacita) dalam segala macam bentuknya itu, keluarga almarhum Sutarjo menyatakan terimakasih yang sebesar-besarnya. 9)

Semoga arwah almarhum diterima disisi Allah sesuai dengan amal baktinya selama hidupnya. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan iman dan selalu mendapatkan bimbingannya.

Mass media di ibukota Jakarta maupun daerah, secara cepat memuat berita duka atas wafatnya Sutarjo tersebut. Ada yang menurunkan ulasan tentang Sutarjo dan perjuangannya, riwayat hidupnya, tajuk rencana, tulisan dari teman seperjuangan, iklan dukacita atau ucapan terima kasih dari keluarga, dan lain-lain. Diantaranya ialah harian Kompas, Sinar Harapan, Berita Buana, majalah Tempo, dan lain-lain.

Demikian halnya TVRI, RRI dan Radio Swasta, juga menyiarkan peristiwa tersebut.

Khusus Radio Swasta El Shinta Jakarta, di mana almarhum 9 bulan sebelumnya pernah ikut membina Radio Swasta Niaga termasuk radio yang terbaik saat itu, menyiarkan siaran khusus tentang wafatnya, **berita lelayu**, pemakamannya. Dalam suasana berkabung itu, radio ini memutar piringan hitam, Gending-gending Jawa yang menjadi kegemaran almarhum, seperti **Uyon-uyon, Langenswara, Langendriyan** dari Mangkunegaran terutama lakon Damarwulan, menyiarkan ulang hasil wawancara dengan almarhum tahun 1976 yang dilakukan oleh Pak Sony dari bagian Kesenian Jawa Radio El Shinta, siaran tentang Riwayat Hidup serta perjuangannya sejak zaman Belanda sampai wafatnya, dan lain-lain. Demikian besar perhatian radio ini terhadap almarhum. 10)

Kaum gelandangan yang ada di sekitar Taman Suropati juga bertanya-tanya, mengapa sudah cukup lama Sutarjo tidak nampak. Biasanya almarhum sering ngobrol dengan mereka sambil melepaskan lelah setelah melaksanakan acara rutin berjalan kaki sesudah Sholat Subuh. Kalau tidak ada acara lain, rute yang ditempuhnya adalah tetap yaitu jalan Raden Saleh, Cikini, Cut Meutiah, Teuku Umar, dan jalan Suwiryono. Pada jam-jam tertentu almarhum melewati atau berhenti di Taman Surapati. Karena ketepatan waktu yang rutin itulah maka kehadirannya di Taman Surapati, digunakan oleh kaum gelandangan atau tuna wisma sebagai penunjuk waktu atau jam bagi mereka yang mempunyai pekerjaan tetap untuk berangkat kerja. Dengan wafatnya almarhum berarti mereka juga kehilangan sesuatu yang berguna bagi mereka. Di samping simpati almarhum sendiri untuk ikut membantu memikirkan perbaikan nasib mereka dan sebaliknya simpati serta harapan dari para gelandangan ini terhadap usaha Sutarjo.

Dengan wafatnya almarhum, rakyat Indonesia dari segala lapisan, baik yang ada di desa yang menjadi perhatian khusus almarhum selama hidupnya, maupun yang berada di kota merasa kehilangan tokoh yang konsekwen dengan pandangan hidup, cita-cita dan perjuangannya. Terutama dalam membela rakyat kecil, baik pada masa penjajahan Belanda, Jepang maupun masa pemerintahan Republik Indonesia sampai dengan masa pemerintahan

Orde Baru. Semoga sepeninggal almarhum, cita-citanya tersebut terlaksana dan arwah almarhum sendiri mendapatkan kebahagiaan abadi di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan amal baktinya kepada nusa, bangsa dan negara Indonesia serta agama.

B. KELUARGA YANG DITINGGALKAN.

Sutarjo meninggalkan seorang istri, sebelas anak dan sejumlah cucu dan cicit. Istrinya yang mendampingi sampai akhir hayatnya ialah istri ketiga. Istri yang pertama dan kedua telah wafat mendahului. Sedangkan yang ketiga, yang ditinggalkan untuk selamanya ini ialah Gusti Bendoro Raden Ayu Kus Subandinah adalah adik Sri Paku Alam VIII. Beliau sampai sekarang masih tetap bertempat tinggal di jalan Raden Saleh 18 Jakarta, dengan memperoleh jaminan pensiun janda, yaitu pensiun Gubernur dan anggota MPRS. Sedangkan pensiun sebagai Anggota atau Ketua DPA sampai akhir hayatnya belum diperoleh. Menurut almarhum waktu ditanya wartawan Tempo, mengatakan bahwa almarhum tidak mengetahui sebabnya mengapa tidak mendapat pensiun sebagai Anggota/Ketua DPA. Selanjutnya dikatakan bahwa yang penting bukanlah besarnya jumlah uang tunjangan pensiun yang diterima melainkan bagaimana jasa seseorang itu bisa dihargai. 11)

Sebenarnya Sutarjo memiliki 12 anak dalam perkawinannya dengan isteri pertama Mas Ayu Siti Jaetun Kamarrukmi. Namun putranya yang kelima yaitu Setioso telah meninggal dunia tanggal 26 Juli 1924 waktu masih kecil. Sedangkan dari istri yang kedua dan ketiga tidak memperoleh anak. Kesebelas putra putri almarhum yang ditinggalkan itu sebagian besar bertempat tinggal di Jakarta. Berturut-turut mereka itu ialah : 12)

1. RM Susatio Kusumonoto (Sudarko)

Kini menikmati masa pensiun sebagai pegawai RRI, bertempat tinggal di kompleks jalan Raden Saleh 18 Jakarta.

2. Ny. RA Setiowati (Sutari), istri Mr. R. Ario Abdul Wahab Suryoadiningrat pensiun Sekretaris Negara. Tempat tinggalnya Jalan Agus Salim 124 Jakarta.

3. RM Setiajid Kusumohadiprojo (Sutario), telah pensiun, bertempat tinggal di kompleks perumahan jalan Raden Saleh 18 Jakarta.

4. Mayor Jenderal TNI AD Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo. Pernah menjabat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Departemen P dan K. Kemudian menjadi anggota MPR Republik Indonesia. Kini bertempat tinggal di jalan Hanglekir II/14 A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

5. Ny. RA Susanti Pujosemedi.
Bekerja di Sekretariat Negara, tempat tinggalnya di jalan Bangka III/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
6. Ny. RA Sri Sudarti Abubakar, istri Mayor TNI AU Abubakar Hasan. Bertempat tinggal di jalan Hegarmanah 18 Bandung.
7. Ny. RA Setiarti (Tatik) Sastroharjo. Bertempat tinggal di jalan Danau Sekawi II/2 B Pejompongan, Jakarta.
8. RM Setiotomo.
Karyawan Perusahaan Swasta, bertempat tinggal di kompleks Raden Saleh 18 Jakarta.
9. RM Ir. Suteja Kusumonegoro.
Bertempat tinggal di jalan Dr. Susilo 20 Jakarta.
10. RM Budisatio.
Swastawan, bertempat tinggal di kompleks jalan Raden Saleh 18 Jakarta.
11. RM Haksomo.
Karyawan DPR RI, bertempat tinggal di kompleks DPR/MPR jalan Kemanggisan Jakarta.

Di samping kesebelas putra-putri almarhum dengan keluarga masing-masing, almarhum juga meninggalkan cucu dan cicit yang besar jumlahnya. Guna membina kesejahteraan Keluarga Besar Sutarjo Kartohadikusumo, telah didirikan **Yayasan Sutarjo** yang berkantor pusat di jalan Raden Saleh 18 Jakarta. Di samping bergerak di bidang usaha atau industri guna ikut menopang kesejahteraan Keluarga Besar tersebut, Yayasan ini juga menghimpun dokumen-dokumen sejarah, buku, foto dan peninggalan-peninggalan lain dari almarhum Sutarjo Kartohadikusumo. Sebagian besar dokumen-dokumen tersebut disimpan di kompleks jalan Raden Saleh 18 Jakarta.

Demikianlah Keluarga Besar Sutarjo Kartohadikusumo yang ditinggalkan, sampai sekarang semuanya masih utuh, rukun dan saling membantu dalam menghadapi persoalan bersama atau masalah keluarga.

Kini sampailah kita pada bagian terakhir tulisan ini yaitu penutup.

BAB V. PENUTUP

Selain sedikit ulasan, bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan uraian biografi almarhum Dr. HC Sutarjo Kartohadikusumo, yang lebih banyak dikenal masyarakat sebagai **Tokoh Petisi Sutarjo**.

Sutarjo Kartohadikusumo, dilahirkan di Kunduran, kecamatan Kunduran pada tanggal 22 Oktober 1890. Kunduran termasuk daerah kabupaten Blora. Kabupaten ini letaknya dibagian paling timur propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan legenda yang masih hidup sampai sekarang, setidaknya Blora telah dikenal pada abad 17 - 18. Di daerah ini, terutama di kecamatan Randublatung terdapat masyarakat Samin, yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang lain dari masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Dengan pimpinan Samin Surosentiko, masyarakat ini pernah menentang penjajahan Belanda. Dewasa ini yang cukup menonjol dari daerah Blora adalah sumber bahan bangunan yang paling baik kualitasnya yaitu kayu jati dan sumber serta pengolahan minyak tanah di Cepu. Di Cepu juga terdapat AKAMIGAS merupakan satu-satunya akademi dibidang perminyakan yang ada di Indonesia.

Sutarjo adalah keturunan Pamong Praja. Ayahnya Mas Kartorejo menjabat sebagai Wedana Bancar, kabupaten Tuban Jawa Timur. Beliau adalah anak Kiai Kartowijoyo Lurah Pandean, kabupaten Tuban. Nenek moyang Sutarjo dari pihak ayah ini adalah yang memegang pemerintahan di Madura. Sedangkan ibunya Mas Ayu Kartorejo adalah anak Jurutulis kawedanan Karangjati Blora, bernama Mas Nitidiwiryono. Apabila ditarik garis ke atas, nenek moyang Sutarjo dari pihak ibu ini adalah yang memegang pemerintahan di Banten. Dengan demikian Sutarjo memiliki darah campuran Madura dan Banten, tetapi ia lahir dan dibesarkan di Jawa Tengah. Sehingga adat istiadat dan kepribadiannya lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa. Namun demikian pandangannya luas, bersifat nasional dan perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bertahap lewat **petisinya** dan membela rakyat kecil, bersifat nasional untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Setelah tamat ELS, Sutarjo melanjutkan ke OSVIA di Magelang, merupakan sekolah khusus untuk mendidik Pamong Praja Bumiputra. Lama pendidikannya 6 tahun, tiga tahun untuk mencapai tingkatan sederajat MULO atau SMTP (**Sekolah Menengah Tingkat Pertama**), sedangkan tiga tahun lagi untuk mencapai tingkatan sederajat AMS (**Sekolah Menengah Tingkat Atas**). Tahun 1911 beliau tamat dari sekolah ini. Kemudian terjun

ke Pamong Praja, namun pada tahun 1919 Sutarjo mendapat kesempatan melanjutkan sekolah lagi di **Bestuurschool** Jakarta. Pada sekolah Pamong Praja yang setingkat dengan akademi ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan ia lulus tahun 1921.

Pada tanggal 1 Mei 1914 Sutarjo melangsungkan perkawinannya dengan gadis pilihannya Siti Jaetun Kamarrukmi, putri Prawirorejo Wedana Kranggan, kabupaten Rembang. Dari perkawinan yang berbahagia ini memperoleh duabelas putra, namun putra yang ke lima meninggal dunia pada waktu masih kecil. Istri yang setia ini hanya dapat mendampingi selama lebih kurang 33 tahun, beliau wafat mendahuluinya di tengah-tengah masa revolusi fisik, tanggal 26 Agustus 1947 di Tawangmangu, Surakarta. Setelah ditinggalkan istri tercinta ini, Sutarjo merasakan bagai burung bersayap satu. Untuk melengkapinya apa yang dirasa kurang ini, beliau kawin lagi dengan Siti Suratkabirun, kemenakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang telah ditinggal wafat suaminya. Namun istri yang kedua inipun tidak lama mendampingi Sutarjo, karena sepuluh tahun setelah perkawinannya beliau meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1958. Waktu itu anak-anak masih kecil, lebih dari separuhnya belum berkeluarga. Mereka ini membutuhkan pendidikan yang cermat dari orang tua. Oleh karena itu dipandang perlu Sutarjo kawin lagi. Dan ketemulah jodoh Sutarjo yang ketiga yaitu GBRA Kus Subandinah, adalah adik Sri Paku Alam VIII. Istri ketiga inilah yang mendampingi Sutarjo sampai akhir hayatnya. Namun kedua istri yang terakhir ini dalam perkawinannya dengan Sutarjo tidak dikaruniai putra.

Ada beberapa hobby yang dimiliki Sutarjo. Diantaranya ialah bidang olah raga, kesenian, membaca maupun menulis. Bidang olah raga yang digemari oleh Sutarjo adalah sepak bola, naik kuda, berjalan kaki, lari, dan treksandow. Ia pernah mendirikan organisasi sport yang hanya satu-satunya di Indonesia pada saat itu. Organisasi itu ialah ISI (**Ikatan Sport Indonesia**) dan beliau duduk sebagai Ketua organisasi ini sejak tahun 1937 - 1943. Pada zaman Belanda kegiatannya antara lain menyelenggarakan POR. Kegiatan ini penting artinya untuk memupuk jiwa nasional, sportif dan sehat. Di bidang kesenian, kegemaran Sutarjo antara lain ; musik, kerawitan, seni tari, wayang.

Bagaimana kepribadian Sutarjo ? Ada beberapa sifat kepribadian Sutarjo yang positif, antara lain sifat berhati-hati dalam berbicara dan bersikap, berbudi halus, penyabar, teliti, sportif, tenang, pandai menggunakan waktu, suka bekerja, dinamis, sederhana, hemat, berpendirian tetap, disiplin, penganut agama Islam yang taat dan aktif beribadat, sosial, rendah hati, tidak suka menonjolkan diri, memberi contoh yang baik. Namun demikian, ibarat tak ada gading yang tak retak, Sutarjo-pun memiliki

kelemahan pula, antara lain cepat percaya kepada orang lain. Sifat ini mengandung kelemahan, apabila orang yang dipercayakan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Misalnya waktu beliau memimpin Bank Pegawai, Sutarjo mendapatkan pinjaman modal dari keluarga Sri Paku Alam VIII. Uang ini dipercayakan kepada seseorang untuk modal Bank tersebut, namun orang itu berbuat curang sehingga uang pinjaman akhirnya habis. 1)

Bagaimana perjuangan Sutarjo ? Sebelumnya perlu ditinjau sejenak karier Sutarjo. Setelah lulus OSVIA, Sutarjo magang terlebih dulu sebagai Calon Pegawai di kecamatan Kunduran. Tiga bulan kemudian diangkat sebagai **Hulp schriyver** (Pembantu Jurutulis), kemudian menjadi Jurutulis Jaksa dan Mantri Kabupaten. Semuanya dicapai dalam tahun 1911. Pada tahun 1913 diangkat menjadi Jaksa (1915). Tahun 1919 - 1921 bersekolah lagi di **Bestuurschool** Jakarta. Setelah selesai dari sekolah ini, kembali ke Pamong Praja lagi diangkat sebagai Wedana pada tahun 1924. Setahun kemudian kariernya naik lagi menjadi Patih, merangkap **Landrechter** di Gresik (1929 - 1931). Selanjutnya beliau diangkat menjadi anggota **Volksraad**, merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja **Volksraad** (1931 - 1942). Pada zaman Jepang, ada beberapa jabatan yang diduduki Sutarjo. Diantaranya ialah **Naimubu Sanyo** (Pimpinan Departemen Dalam Negeri), **Sutyokan** (Residen) Jakarta (1943).

Pada masa Republik Indonesia, banyak jabatan yang dipangkunya, baik sebagai Pamong Praja, Lembaga pemerintahan, dunia pendidikan, dan lain-lain. Diantaranya ialah : Gubernur Jawa Barat (1945 - 1946), Gubernur dengan tugas sebagai Penasehat Pemerintah Pusat dan sebagai Residen Surakarta (1946 - 1947). Tahun 1947 beliau diangkat menjadi anggota DPA dan Wakil DPA. Kemudian dipilih menjadi Ketua DPA (1948 - 1950). Selanjutnya menjadi anggota DPR (1950 - 1956), Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri (1951 - 1955), Komisaris Urusan Otonomi Daerah (1955 - 1956), Gubernur Diperbantukan Menteri Dalam Negeri (1956 - 1958). Dalam bidang Pendidikan, Sutarjo pernah menjabat sebagai anggota Dewan Kurator Universitas Gajah Mada (1948 - 1967), Dosen Luar Biasa Universitas Pejajaran (1956 - 1964) dan Dosen Luar Biasa IKIP Bandung (1964 - 1966).

Mengenai perjuangan Sutarjo, pada zaman Belanda ia menjadi terkenal karena mengajukan Petisi Sutarjo pada tahun 1936. Walaupun **Volksraad** menyetujui, tetapi akhirnya pemerintah di Nederland menolak. Hal ini menimbulkan reaksi-reaksi kaum pergerakan baik di Indonesia maupun yang ada di Nederland.

Selain mengajukan petisi, perjuangannya yang lain selama menjadi anggota **Volksraad** ialah menuntut pemerintah Niderland menyediakan dana sebesar f 25,- juta (Duapuluh lima juga Gulden), untuk memperbaiki sosial ekonomi rakyat. Setelah petisi tersebut ditolak, kegiatan kaum pergerakan lebih banyak disalurkan lewat GAPI (1939).

Pada zaman Jepang ada beberapa jabatan yang diduduki Sutarjo, seperti **Sucokan** (Residen) Jakarta, **Naimubu Sanyo**, Anggota **Cuo Sangiin**, anggota **PUTERA**, anggota **PPKI**, dan lain-lain. Pada zaman Jepang ini Sutarjo pernah ditugaskan memimpin delegasi mengunjungi negara Sakura. Pada masa ini beliau menekankan pentingnya **Corp Pamong Praja**. Dalam bidang pangan, sebagai **Sucokan** Sutarjo banyak membela rakyat terhadap tindakan penguasaan beras oleh orang-orang Tionghoa dan pendistribusian-nya yang dikuasai oleh Jepang. Sebagai anggota **PPKI** beliau ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan Teks Proklamasi yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta di rumah Laksmana Muda Laut Tadasii Maeda dan upacara Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam bidang kesejahteraan rakyat, sosial dan budaya, banyak sumbangan Sutarjo pula untuk memajukan bidang-bidang tersebut. Beliau berjuang lewat organisasi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dalam bidang kesejahteraan, beliau bergerak melalui **POMER** di mana beliau duduk sebagai Ketua, Ketua Panitia Penentang Penghematan Pengajaran bagi bangsa Indonesia; Sutarjo juga berhasil mengajukan tuntutan sebesar Duapuluh lima Gulden untuk perbaikan sosial, ekonomi dan pendidikan rakyat; Anggota Pengurus Yayasan Dana Kerajinan Tangan (**Stichting Fonds voor Klein Nijverheid** (1936 - 1942); Mendirikan Bank Sutarjo dan Bank Pegawai; Ketua Yayasan Balai Pembangunan Daerah (1957 - 1965); Ketua Dewan Presidium Persatuan Pensiunan RI yang kemudian menjadi **PWRI**, dan lain-lain.

Dalam bidang sosial banyak sumbangannya pula. Misalnya bidang sport, Palang Merah Indonesia, Pemerintahan Desa, dan lain-lain Dibidang sport. beliau mendirikan **ISI** dan menyelenggarakan **POR**.

Sedangkan di bidang kebudayaan, Sutarjo duduk dalam berbagai kepanitiaan seperti Panitia Adat dan Tatanegara (1942), Panitia Bahasa Indonesia (1942), Anggota Badan Penasehat Pusat Kebudayaan Indonesia (1943), membina siaran Radio Ketimuran dan berhasil mendirikan **PPRK** yang dapat menumbangkan persaingan serta monopoli Radio Belanda **NIROM**.

Sedangkan di bidang persuratkabaran, beliau aktif memimpin penerbitan beberapa majalah misalnya **Swatantra**, menulis untuk dimuat di surat kabar, majalah atau diterbitkan dalam bentuk buku

Pada masa Republik Indonesia, pengabdianya diteruskan melalui berbagai lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan. Di bidang pemerintahan beliau bergerak lewat jabatan-jabatan yang diduduki, seperti Anggota PPKI, Anggota KNIP, Gubernur Jawa Barat, Residen Surakarta, Gubernur diperbantukan pada Departemen Dalam Negeri, Anggota/Wakil Ketua/Ketua DPA, Anggota DPR, dan lain-lain. Kegiatannya antara lain : menyampaikan usul sumpah/janji setia para Bupati, pegawai negeri dan pamongpraja lainnya kepada pemerintah Republik Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu; Saran menentang **Gendarmarie** bersama yang dituntut pihak Belanda; menentang penggabungan PMI dengan Palang Merah Belanda, peningkatan kewaspadaan dalam menghadapi Agresi Militer Belanda dan Pemberontakan PKI/Madiun; menegakkan kewibawaan pemerintah pada waktu ibukota RI Yogyakarta diduduki Belanda dan ketika para pemimpin ditawan Belanda. Selain itu juga ikut mengusahakan perbaikan gaji pegawai negeri dan para pensiunan melalui kedudukannya sebagai Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri, Ketua Presidium PPRI/PWRI dan lain-lain.

Di bidang pendidikan, beliau mengabdikan dirinya sebagai Anggota **Dewan Kurator Universitas Gajah Mada**, **Dosen Luar Biasa** pada Universitas Pejajaran dan IKIP Bandung. Pengabdianya di bidang Pendidikan ini membuahkan hasil sampingan pula dengan dianugerahkannya **Gelar Doctor Honoris Causa** dari IKIP Bandung. Pemikirannya untuk memperbaiki nasib rakyat di desa tetap diperjuangkan sampai akhir hayatnya. Mengenai hasil karyanya, banyak sekali tulisan-tulisannya baik yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku, dimuat di majalah atau surat kabar. Diantaranya yang menonjol adalah bukunya yang berjudul **Desa**.

Ada empat Tanda Kehormatan yang dianugerahkan kepada Sutarjo. Tanda-tanda kehormatan itu adalah : Bintang Maha Putera Tingkat IV; **Gelar Doctor HC** dalam Ilmu Pendidikan bidang Pendidikan Masyarakat; Satya Lencana Karya Satya tingkat II dan Anugerah Gelar Pangeran dengan sebutan **KPH Sutarjo Kartaningsprang** dari Sri Paku Alam VIII.

Tokoh tiga zaman yang konsekwen dengan cita-citanya ini, selanjutnya sampai pula pada saat terakhir pengabdianya. Beliau wafat pada tanggal 20 Desember 1976 di Jakarta dalam usia 86 tahun, setelah menderita sakit lebih kurang sepuluh hari lamanya. Jenazahnya dimakamkan di Astana Bibis Luhur Surakarta, dengan upacara militer. Almarhum meninggalkan seorang istri dan sebelas orang putra, yang semuanya telah berkeluarga dan bergerak dalam karier masing-masing.

Demikianlah kesimpulan dari biografi Tokoh Dr. Sutarjo Kartohadikusumo. Selanjutnya semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian

dan generasi muda berikutnya bisa mengambil suri tauladan dari segala yang baik dan benar, dari almarhum. Sebagaimana halnya sejarah, biografi pun mempunyai kegunaan yang bersifat edukatif, inspiratif dan rekreatif. Semoga penulisan inipun ada manfaatnya seperti yang tersebut itu. Sudah barang tentu penulisan ini belumlah sempurna, masih mengandung kekurangan-kekurangan. Hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi penulis lain untuk menyempurnakannya, dengan menggali sumber yang lebih luas.

Akhirnya, tidak ada jeleknya apabila di bawah ini kami sajikan pula **Boigrafi Singkat** 2) almarhum, yang merupakan garis besar dari keseluruhan biografi Sutarjo, yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tertentu.

RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : Sutarjo Kartohadikusumo
- II. Tempat dan tanggal lahir : Kunduran (Blora), tgl. 22 Oktober 1890
- III. Alamat terakhir : Jl. Raden Saleh 18 Jakarta
- IV. Pendidikan : 1. Sekolah Dasar Belanda (ELS) di Tuban (1906)
2. Sekolah Pendidikan Pegawai Pamong Praja Bumiputra (OSVIA) di Magelang (1911)
3. Sekolah Pemerintahan (Bestuurschool) di Jakarta (1921).
- V. Riwayat Pekerjaan :
1. Pembantu Juru-tulis (1911)
 2. Juru tulis Jaksa (1911)
 3. Mantri Kabupaten (1911)
 4. Asisten-Wedana (1913)
 5. Adjunct Jaksa (1915)
 6. Jaksa (1915)
 7. Sekolah lagi di Bestuurschool Jakarta (1919 - 1921)
 8. Kembali pada Pamong Praja lagi sebagai Asisten - Wedana Sambong, (1921)
 9. Wedana (1924)
 10. Patih (1925) merangkap Landrechter (1929)
 11. Dipilih sebagai Anggota Volksraad dan Wakil Ketua Badan Pekerja atau College van Gedelegeerden Volksraad (1931)
 12. Sebagai Nalmubu-Sanyo, memimpin Departemen Dalam Negeri (1942)
 13. Syuutyokan (Residen) Jakarta (1943)
 14. Gubernur Jawa Barat (1945).
 15. Gubernur-Penasehat Pemerintah Pusat R.I. (1946)
 16. Anggota Dewan Pertimbangan Agung R.I. (1947).
 17. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung R.I. (1947)
 18. Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1948 - 1950)
 19. Wakil Ketua Dewan Kurator Universitas Gajah Mada (1948 - 1964)
 20. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat R.I. (1950 - 1956)
 21. Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri (1951 - 1956).

22. Komisaris Negara Urusan Otonomi Daerah (1954 - 1956).
23. Gubernur d.p. Menteri Dalam Negeri (1956 - 1958).
24. Dosen Luar Biasa Universitas Pejajaran (1956 - 1964)
25. Dosen Luar Biasa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung (1964 - 1966).

VI. Riwayat Perjuangan/Pergerakan :

1. Ketua Cabang **Boedi Utomo** Magelang (1909 - 1911)
2. Ketua-muda pengurus besar Perhimpunan Pegawai Pamong Praja Berijazah atau **Oud Osoviaanen Bond** (1916 - 1921).
3. Memimpin Redaksi **Kalawarta Oud-Osviaan** (1919 - 1921).
4. Ketua Pengurus Besar **PPBBB** (Persatuan Pegawai Bestuur Bumi-putra) 1929 - 1942.
5. Memimpin **kalawarta Pemimpin** dan **kalawarta Penyuluh** (1929 - 1942).
6. Ketua Pengurus Besar **POMER** (Perhimpunan Untuk Memajukan Ekonomi Rakyat) seluruh Indonesia. (1937 - 1942).
7. Ketua Pengurus Besar **ISI** (Ikatan Sport Indonesia) 1937 - 1942.
8. Ketua Pengurus Besar **PPRK** (Perikatan Perhimpunan-perhimpunan Radio Ketimuran Seluruh Indonesia) 1938 - 1942.
9. Anggota Panitia Hak Pilih atau **Kiesrecht** (1939 - 1942).
10. Anggota Panitia Pendidikan Jasmani atau **Lichamelijke Opvoeding** (1940 - 1942).
11. Ketua Panitia Penentang Penghematan Pengajaran bagi Bangsa Indonesia (1935 - 1936).
12. Anggota Pengurus Yayasan Dana Kerajinan Tangan atau **Stichting Fonds voor Klein Nijverheid** (1936 - 1942).
13. Anggota Panitia Kehormatan Pameran di Nagoya (Japan) 1937.
14. Ketua Panitia **Petisi-Sutarjo** untuk mencapai kedudukan sederajat dengan Nederland (1936 - 1938).
15. Anggota Panitia Adat dan Tatanegara (1942).
16. Anggota Panitia Bahasa Indonesia (1942).
17. Anggota Badan Persiapan Pergerakan Rakyat (1942).
18. Anggota Dewan Pertimbangan **Poetra** (1943).
19. Anggota Badan Penasehat Pusat Kebudayaan Indonesia (1943).
20. Direktur **Soetarjo-Bank** (1940 - 1943).
21. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945).
22. Ketua Pengurus Besar Palang Merah Indonesia (PMI) (1948 - 1950)
23. Presiden Direktur **Bank-Pegawai** (1950 - 1967).

24. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya (1950 - 1956).
25. Ketua Yayasan Balai Pembangunan Daerah (1957 - 1965).
26. Memimpin Redaksi Kalawarta **Swatantra** (1957 - 1958).
27. Ketua Dewan Presidium Persatuan Pensiunan R.I. (1961 - 1965).
28. Ketua Yayasan **Soetarjo** (1946 - 1976).

VII. **Tanda Kehormatan :**

1. Menerima anugerah Bintang MAHAPUTRA Kelas IV dari Pemerintah Republik Indonesia (1962).
2. Mendapat **Gelar Doctor Honoris Causa** dari IKIP Bandung dalam Ilmu Pendidikan Bidang Pendidikan Masyarakat. (1967)
3. Menerima anugerah **Satya Lencana Karya Satya** Klas II, 13 April 1968.
4. Menerima dari Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam ke VIII gelar dan nama Kanjeng Pangeran Hario Soetardjo **Kartaningprang** (1976).

DAFTAR CATATAN

BAB. I

- 1). Bambang Heru Wardiyanto, Blora dari kata Mbah Lora, **Suara Merdeka**, Semarang 29 Juni 1982, hal. 5.
- 2). Loc cit, hal. 5.
- 3). Dr. Slamet Mulyono, **Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia**, jilid II, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1969.
- 4). Team Penyusun Buku Almanak Jawa Tengah, **Jawa Tengah Selayang Pandang**, 1975, hal. 278.
- 5). Ibid, hal. 279.
- 6). Loc cit, hal. 279.
- 7). Surat kabar **Suara Merdeka**, Semarang, 27 Juni 1982, hal. 5.
- 8). Op cit, hal. 282.
- 9). **Jawa Tengah Selayang Pandang**, Op cit, hal. 283.
- 10). **Suara Merdeka**, op cit, hal. 5.
- 11). Bambang Heru Wardiyanto, Blora Dari kata Mbah Lora, **Suara Merdeka** 29 Juni 1982, op cit, hal. 5.
- 12). Yon Hendroyono, Cepu Kota Minyak Abad IX, **Suara Merdeka**, 29 Juni 1982, ibid, hal. V, kolom 6.
- 13). Yon Hendroyono, ibid, hal. 5.
- 14). Kementerian Penerangan, **Republik Indonesia Propinsi Jawa Tengah**, 1952, hal. 288.
- 15). Kementerian Penerangan, ibid, hal. 481 - 482.
- 16). Drs. Setiadi Kartohadikusumo, **Asal usul Mas Sutarjo Kartohadikusumo**, Jakarta, 17 Desember 1981 (Manuskrip). Dalam tulisan aslinya menggunakan ejaan lama, tetapi dalam penulisan ini digunakan ejaan baru.
- 17). Prof. Dr. Garnadi Prawirodirjo, Pidato dalam Wisuda **Gelar Doctor Honoris Causa Sutarjo Kartohadikusumo, Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1969.

- 18). Majalah **Tempo**, tgl. Januari 1977 menyebutkan tanggal lahir Sutarjo 22 Oktober 1890.
Sedangkan sumber yang menyebutkan tgl. 22 Oktober 1892 antara lain: Asal-Usul Sutarjo, yang ditulis Drs. Setiadi Kartohadikusumo (putra Sutarjo Kartohadikusumo); Riwayat Hidup yang dibuat oleh Sutarjo sendiri tgl. 17 Agustus 1965; Riwayat hidup lengkap yang dibacakan waktu menerima **Gelar Doctor HC** di IKIP Bandung, 28 Januari 1967. Sedangkan dalam Riwayat Hidupnya yang lain disebutkan tgl. 22 Oktober 1888.
- 19). Majalah **Tempo**, Jakarta, 1 Januari 1977, hal. 40.
- 20). Wawancara dengan Mr. Abdul Wahab Suryoadiningrat, di Jakarta, tgl. 14 Desember 1981.
- 21). Wawancara Bp. Tony (Reporter Radio Elsinta, Jakarta), dengan Bp. Sutarjo Kartohadikusumo, di Jakarta, tahun 1976.
- 22). Drs. M. Said dan Drs. D. Mansur, **Mendidik dari Zaman ke Zaman**, Cetakan 3, PT Dian Rakyat, Bandung - Jakarta, 1963, hal. 48 - 49.
- 23). Sanusi Pane, **Sejarah Indonesia**, jilid II, Perpustakaan Perguruan, Kementerian PP dan K, Jakarta 1956, hal. 206 - 207.
- 24). Majalah **Berita Buana**, Jakarta, 28 Desember 1976, hal. 3.
- 25). **Berita Buana**, Loc cit.
- 26). Wawancara dengan Mayor Jenderal Purnawirawan Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tgl. 13 Desember 1981.
- 27). Majalah **Tempo**, Jakarta, 1 Januari 1977, hal. 40.
- 28). Wawancara dengan Mr. Abdul Wahab Suryodiningrat, op cit.
- 29). Mayjen. Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, Catatan Silsilah Sutarjo Kartohadikusumo, Jakarta, 17 Desember 1981.
- 30). Wawancara dengan Mayjen. Purnawirawan Drs. M. Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tgl. 13 Desember 1981.
- 31). Surat pengangkatan Sutarjo Kartohadikusumo dari Presiden Sukarno, sebagai Gubernur Jawa Barat, Jakarta, 19 Agustus 1945.
- 32). Disjarah Dam VI/Siliwangi, **Siliwangi Dari Masa ke Masa**, Angkasa, Bandung 1979, hal. 42 - 43.
- 33). Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, op cit.
- 34). Mayjen Purn. Drs. Setiadi Kartohadikusumo, ibid.
- 35). Wawancara dengan Bp. Susatyo Kusumonoto dan GBRA Kus Subandinah di Jakarta, tgl. 14 Desember 1981.

- 36). Wawancara dengan Ny. Edinah Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, 16 Juni 1981.
- 37). Wawancara dengan Bp. Susatyo Kusumonoto, loc cit.
- 38). Sutarjo Kartohadikusumo, **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, Balai Pustaka, Jakarta, 1969, hal. 78.
- 39). Wawancara dengan Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tgl. 13 Desember 1981.
- 40). Majalah **Tempo**, Jakarta 1 Januari 1977, hal. 39 - 40.
- 41). Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, op cit.
- 42). Wawancara dengan Bp. Susatyo Kusumonoto, di Jakarta, 14 Desember 1981.
- 43). Wawancara dengan Ny. Edinah Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tgl. 16 Juni 1981.
- 44). Wawancara dengan Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tanggal 15 Juni 1981 dan 13 Desember 1981.
- 45). Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, ibid.
- 46). IPL Tobing, **Mungkinkah Bangsa Indonesia melupakan Sutarjo (manuskrip)**, Jakarta, 19 September 1980.
- 47). Wawancara dengan Mr. Abdul Wahab, di Jakarta, tanggal 14 Desember 1981.
- 48). Wawancara dengan Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tgl. 15 Juni 1981.
- 49). Wawancara dengan Mr. Abdul Wahab, di Jakarta, tgl. 14 Desember 1981.
- 50). Mr. Abdul Wahab, ibid.
- 51). Sutarjo Kartohadikusumo, **Dasar Esentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, Balai Pustaka, Jakarta 1969.
- 52). Sutarjo Kartohadikusumo, **Dasar Esentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, Jawab atas pertanyaan Senat Guru Besar IKIP Bandung, waktu Wisuda **Gelar Dr. HC**, tgl. 28 Januari 1967, hal. 73.

BAB. II

- 1). S. Woyowasito, Prof. Drs. cs, **Kamus Umum Inggris - Indonesia**, Cypress, Jakarta, 1972, hal. 41.
- 2). Sutarjo Kartohadikusumo, jawaban pertanyaan Senat Guru Besar IKIP Bandung, pada Wisuda **Gelar Doctor HC Sutarjo Kartohadikusumo, Dasar Esentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, PN Balai Pustaka, Jakarta 1969, hal. 73.
- 3). Profesor Dr. Sikun Pribadi, Pidato, pada Wisuda **Gelar Doctor Honoris Causa Sutarjo Kartohadikusumo** tanggal 28 Januari 1967, dimuat dalam buku **Dasar Esentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1969, hal. 24.
- 4). Wawancara dengan Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tgl. 13 Desember 1981.
- 5). Majalah **Tempo**, Jakarta, 1 Januari 1977, hal. 40 - 41.
- 6). Pak Diro (Sudiro), **Pak Tarjo Selamat Jalan**, Berita Buana, Jakarta, 28 Desember 1976, hal. 6.
- 7). Pak Diro, loc cit, hal. 6.
- 8). Pak Diro, loc cit.
- 9). Sutarjo Kartohadikusumo, **Lahirnya Petisi Sutarjo Menandai Gejala Keruntuhan Kolonial Belanda**, Manuskrip, hal. 1 - 2.
- 10). Ibid, hal. 2
- 11). Ibid, hal. 2 - 3.
- 12). Yusmar Basri, **Petisi Sutarjo, Seminar Sejarah Nasional II**, di Yogyakarta, 26 - 29 Agustus 1970, hal. 17.
- 13). Sutarjo Kartohadikusumo, **Lahirnya Petisi Sutarjo**, op cit, hal. 3 - 4.
- 14). Loc cit, hal. 4.
- 15). Sutarjo Kartohadikusumo, Ibid, hal. 5.
- 16). Ibid, hal. 6.
Periksa juga tulisan Susan Abeyasekere, **The Sutarjo Petition**, (Centre of South East Asian Studies Monash University Australia), hal. 84.
- 17). Sutarjo Kartohadikusumo, **Lahirnya Petisi Sutarjo**, loc cit, hal. 6.
Naskah aslinya berbahasa Belanda, diterjemahkan oleh H. Agus Salim dalam buku **Hindia Berdiri Sendiri**, Usul Petisi Sutarjo Kartohadikusumo cs, terjemahan dari bahasa Belanda, Penerbit NV **Nederlandsch Anneming Mij** v/n Firma Boersman, **Gravenhage**, Batavia.

- 18). Sutarjo Kartohadikusumo, *ibid*, hal. 7.
- 19). Yusmar Basri, **Petisi Sutarjo**, *op cit*, hal. 7. Periksa juga Susan Abeyasekere, *op cit*, hal. 92.
- 20). Yusmar Basri, *ibid*, hal. 8
Susan Abeyasekere, *op cit*, hal. 91.
- 21). Sutarjo Kartohadikusumo, *op cit*, hal. 7 - 8.
- 22). Yusmar Basri, *op cit*, hal. 7 - 8.
- 23). Sutarjo Kartohadikusumo, *op cit*, hal. 7 - 8.
- 24). Yusmar Basri, *op cit*, hal. 4.
- 25). Sutarjo Kartohadikusumo, *op cit*, hal. 8.
- 26). Yusmar Basri, *op cit*, hal. 9.
- 27). Sutarjo Kartohadikusumo, *op cit*, hal. 8.
- 28). Prof. Dr. Garnadi Prawirodirjo, *Riwayat hidup Promovendus, Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo, Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila*, *op cit*, hal. 13 dan hal. 80.
- 29). **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, *ibid*, hal. 80.
- 30). Yusmar Basri, *op cit*, hal. 11 - 13.
- 31). Yusmar Basri, *ibid*, hal. 14 - 17.

Periksa pula Umi Prahastuti, **Gabungan Politik Indonesia , Seminar Sejarah II**, Yogyakarta, 26 - 29 Agustus 1970, hal. 1 - 15.

- 32). Prof. Dr. Slametmulyono, **Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia**, jilid II, PN Balai Pustaka, Jakarta 1969, hal. 72 - 73.
- 33). Majalah **Tempo**, Jakarta, 1 Januari 1977, hal. 41.
- 34). Wawancara dengan Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tgl. 13 Desember 1981.
- 35). Sutarjo Kartohadikusumo, *op cit*, hal. 20.
- 36). Sutarjo Kartohadikusumo, Bung Hatta dan Pamong Praja, dalam buku **Bung Hatta Mengabdikan pada Cita-cita Perjuangan Bangsa**, Cetakan 1, Penerbit Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70, Jakarta 1972, hal. 206 - 207.
- 37). Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, *op cit*, tgl. 13 Desember 1981.
- 38). Drs. Ariwiadi, **Ikhtisar Sejarah Nasional Indonesia** (Awal - sekarang), Seri Text Book Sejarah ABRI, Dep. Hankam, Pusat Sejarah ABRI, 1971, hal. 89 - 90.

- 39). George Mac Turnan Kahin, **Nationalism and Revolution in Indonesia**, Cornell University, New York, 1959.
- 40). Prof. Dr. Slamet Mulyono, **Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia**, jilid II, op cit, hal. 154 - 155.
- 41). T.B. Simatupang, **Pelopop Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai**, Yayasan Pustaka Militer, Jakarta 1954, hal. 40 - 41.
- 42). G. Mc.T. Kahin, op cit, hal. 106 - 108.
- 43). Ibid, hal. 110.
- 44). Prof. Dr. Garnadi Prawirosudirjo, **Riwayat Hidup Promovendus Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo, Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, op cit, hal. 14 dan 77.
- 45). Wawancara dengan Mayjen Purn. Drs. Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, 13 Desember 1981.
- 46). Sutarjo Kartohadikusumo, Jawaban atas pertanyaan Dewan Guru Besar IKIP Bandung waktu menerima **Gelar Doctor HC**. tgl. 28 Januari 1967, **Dasar Essentieel Pendidikan Sarjana Pancasila**, op cit, hal. 74.
- 47). Dr. Sutarjo Kartohadikusumo, **Bung Hatta dan Pamongpraja, Bung Hatta Mengabdikan Cita-cita Perjuangan Bangsa**, cetakan I, Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70, Jakarta, 1972, hal. 207 - 208.
- 48). Sudiro, Pak Tarjo Selamat Jalan, **Berita Buana**, Jakarta 28 Desember 1976, hal. 6.
- 49). Wawancara dengan Mayjen Purn. Drs. Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tgl. 15 Juni 1981 dan tgl. 13 Desember 1981.
- 50). Slamet Mulyono, Prof. Dr., **Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia**, II, op cit. hal. 163.
- 51). Drs. Moh. Hatta, **Legende dan Realitet Sekitar Proklamasi 17 Agustus, "Kumpulan Karangan IV**, Balai Buku Indonesia, Jakarta 1954, hal. 283 - 284.
- 52). Dr. Sutarjo Kartohadikusumo, **Bung Hatta dan Pamongpraja, Bung Hatta Mengabdikan pada Cita-Cita Perjuangan Bangsa**, op cit, hal. 208 - 209.
- 53). Cindy Adam, **Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat**, terjemahan Mayor Abdul Bur Salim, Gunung Agung, Jakarta 1966, hal. 323 - 324. Periksa juga Moh. Hatta, **Sekitar Proklamasi**, Tintamas, Jakarta 1969, hal. 37 - 47.
- 54). Dr. Sutarjo Kartohadikusumo, op cit, hal. 209 - 210.

- 55). **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, op cit, hal. 14 dan 78.
- 56). Wawancara dengan Bapak Ky. Ng. Pudyono Citrosomo, di Surakarta tgl. 15 Juni 1982.
- 57). Op cit, hal. 11 dan 77.
- 58). Wawancara dengan Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tanggal 13 Desember 1981.
- 59). Loc cit.
- 60). Wawancara dengan Bp. Setiajid dan Susatyo Kusumonoto, di Jakarta, tgl. 14 Desember 1981.
- 61). Wawancara dengan Mr. Abdul Wahab, di Jakarta, tanggal 14 Desember 1981.
- 62). Ky. Ng. Pudyono Citrosomo, op cit, tgl. 15 Juni 1982.
- 63). Pak Diro, Pak Tarjo Selamat Jalan, **Berita Buana**, 28 Desember 1976, hal. 6.
- 64). **Tempo**, Tamu Kita - Sutarjo Pembuat Petisi itu, Jakarta, tanggal 1 Januari 1977, hal. 42.
- 65). **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, op cit, hal. 77 - 78.
Wawancara dengan Bp. Setiajid dan Bp. Susatyo Kusumonoto, di Jakarta, tgl. 14 Desember 1981.
- 66). **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, ibid, keterangan gambar.
- 67). Sarino Mangunpranoto, Kata Sambutan Menteri PP dan K Sarino Mangunpranoto dalam menanggapi penerbitan risalah Wisuda Gelar **Doctor Honoris Causa** Sutarjo Kartohadikusumo, **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, ibid, hal. 7 - 8.
- 68). Pak Diro, **Berita Buana**, op cit, hal. 6.
- 69). Akhmadi, Rekomendasi dan tanggapan terhadap buku Desa karangan Bp. Sutarjo Kartohadikusumo, Departemen Dalam Negeri - Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Jakarta, 9 Nopember 1976.
- 70). Prof. Dr. Garnadi Prawirosudirjo, Riwayat Hidup Promovendus Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo, **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, op cit, hal. 11 - 12. Periksa juga : **Wisuda Gelar Dr. HC** Sutarjo Kartohadikusumo, IKIP bandung, 28 - 1 - 1967, hal. 7 - 11.
- 71). **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, ibid, hal. 181.
- 72). Loc cit

- 73). **Sejarah Hari Radio di Indonesia**, Cetakan I, Kementerian Penerangan - Jawatan Radio Republik Indonesia, 1953, hal. 11 - 12.
- 74). Loc cit, hal. 12 - 14. Periksa juga tulisan Drs. Onong Ukhyana Effendi MA yang berjudul **11 September Hari Radio atau Hari RRI**, Kompas, 9 September 1974.
- 75). **Sejarah Hari Radio di Indonesia**, ibid, hal. 15 - 16.
- 76). Ibid, hal. 19.
- 77). Loc cit, hal. 19. Periksa pula buku **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, op cit, keterangan gambar.
- 78). **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, ibid, hal. 77. Periksa juga : majalah **Tempo**, Jakarta, 1 Januari 1977, hal. 42.

BAB III.

- 1). Kementerian Penerangan, **Detik dan Peristiwa 17 Agustus 1945**, 23 Januari 1950, hal. 7.
- 2). Moh. Hatta, Isi Proklamasi, **Kumpulan Karangan**, IV, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1954, hal. 289.
- 3). Dr. Sutarjo Kartohadikusumo, Bung Hatta dan Pamong Praja, dalam buku **Bung Hatta Mengabdikan pada Cita-Cita Perjuangan Bangsa**, Cetakan I, Panitia Penerbitan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70, Jakarta 1972, hal. 210 - 213.
- 4). Ibid, hal. 213 - 214.
- 5). Surat Pengangkatan M. Sutarjo Kartohadikusumo menjadi Gubernur Jawa Barat, ditanda tangani Presiden Sukarno, 19 Agustus 1945.
- 6). Kementerian Penerangan, **Republik Indonesia - Daerah Istimewa Yogyakarta**, 1953, hal. 129 - 130.
- 7). Drs. Tanu Suherly, **Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia**, D, Seri Text Book Sejarah ABRI, Dep. Pertahanan - Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1971, hal. 21.
- 8). Surat Pengangkatan Presiden Rep. Indonesia, No. 37-A-'47, Jakarta 3 Juni 1947.
- 9). Surat Keputusan Presiden RI, Nomer 89/A.Civ/48, tanggal 15 Nopember 1948. Untuk Petikan disahkan oleh Sekretaris Negara II Mr. Ikhsan.
- 10). Surat Keputusan Presiden RI, Nomer 109/M/tahun 1953.

- 11). Dr. A.H. Nasution, Jenderal TNI, **Sejarah Perjuangan Nasional Di-bidang Bersenjata**, Mega Bookstore, Jakarta, 1966, hal. 100.
- 12). **Gelar Doctor Honoris Causa** Sutarjo Kartohadikusumo, **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, Balai Pustaka, Jakarta 1969, hal. 22.
- 13). Loc cit, hal. 22.
- 14). Prof. Dr. Garnadi Prawirosudirjo, Riwayat Hidup Promovendus Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo, **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, ibid, hal. 13.
- 15). Teks Sumpah Sutarjo Kartohadikusumo sebagai anggota DPR, Jakarta, 16 Agustus 1950 (Periksa Lampiran).
- 16). Riwayat Hidup Lengkap Sutarjo Kartohadikusumo, **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, op cit, hal. 76 - 77.
Periksa pula Tajuk, **Harian Sinar Harapan**, Jakarta, 21 Desember 1976.
- 17). Riwayat Hidup Singkat Sutarjo Kartohadikusumo, Loc cit.
- 18). Loc cit, hal. 76 - 77.
Periksa pula **Harian Sinar Harapan**, Jakarta, 20 Desember 1976, hal. 1 - 16.
- 19). Prof. Dr. Sikun Pribadi, Pidato pada Wisuda **Gelar Doctor Honoris Causa** Sutarjo Kartohadikusumo, di IKIP Bandung, 28 Januari 1967, dimuat dalam buku **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, op cit, hal. 23 - 24.
- 20). Prof. Dr. Sikun Pribadi, ibid, hal. 24 - 25.
- 21). Prof. Dr. Sikun Pribadi, ibid, hal. 26 - 27.
- 22). Piagam **Gelar Doctor Honoris Causa** atas nama Sutarjo Kartohadikusumo dari IKIP Bandung, tanggal 28 Januari 1967. (Periksa lampiran).
- 23). Surat Keputusan Rektor IKIP Bandung, No. 048/Ist/Sp. Rek/IKIP/66, tanggal 20 Desember 1966 (Periksa lampiran).
- 24). Sarino Mangunpranoto, Kata Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Penerbitan Risalah Wisuda **Gelar Doctor Honoris Causa** Sutarjo Kartohadikusumo, dimuat dalam buku **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, op cit, hal. 5 - 6.
- 25). Wawancara dengan Ny. Edinah Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tanggal 16 Juni 1981.
- 26). Majalah **Tempo**, Jakarta, 1 Januari 1977, hal. 39.

- 27). **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, op cit, hal. 83 - 85. Periksa pula : Yusmar Basri, **Petisi Sutarjo - usul Indonesia Berdiri Sendiri**, Seminar Sejarah II, Yogyakarta 26 - 29 Agustus 1970; Majalah **Tempo**, Jakarta 1 Januari 1977; Buku-buku karya Sutarjo seperti : **Musyawaharah dan Mufakat** (1963); **Rapat Desa; Desa; Rumah Tangga Desa; Membangun Masyarakat Murba**; dan buku **Bung Hatta Mengabdikan Pada Cita-Cita Perjuangan** (1972).
- 28). Drs. Sutrisno, **Letnan Jenderal Anumerta Siswondo Parman**, Dep. P dan K, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya - Proyek IDSN, Jakarta, 1980/1981, hal. 187 - 189.
Periksa juga : Dinas Sejarah Militer TNI—AD, **Cuplikan Sejarah Perjuangan Angkatan Darat**, Dinas Sejarah Militer TNI—AD dan Fa. Mahyuma, Bandung - Jakarta, 1972, hal. 348 - 356.
- 29). Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra tingkat IV, dianugerahkan kepada Sutarjo Kartohadikusumo, 17 Agustus 1962. (Periksa lampiran).
- 30). Riwayat Hidup Singkat Sutarjo Kartohadikusumo (**Manuskrip**).
- 31). Piagam **Gelar Doctor Honoris Causa** untuk Sutarjo Kartohadikusumo, dalam Ilmu Pendidikan Bidang Pendidikan Masyarakat dari IKIP Bandung, 28 Januari 1967 (Periksa lampiran).
- 32). Piagam **Gelar Pangeran** dan Sebutan **Dr. KPH Sutarjo Kartohadikusumo Kartaningprang**, dari KGPAA Paku Alam VIII, No. 1/2507/Ch/Ws/1976. (Periksa lampiran).

BAB IV.

- 1). Wawancara dengan Mayjen Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta, tgl. 13 Desember 1981.
- 2). Ucapan Terima Kasih, **Kompas**, 27 Desember 1976.
- 3). Wawancara dengan Bp. Susatio Kusumonoto dan Bp. Setiajid, di Jakarta, 15 Desember 1982.
- 4). Ucapan Terima Kasih, **Kompas**, 27 Desember 1976.
Periksa juga Berita Lelayu (terlampir).
- 5). Harian **Berita Buana**, Jakarta, 28 Desember 1976, hal. 3.
Periksa pula : Ucapan Terima Kasih, loc cit; Berita Lelayu, loc cit dan wawancara dengan Bp. Susatyo Kusumonoto, op cit.
- 6). Ucapan Terima Kasih, loc cit.

- 7). Tanggal wafat istri pertama Mas Ayu Siti Jaetun Kamarrukmi pada batu nisan tertulis tgl. 27 Agustus 1947. Tetapi pada Silsilah Keluarga tertulis tgl. 26 Agustus 1947. Di sini penulis mengikuti apa yang tertulis pada batu nisan.
- 8). Wawancara dengan Mayor Jenderal Purnawirawan Drs. Setiadi Kartohadikusumo, op cit.
- 9). Ucapan Terima Kasih, **Kompas**, 27 Desember 1976.
- 10). Wawancara dengan Bp. Susatyo Kusumonoto dan Bp. Setiajid di Jakarta, 15 Desember 1981.
Periksa juga Rekaman wawancara Pak Sony dari Radio El Shinta dengan almarhum, tahun 1976.
- 11). Sutarjo Pembuat Petisi itu, **Tempo**, Jakarta, 1 Januari 1977, hal. 42.
- 12). Wawancara dengan Ny. Edinah Setiadi Kartohadikusumo, di Jakarta tanggal 16 Juni 1981.
Periksa pula : Ucapan Kasih Keluarga, tanggal 23 Desember 1976 yang dimuat pada Harian **Kompas**, Jakarta, 27 Desember 1976, dan **Daftar Asal Usul**, disusun Drs. Setiadi Kartohadikusumo, Jakarta, 17 Desember 1981.

BAB V.

- 1). Wawancara dengan Bp. Pudyono, di Surakarta, tanggal 15 Juni 1982.
- 2). Riwayat Hidup Lengkap Sutarjo Kartohadikusumo, Lampiran II, **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, Balai Pustaka, Jakarta, 1969, hal. 78 - 82.
Periksa pula : Drs. Setiadi Kartohadikusumo, **Asal-Usul Mas Sutarjo Kartohadikusumo**, Jakarta, 17 Desember 1981 (manuskrip).

REPUBLIK INDONESIA

Kami, Presiden Republik Indonesia,
mengangkat

M. SOETARDJO KARTOHADIKOESOKMO

mendjadi GOEBERNOER DJAWA BARAT
dalam Negara Republik Indonesia, dengan kepertujuan
jang ia akan menoesmpahkan segala pikiran, tenaga,
djwa dan raga oentoek keselamatan Negara Republik
Indonesia.

Djakarta, 19 Agustus 1945.

Presiden Republik Indonesia,

Soekarno.

Ir. Soekarno.

REPUBLIK INDONESIA

Kami, Presiden Republik Indonesia, mengangkat

M. SONTARDEO KARTOLEDIKOESOELO

mendjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung

*dalam Negara Republik Indonesia, dengan kepertjajaan
jang ia akan menoempahkan segala pikiran, tenaga, djiwa
dan raga oentoek keselamatan Negara Republik Indonesia.*

Jogjakarta, 23 Marst. 1947.....

Presiden Republik Indonesia

Soekarno.

Soekarno

No.37-A-47

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : dsb.

Mengingat: dsb.

Mem o e s t o e s k a n :

Terhitoeng moelai tg. 23 April 1947 mengangkat

M. SOETARDJO KARTOHADIKOESOMO,

Penasehat Kementerian Dalam Negeri merangkap anggota Dewan
Pertimbangan Agoeng, mendjadi Wakil Ketoea II dari Dewan ter-
seboet.

Koetipan poetoesan ini dikirimkan kepada:

1. J.M. Menteri Dalam Negeri Poerwokerto
2. Ketoea Dewan Pertimbangan Agoeng Jogjakarta
3. Kementerian Keoesangan Magelang (rangkap 2)
4. Kantor Padjak Jogjakarta

dan petikan diberikan kepada

Jang berkepentingan oentoek diketahoesi.

Jogjakarta, 3 Djoeni 1947,-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



(SOEKARNO)

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : IV

Kami, Presiden Republik Indonesia, mengangkat

M. SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO

mendjadi Wakil Ketua II dari Dewan Pertimbangan Agung
terhitoeng moelai tg. 23 April 1947

*dalam Negara Republik Indonesia, dengan kepertajaan
jang ia akan menoempahkan segala pikiran, tenaga, djiwa
dan raga oentoek keselamatan Negara Republik Indonesia.*

Jogjakarta, 3 Djoeni 1947.-

Presiden Republik Indonesia

Soekarno.

Soekarno.

Salinan

LAMPIRAN : V

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. : 109/M TAHUN 1953**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : dsb.-
Menimbang : dsb.-
Mengingat : dsb.-
Mengingat pula : dsb.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1948 menjatakan bahwa

SAUDARA SUTARDJO KARTOHADIKUSUMO

Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri dianggap telah diangkat dalam djabatan, golongan serta gadji seperti termaktub dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar lampiran surat Keputusan ini, dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan lain jang sah jang berhubungan dengan djabatan-nja.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 15 Nopember 1948 menjatakan bahwa

SAUDARA SUTARDJO KARTOHADIKUSUMO

dianggap telah diperhentikan dari pekerjaannya (non aktif) sebagai Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, berhubungan dengan pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, dengan ketentuan bahwa :

- a. semendjak dan selama jang bersangkutan mendjalankan kewadajiban sebagai Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu mulai tanggal 17 Agustus 1950, ia tetap berkedudukan sebagai Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri jang diperhentikan (non aktif) dari pekerjaannya;
- b. djika kemudian ternjata ada kekeliruan dalam penetapannya, maka hal itu akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

Ketiga : Mempersilahkan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung untuk mentjabut surat Keputusan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tanggal 8 Maret 1950 No. 334/IAP.

SALINAN : dsb.-

P E T I K A N
SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 89/A. Civ./48

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dsb.-

Mengingat : dsb.-

M e m u t u s k a n :

Mengangkat :

M. SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO

mendjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung dengan gadji pokok R. 700.--
(tudjuh ratus rupiah) sebulan, terhitung mulai tanggal 15 Nopember 1948.

Jogjakarta, 15 Nopember 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

Untuk Petikan jang sjah
SEKRETARIS NEGARA II,

(Mr. ICKSAN)

Saja, M. SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO

Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, bersumpah di hadapan P.J.M. Presiden :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk
"diangkat mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan
"Rakjat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau
"dalih apapun, tiada memberikan atau mendjanjikan
"ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.
"Saja bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
"melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-
"kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung,
"dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.
"Saja bersumpah, bahwa saya senantiasa akan membantu
"memelihara Undang-Undang Dasar dan segala peraturan
"jang lain jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa
"saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan
"kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan
"setia kepada Nusa dan Bangsa".-

Djakarta, 16 Agoestoes 1950.

Jang soempah,

ttd.

M. Soetardjo Kartohadikoesoemo

Soempah dioetjapkan dihadapan saja,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEKARNO

Untuk salinan jang sama bunjinja :
Pegawai Kabinet Menteri Dalam Negeri

(M. Sape'i)

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

K E P A D A

**YTH. SDR. MAYOR JENDRAL
Dr. SETIADI KARTOHADIKOESOEMO
KWARNAS GERAKAN PRAMUKA
JL. MERDEKA TIMUR
DI**

J A K A R T A.

Nomor : D.J. 147/PD/XI/76.

Tanggal, 9 Nopember 1976.

Lampiran : 1 (satu) buku.

Perihal : Rekomendasi dan tanggapan terhadap buku Desa karangan Bapak Soetardjo Kartohadikoesoemo.

Setelah kami mempelajari buku Desa karangan Bapak Prof. Dr. Soetardjo Kartohadikoesoemo dan sehubungan pula dengan penjelasan Saudara pada waktu berkunjung ke Direktorat Jendral Pembangunan Desa pada tanggal 9 Oktober 1976, dengan hormat kami sampaikan tanggapan kami tentang buku desa tersebut sebagai berikut :

- a. Dilihat dari isi keseluruhannya mengenai buku Desa tersebut merupakan bahan yang sangat penting sekali guna lebih memahami dan mendalami pengetahuan tentang Desa-Desa kita di seluruh Tanah Air, dimana diuraikan secara hakiki terbentuknya Desa dan pertumbuhannya, dengan demikian akan lebih mantap pula dalam mengadakan pendekatan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pembangunan Desa menuju Desa Swasembada (Desa yang maju).
- b. Dari segi filosofinya, dikemukakan bahwa Desa berkembang sesuai dengan hukum aslinya yang memberikan corak bentuk keanekaragaman Desa-Desa di Indonesia, namun demikian pada inti pokoknya adalah sama yaitu kehidupan masyarakat Desa yang gotong-royong dan Pemerintah Desa yang demokratis. Keadaan pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda hanya mengatur Pemerintahan diatas Desa.

- c. Perkembangan keadaan sudah banyak perubahan yang meliputi baik dibidang Pemerintahan maupun pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini, akan tetapi hakiki struktur pedesaan kita sekarang masih terlihat sebagaimana diuraikan dalam buku Desa tersebut yang menerangkan adanya unsur-unsur kebudayaan yang bermutu tinggi tertimbun di Desa yang memberi corak kepada kepribadian Bangsa Indonesia sebagai modal budaya Bangsa yang berkembang sepanjang sejarah Bangsa.
- d. Sudah barang tentu kalau buku ini akan dicetak ulang, mengenai hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan sekarang seperti gagasan pada Bab IV mengenai uraian Daerah Otonom Tingkat III perlu mendapatkan tinjauan kembali berhubungan dengan telah adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dimana hanya mengenal adanya Daerah Otonom Tingkat I dan II saja. Tidak kurang pentingnya juga mengenai penulisan perlu disesuaikan dengan ejaan baru bahasa Indonesia.

Demikian untuk menjadi maklum dan semoga bermanfaat.

DIREKTUR JENDRAL PEMBANGUNAN DESA

t.t.d.

A C H M A D I

TEMBUSAN :

A r s i p.-



Diagam
Tanda Kehormatan

Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia

menganugerahkan :

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

tingkat : IV

kepada :

Sutardjo Kartohadikusumo
Gubernur Pensiun

ALAS DJASANJA JANG LUAR BIASA TERHADAP NUSA DAN BANGSA

Djakarta, 17 AGUSTUS 1962

Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia

Sukarno

Sukarno

Salinan

LAMPIRAN : X

**DEPARTEMEN PERGURUAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
D J A K A R T A**

Djika menjawab soerat ini harap
diseboetkan tanggal dan nomornja
No. : 52/Dir. Djen/PT/K

Djakarta, 11 Nopember 1966.

Lampiran :

Kepada :

Hal : Pemberian **Gelar Doctor
Honoris Causa**

Jth. Sdr. Pd. Rektor I.K.I.P.
di
D J A K A R T A

Menghubungi surat Saudara tgl. 10 Oktober 1966 No. 410/
Rek/IKIP/66 seperti pokok hal surat ini, bersama ini kami dapat
menjetudjui pemberian **gelar Doctor Honoris Causa** kepada
Sdr. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, ex anggota Panitia Penje-
lidik Kemerdekaan Indonesia.

Demikianlah harap mendjadi maklum.

Direktur Djenderal Perguruan Tinggi

Tjap / t.t.d.

(**M a s h u r i**)

Sesuai dengan jang asli :

Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi I.K.I.P.

B a n d u n g ,

t.t.d.

(**Bonari Pohan, Bc. Hk.**)

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
B A N D U N G**

Nomor : 048/Ist/Sp. Rek/IKIP/66

Bandung, 20 Desember 1966.

**REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
BANDUNG**

Memperhatikan :

Keputusan Sidang Senat Guru Besar I.K.I.P. Bandung pada tanggal 26 Djuli 1966 bahwa Sdr. Soetardjo Kartohadikoesoemo, dosen luar biasa I.K.I.P. Bandung, memenuhi segala persyaratan untuk memperoleh **Gelar Doctor Honoris Causa** dalam Ilmu Pendidikan bidang Pendidikan Masyarakat.

Menimbang :

Bahwa dianggap perlu atas nama Senat Guru Besar I.K.I.P. Bandung Rektor mengeluarkan keputusan sesuai dengan keputusan Senat Guru Besar I.K.I.P. Bandung tersebut diatas ;

Mengingat :

1. Undang-undang Perguruan Tinggi No. 22 tahun 1961 ;
2. Kepoatoesan Menteri PTIP. No. 91 tahun 1962 tentang Pedoman Sementara Pemberian gelar **Doctor** (Dr. atau Ph. L.) tanggal 30 Djuli 1962 ;
3. Surat Putusan Deputy Menteri Perguruan Tinggi No. 4789/Sekret/DUP/66, tanggal 12-7-1966 tentang pengangkatan Pedjabat Rektor IKIP, Bandung ;
4. Anggaran Rumah Tangga IKIP, Bandung pasal 78, jang disahkan pada tanggal 10 Agustus 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Sambil menunggu persetujuan Direktur Djendral Perguruan Tinggi, menjtetudjui pemberian **gelar Doctor Honoris Causa** dalam Ilmu Pendidikan bidang Pendidikan Masjarakat kepada Sdr. Soetardjo Kartohadikoesoemo dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikoet :

1. Promotor ke-I adalah Prof. Dr. Achmad Sanusi S.H., pd. Rektor IKIP. Bandung, jang bertanggung-djawab dalam bidang Ilmu Administrasi/ Tatapradja.
2. Promotor ke-II adalah Prof. Dr. Sikun Pribadi, Guru Besar Tetap pada IKIP. Bandung jang bertanggung djawab dalam bidang Ilmu Pendidikan.
3. Promovendus harus menjiapkan pidato-wisoeda koerang lebih doeabelas halaman folio-tik jang isinja sesoeai dengan gelar jang akan diberikan kepadanya dan disetjoedjoei oleh promotor-promotornja ;

Segala sesoeatoe akan dioebah apabila ternjata terdapat kekeliroean dalam soerat kepoatoesan ini.

Pd. Rektor Institoet Kegoeroean dan Ilmoe Pendidikan
B a n d o e n g,

t.t.d.

(Prof. Dr. Achmad Sanoesi S.H.)

TEMBUSAN kepada :

1. Semua Anggota Senat Guru Besar ;
2. Para Pembantu Rektor ;
3. Para Dekan / Ketua Balai ;
4. Para Promotor ;
5. Promovendus ;
6. A r s i p.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
BANDUNG

PIAGAM

Atas pertimbangan-pertimbangan mengenai jasa-jasa yang besar yang telah dipsembahkan kepada Bangsa Indonesia dalam bidang Pendidikan Masyarakat;

Mengingat pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 1961; Keputusan Presiden No. 1 tahun 1963; Keputusan Menteri P.T.P. No. 55 tahun 1955; Keputusan Deputy Menteri Perguruan Tinggi tanggal 12 Djuli 1956; Keputusan Selanjut Senat Guru Besar I.K.I.P. Bandung tanggal 25 Djuli 1956 yang menyetujui pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Masyarakat kepada Sri Soetardjo Kartohudikoesoemo dan persetujuan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 11 Nopember 1956 No. 52/Dadjen/P.T.K. maka:

Tada hari ini, Sabtu tanggal 28 Januari 1967, Lima Rector Ketua Senat Guru Besar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung menyetujui kepada:

Soetardjo Kartohudikoesoemo

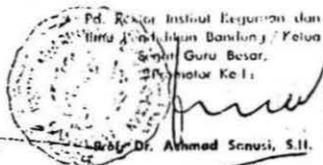
dilahirkan di Kandangan, Blora, pada tanggal 22 Oktober 1892, gelar

DOCTOR HONORIS CAUSA

Dalam Ilmu Pendidikan Bidang Pendidikan Masyarakat beserta semua hak, wewenang dan kehormatan yang berkaitan dengan gelar tersebut.

Untuk pengukuhan gelar tersebut, maka piagam ini dibubuhi tangan Rector Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung beserta tandatangan dan Rector, Ketua Senat Guru Besar dan Promotor promotoria.

Bandung, 28 Januari 1967.



Promotor-ke-II:

Prof. Sikun Pribadi, M.A. Ph. D.

Promotor-ke-I: Dr. Ahmad Sanusi, S.I.I.



Petikan saking Nawala kakantjangan Dalem Sampelan Dalem Kangdjeng Gusti
Pangeran Adipati Ario Paku Alam, ingkang djuumeneng kaping VIII ing
Pradja Paku Alaman, Ngajogjakarta.

Ameka: 1/2507/Ch/176/1976

MANIRA KANGDJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIA PAKU ALAM
INGKANG DJUMENENG KAPING VIII ING PRADJA PAKU ALAMAN
NGAJOGJAKARTA.

Wu: anupiksani sabandjure

Angengeli sabandjure :

Amanggali sabandjure :

MARMANE SAMENKONG DAL: KAPARENGING KARSA MANIRA
AMARINGI SIH MANIRA PANGKAT SARTA KALINGGUHAN :

Pangeran
marang hari marira ipe. R. Soetardjo
Kartahadi Kusuma, sabandjure nganggola sesebut,
Dr. H.P.H. Soetardjo Kartaningprang

Petikane Nawala kakantjangan iki kapatingake marang kang darbeni hak, supaya
disumurupi lan diestokake saperlune, sarta minangka dadi pikukuh
PAKU ALAMAN, NGAJOGJAKARTA, tanggal kaping 29 *Kaluh*
Ché 1908 utawa surja kaping 30 *Maret 1976*

Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Aria
T.a.D.
PAKU ALAM

Sampun botjog kalijan ingkang ka-
wrat ing Nawala kakantjangan Dalem
kasebut inggil.

Dumateng :

Dr. H.P.H. Soetardjo Kartaningprang
H.P.H. Nototardjo

LELAYU

Telah wafat dengan tenang pada hari Senen Wage, tanggal 20 Desember-1976, jam 0.30 (setengah satu malam) di Jakarta, suami, ayah, cyang kami yang tercinta :

K.P.H. Dr.SOETARDJO KARTANINGPRANG Mahaputra.
dalam usia 86 tahun.

Jenazah akan diberangkatkan dari rumah :

Jl.Jendral Urip Sumohardjo 144 A Solo.

pada hari : Selasa,

tanggal : 21 Desember 1976,

Jam : 10.00 pagi.

ke Astana : BIBIS LUHUR.

Apabila pada waktu hidupnya almarhum ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya.

Atas nama keluarga

SOEGONDO NOTODISOERJO.

TURUT BERDUKACITA

**Direktur, dan Segenap Karyawan
Direktorat Pendidikan Masyarakat
Ditjen PLS dan OR Dep. P dan K**

dengan ini menyatakan turut berdukacita yang sedalam dalamnya atas wafatnya :

Bapak KPH Soetardjo Kartaningprang

**Ayahanda Bapak Drs Setiadi Kartohadikoesoemo
(ex. Dirjen Pendidikan Dasar Dep. P dan K)**

pada hari Senen tanggal 20 Desember 1976 jam 00,30 dalam usia 84 tahun.

Semoga arwah beliau mendapat tempat yang layak di sisi TUHAN YANG MAHA ESA sesuai dengan perbuatannya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga pula diberi kekuatan serta mendapat Rakhmat Taufik dan HidayahNya.

Jakarta, 20 Desember 1976.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih dan menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Bapak Menteri P.U.T.L.,
4. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat beserta Anggota2 & Staf,
5. Bapak Ketua Dewan Pertimbangan Agung R.I. beserta Anggota2 & Staf,
6. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. beserta Anggota2 & Staf,
7. Bapak Kepala Staf Angkatan Udara beserta Staf,
8. Bapak Gubernur LEMHANNAS beserta Staf,
9. Bapak Panglima Kopadpra beserta Staf,
10. Bapak Panglima Kodam V/Jaya beserta Staf,
11. Bapak Gubernur/KDII I Jawa Tengah,
12. Bapak Wakil Gubernur/KDII I Jawa Tengah di Surakarta,
13. Bapak Walikota/KDII II Kusumadine Surakarta beserta Staf,
14. Bapak Sri Paku Buwono XII,
15. Bapak Sri Paku Alam VIII,
16. Bapak Sri Mangku Negoro VIII,
17. Staff Dok.&Mass Media Set. Nra. R.I.,
18. TVRI, RRI, Radio El Shinta, Radio Preambora, Radio Amigo di Mans-media di Pusat dan Daerah,
19. Para Pembesar Angkatan Bersenjata dan Sipil lain, yang tidak dapat disebutkan namanya satu demi satu,
20. Para Pimpinan Badan-badan Pemerintah, Semi-Pemerintah dan Swasta, yang tidak dapat disebutkan namanya satu demi satu,
21. Yayasan bunga Kamboja, Jakarta,
22. Fibak-fibak Kepolisian, Pamong-Pajaja, RW. dan RT setempat serta Masjid Al Makmur,
23. Bapak Dokter-dokter Sadatun, Sumargo dan H.A.A. Noor serta Jurusawat,
24. Keluarga Besar Yayasan Perguruan Cikini Jakarta, dan
25. Segenap Sanak-Kadang dan Hamdi-tautan, yang tidak dapat disebutkan namanya satu demi satu,

Untuk pernyataan turut berduka cita serta bantuan dalam perawatan dan atau pemakaman Suami/Ayah/Mertua/Kakek/Duyut kami :

Kanjeng Pangeran Hario Doctor h.c. Soetardjo Kartaningprang (alias) Kartohadikoesoemo (Mahaputera)

sejak sakitnya pada hari Rabu Pagi tanggal 8 Desember 1976 hingga wafatnya hari Senen Wage tanggal 20 Desember 1976 jam 00.30 WIB dan pemakamannya dengan upacara militer di Astana Bibaluhur, Surakarta pada hari Selasa Kliwon tanggal 21 Desember 1976. Atas segala kekhilafan almahum semasa hidupnya, maka isteri/Anak/Menantu/Cucu/Cicit almarhum memohonkan maaf dengan segala kevidian hati.

YANG BERDUKA CITA :

1. G.R.R.A. Ks. Soetardjo Kartaningprang (alias) Kartohadikoesoemo,
2. R.M. Soesatlo Koesoemonoto,
3. Raden Ario Mr. Abdul Wahab Suryadinigrat,
4. R.M. Setladjit Koer-emohadiprodo,
5. R.M. Drs. Setladjit Kartohadikoesoemo (alias) Koesoemaningprang, Mayjen. TNI/AD Purn.
6. R.A. Soesantil Predjonejadi,
7. May. TNI/AU Abcbakar Hasan,
8. R. Sastrohardjo,
9. R.M. Setlotomo,
10. R.M. Ir. Soetedjo Koesoemonegoro,
11. R.M. Beedisatio,
12. R.M. Haksomo,
13. Leikol. TNI/AU R.M. Ir. Sudono Kusumaningrat dan
14. R.M. Ir. Trenggono Kusumaningrat,

berserta keluarganya masing-masing :

TURUT BERDUKA-CITA :

1. R. Sugondo Notodisoerjo,
2. Para Putera-puteri M. Kartadinoto almarhum,
3. Para Putera-puteri R.T. Kartohadipriatno almarhum,
4. Para Putera-puteri R. Notowidigdo almarhum dan,
5. Para Putera-puteri M. Kiwarin almarhum,

berserta keluarganya masing-masing

Jakarta, 23 Desember 1976

DAFTAR SUMBER

I. BUKU

1. Adam, Cindy, **Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat**, terjemahan Mayor Abdul Bur Salim, Gunung Agung, Jakarta, 1966.
2. Ariwiadi, Drs, **Ikhtisar Sejarah Nasional Indonesia** (Awal - Sekarang), D 1, Seri Text Book Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.
3. Disjarah Dam VI/Siliwangi, **Siliwangi Dari Masa Ke Masa**, Angkasa, Bandung 1979.
4. Dinas Sejarah Militer TNI—AD, **Cuplikan Sejarah Perjuangan Angkatan Darat**, Dinas Sejarah Militer TNI—AD dan Fa. Mahyuma, Bandung - Jakarta, 1972.
5. Hatta, Drs, Moh, **Legende dan Realitet** Sekitar Proklamasi 17 Agustus, **Kumpulan Karangan IV**, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1954.
6. Hatta, Moh, Isi Proklamasi, **Kumpulan Karangan IV**, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1954.
7. Hatta, Moh, **Sekitar Proklamasi**, Tintamas, Jakarta, 1969.
8. IKIP Bandung, **Wisuda Gelar Dr. HC Kepada Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo**, 28 Januari 1967.
9. Kahin, George Mc Turnan, **Nationalism and Revolution in Indonesia**, **Cornel University**, New York, 1959.
10. Kementerian Penerangan, **Detik dan Peristiwa 17 Agustus 1945**, 23 Januari 1953.
11. Kementerian Penerangan - Jawatan Radio Republik Indonesia, **Sejarah Radio di Indonesia**, Cetakan I, Seno NV, Jakarta, 1953:
12. Kementerian Penerangan, **Republik Indonesia - Daerah Istimewa Yogyakarta**, 1953.
13. Kementerian Penerangan, **Republik Indonesia - Propinsi Jawa Tengah**, 1952.
14. M. Said, Drs. dan D. Mansur, Drs., **Mendidik Dari Zaman ke Zaman**, Cetakan III, PT. Dian Rakyat, Bandung - Jakarta, 17 Januari 1963.
15. Nasution, AH, Jenderal TNI, Dr., **Sejarah Perjuangan Nasional Dibidang Bersenjata**, Mega Bookstore, Jakarta, 1966.
16. Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70, **Bung Hatta Mengabdikan Pada Cita-cita Perjuangan Bangsa**, Cetakan I, Jakarta, 1972.
17. Sanusi Pane, **Sejarah Indonesia**, jilid II, Perpustakaan Perguruan, Kementerian PP dan K, Jakarta, 1956.

18. Simatupang, TB, **Pelopop Dalam Perang Pelopop Dalam Damai**, Yayasan Pustaka Militer, Jakarta, 1954.
19. Slamet Mulyono, Prof. Dr, **Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia**, II, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1969.
20. Sutarjo Kartohadikusumo, **Dasar Essentieel Pendidikan Calon Sarjana Pancasila**, Wisuda **Gelar Doctor Honoris Causa** Sutarjo Kartohadikusumo, Balai Pustaka, Jakarta, 1969.
21. Sutarjo Kartohadikusumo, **Desa**, Cetakan ke 2, Sumur Bandung, 1969.
22. Sutarjo Kartohadikusumo, **Musyawah dan Mufakat**, Prasaran Sutarjo Kartohadikusumo kepada Badan Pembantu Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bandung, 1963.
23. Sutarjo Kartohadikusumo, **Membangun Masyarakat Murba**, Bulan Bintang, Jakarta.
24. Sutarjo Kartohadikusumo, **Rapat Desa**, Analisa singkat tentang Filsafat Hukum Negara Asli dan Demokrasi Indonesia Asli.
25. Sutarjo Kartohadikusumo, **Pegawai Pangreh Praja dan Pemerintah Daerah dengan Penjelasannya**, Surakarta, 25 April 1946.
26. Sutrisno, Drs, **Letnan Jenderal Anumerta Siswondo Parman**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1980/1981.
27. Team Penyusun Buku Almanak Jawa Tengah, **Jawa Tengah Selayang Pandang**, 1975.
28. Tanu Suherly, Drs, **Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia**, D, Seri Text Book Sejarah ABRI - Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.
29. Umi Prahastuti, **Gabungan Politik Indonesia**, Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 1970.
30. Woyowasito, Prof. Drs, S, **Kamus Umum Inggris Indonesia**, Cypress. Jakarta, 1972.
31. Yusmar Basri, **Petisi Sutarjo (Usul Indonesia Berdiri Sendiri**, Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 1970).

II. MAJALAH/HARIAN.

1. Berita Buana, Harian, Jakarta, 28 Desember 1976.
2. Sinar Harapan, Harian, Jakarta, 20 Desember 1976.
3. Sinar Harapan, Harian, Jakarta, 21 Desember 1976.
4. Suara Merdeka, Harian, Semarang, 28 Juni 1982.
5. Tempo, Majalah, Jakarta, Agustus 1976.
6. Tempo, Majalah, Jakarta, 1 Januari 1977.
7. Kompas, Harian, Jakarta, 9 September 1974.
8. Kompas, Harian, Jakarta, 20 September 1976.
9. Kompas, Harian, Jakarta, 27 Desember 1976.

III. DOKUMEN/MANUSKRIP/SUMBER TERTULIS LAINNYA

1. Abeyasekere, Susan, The Sutarjo Petition, (**Centre of South East Asian Studies, Monash University, Australia**).
2. Akhmad Sanusi, Prof., Dr, SH, Pidato pada Wisuda **Gelar Doctor Honoris Causa** Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo, Sebagai Promotor ke I Bidang Ilmu Administrasi Negara Guru Besar pada IKIP Bandung, 28 Januari 1967.
3. Akhmadi, Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri, Rekomendasi dan Tanggapan terhadap buku Desa karangan Bp. Sutarjo Kartohadikusumo, Jakarta, 9 Nopember 1976.
4. Berita **Lelayu**, dikirim oleh Sugondo Notodisuryo atas nama keluarga almarhum Sutarjo Kartohadikusumo.
5. Garnadi Prawirodirjo, Prof. Dr, Sekretaris Senat Guru Besar IKIP Bandung, Riwayat Hidup Promovendus Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo, Bandung, 28 Januari 1967.
6. Pernyataan Ikut Berduka Cita, dari Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen PLS dan OR Dep. P dan K, tertanggal 20 Desember 1976, Kompas, 27 Desember 1976.
7. Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, tentang Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tingkat IV, kepada Sutarjo Kartohadikusumo, Jakarta, 17 Agustus 1962.
8. Piagam **Gelar Doctor Honoris Causa**, dari IKIP Bandung kepada Sutarjo Kartohadikusumo. Bandung 28 Januari 1967.

9. Sarino Mangunpranoto, Kata Sambutan Menteri P dan K dalam menanggapi Penerbitan Risalah Wisuda **Gelar Doctor Honoris Causa** Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo, Jakarta, 15 April 1967.
10. Setiadi Kartohadikusumo, Drs. Asal-Usul Mas Sutarjo Kartohadikusumo, Jakarta, 17 Desember 1981.
11. Setiajid, Asal-Usul Sutarjo Kartohadikusumo, Jakarta, 14 Desember 1981.
12. Sikun Pribadi, Prof. Dr, Pidato pada Wisuda **Gelar Doctor Honoris Causa** Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo, Sebagai Promotor II Bidang Ilmu Pendidikan Guru Besar pada IKIP Bandung, 28 Januari 1976.
13. Surat Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 19 Agustus 1945, tentang Pengangkatan Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Gubernur Jawa Barat.
14. Surat Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, Nomer 14-A-47, Jakarta 23 Maret 1947, tentang Pengangkatan M. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
15. Surat Pengangkatan dari Presiden Republik Indonesia, Nomer 37-A-47, Jakarta 3 Juni 1947, tentang Pengangkatan M. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung, terhitung mulai tanggal 23 April 1947.
16. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomer 89/A.Civ/48, tanggal 15 Nopember 1948, tentang Pengangkatan M. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, terhitung mulai tanggal 15 Nopember 1948.
17. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomer 109/M tahun 1953, tentang Penetapan Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Gubernur Diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1948.
18. Surat Keputusan KGPAА Paku Alam VIII, Nomer 1/2507/Ch/Ws/1976, tanggal 30 Maret 1976, tentang Pemberian **Gelar Pangeran**, dengan sebutan **Dr. KPH Sutarjo Kartaningprang**.
19. Surat Keputusan Rektor IKIP Bandung, Nomer 048/Ist/Sp. Rek/IKIP/66, tgl. 20 Desember 1966, tentang Persetujuan Pemberian **Gelar Doctor Honoris Causa** dalam Ilmu Pendidikan bidang Pendidikan Masyarakat kepada Sdr. Sutarjo Kartohadikusumo.
20. Sutarjo Kartohadikusumo, Riwayat Kerja Sutarjo Kartohadikusumo, Jakarta, 17 Agustus 1965.

21. **Sutarjo Kartaningprang**, Dr. GPH, Lahirnya Petisi Sutarjo Menandai Gejala Keruntuhan Kekuasaan Kolonial Belanda.
22. Sutarjo Kartohadikusumo, Bung Hatta dan Pamong Praja, dalam Buku Bung Hatta Mengabdikan Cita-Cita Perjuangan Bangsa, Jakarta, 1972.
23. Teks Sumpah M. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Anggota DPR, Jakarta, 16 Agustus 1950.
24. Tobing, IPL, Mungkinkah Bangsa Indonesia melupakan Sutarjo, Jakarta, 19 September 1980.
25. Ucapan Terima Kasih, dari Keluarga Almarhum Sutarjo Kartohadikusumo, tertanggal 23 Desember 1976, Kompas, Jakarta, 27 Desember 1976.

IV. WAWANCARA

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TEMPAT & TGL. WAWANCARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Abdul Wahab Suryodiningrat, Mr.	Pensiun Sekretaris Negara	Jl. H. Agus Salim 124 Jakarta	Jakarta, 14 Desember 1982	Menantu Dr. Sutarjo Kartohadikusumo
2	Edinah Setiadi Kartohadikusumo Ny.	Istri Mayjen. Purn. Drs. Setiadi Kartohadikusumo	Jl. Hanglekir II/14 A Kebayoran Baru, Jakarta	Jakarta, 15 - 16 Juni 1981	Menantu Dr. Sutarjo Kartohadikusumo
3	Hartomo, Kolonel, RM	Koordinator tenaga pendidik AKABRI DARAT Magelang	Jl. Kaswari B 3/5 Panca Arga Magelang	Magelang 14 Agustus 1982	Informasi tentang Astana Bibis Luhur Surakarta.
4	Kusbandinah Sutarjo Kartohadikusumo, GBRA, Ny.	Janda almarhum Sutarjo Kartohadikusumo	Jl. Raden Saleh 18 Jakarta	Jakarta, 14 Desember 1982	Pensiun Janda Gubernur, Ketua DPA dan Anggota DPR
5	Murniati, SH	—	Perumahan RRI/Rt 11 Kel. Jajar, Surakarta	Surakarta, 15 Juni 1982	Putri Ny. Sukarsih, yang dulu merawat anak-anak Sutarjo.
6	Pudyo Citrosomo, Ky. Ng.	Pensiun Pegawai Bank	Wisma Amerta No. 3 Ngadisono Pos Prawit, Surakarta	Surakarta, 15 Juni 1982	Dulu jadi Statut dengan pangkat Administrator Bank Pegawai 1960, yang didirikan Sutarjo
7	Setiadi Kartohadikusumo, Mayjen TNI Purn. Drs.	Purnawirawan Mayjen TNI, Anggota MPR, pernah jadi Dirjen Pendidikan Dasar Dep. P & K	Jl. Hanglekir II/14 A Kebayoran Baru Jakarta	Jakarta, 15 - 16 Desember 1981 13 Desember 1981	Putra keempat Dr. Sutarjo Kartohadikusumo
8	Setiajid	Pensiun	Jl. Raden Saleh 18 Jakarta	Jakarta, 14 - 15 Desember 1981	Putra ketiga Dr. Sutarjo Kartohadikusumo

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT		KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
9	Sony	Reporter Radio El Shinta Jakarta	Studio Radio El Shinta, Jakarta	Jakarta, 1976	Rekaman wawan- cara Bp. Sony dg. almarhum Sutarjo disim- pan pd Yayasan Sutarjo
10	Suharpono	Pensiun Pega- wai Bank	Gg. Dewi Ratih No. 15 Rt. 19 Kelurahan Jajar, Sura- karta	Surakarta, 15 Juni 1982 14 Agustus 1982	Putra Bp. Dipokusumo (usia 97 tahun teman Sutarjo)
11	Sukarsih, Ny. (Ibu Siten)	Janda almarhum Mukijo, Asisten Wedana Dono- rojo Pacitan	Perumahan RRI /Rt. 11 Kelu- rahan Jajar, Surakarta	Surakarta, 15 Juni 1982	Dulu ikut mera- wat keluarga Sutarjo waktu di Surakarta
12	Susatyo Kusumo- noto	Pensiun Pegawai RRI	Jl. Raden Saleh 18, Jakarta	Jakarta, 14 - 15 Desember 1981	Putra pertama Dr. Sutarjo Kartohadikusumo

**Perpustakaan
Jenderal**

9